

# 2023



# LKJIP

## Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023

✉ [setdakab@jombangkab.go.id](mailto:setdakab@jombangkab.go.id)

📱 @setda\_jombangkab

☎ (0321)866025

📍 Jl. Wachid Hasyim 137, Kec. Jombang,  
Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61417

📺 <https://www.youtube.com/@Setdakab>

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 dapat disusun dengan lancar. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus terus dilakukan untuk membangun penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan terukur. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bahan evaluasi yang obyektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam menilai capaian kinerja dan pertanggungjawaban Instansi Pemerintah guna meningkatkan kinerja serta bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut, hal ini juga merupakan perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan *Good and Clean Government*.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 merupakan hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang. Hal ini sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 ini masih banyak kekurangan atau masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun demi sempurnanya penyusunan LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang ini sangat kami harapkan yang nantinya akan kami pergunakan sebagai bahan penyempurnaan dalam meningkatkan kinerja serta penyelenggaraan pemerintahan dimasa yang akan datang.

Jombang, 7 Februari 2024

Sekretaris Daerah  
Kabupaten Jombang



AGUS PURNOMO, S.H., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 197207101998031010

## Daftar Isi

COVER.....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	1
1.3 Dasar Hukum.....	2
1.4 Profil Sekretariat Daerah.....	4
1.5 Susunan Organisasi Sekretariat Daerah .....	4
1.6 Permasalahan dan Isu Strategis .....	5
1.7. Sumber Daya Manusia.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	12
2.1 Perencanaan Strategis.....	12
2.2 Visi.....	12
2.3 Misi.....	13
2.4 Tujuan .....	13
2.5 Sasaran.....	13
2.6 Program dan Kegiatan.....	14
2.7 Strategi dan Kebijakan.....	14
2.8 Perjanjian Kinerja .....	15
2.9 Indikator Kinerja Individu (IKU).....	20
2.10 Indikator Kinerja Individu (IKI) .....	20
2.10.1 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat .....	20
2.10.2 Program Perekonomian dan Pembangunan .....	23
2.10.3 Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota .....	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	29
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	30
3.1.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun Berjalan.....	30
3.1.2 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan 2 (dua) tahun terakhir.....	37

3.1.3 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah .....	45
3.1.4 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja di level nasional/provinsi.....	52
3.1.5 Analisis atas Realisasi Kinerja .....	57
3.2 Realisasi Anggaran.....	58
3.2.1 Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran .....	58
3.2.2 Efisiensi penggunaan sumber daya.....	59
3.3 Hambatan atas Pencapaian Indikator Kinerja yang Belum Tercapai .....	73
3.4 Upaya Perbaikan Kinerja.....	73
3.5 Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP oleh APIP Tahun 2023 .....	74
BAB IV PENUTUP .....	75
4.1 Kesimpulan .....	75
4.2 Rekomendasi .....	75
DAFTAR LAMPIRAN .....	77

## Daftar Tabel

Tabel 1.1 Pegawai Jabatan Struktural Eselon II dan III Sekretariat Daerah per desember 2023 .....	7
Tabel 1.2 Formasi Pegawai Berdasarkan Eselon, Jenis Jabatan, dan Golongan per Desember 2023.....	8
Tabel 1.3 Formasi Pegawai berdasarkan Pendidikan per desember 2023.....	10
Tabel 2.1 Strategi dan Arah Kebijakan.....	14
Tabel 3.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun Berjalan.....	30
Tabel 3.2 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan 2 (dua) tahun terakhir .....	37
Tabel 3.3 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah.....	45
Tabel 3.4 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja di level nasional/provinsi .....	52
Tabel 3.5 Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran .....	58
Tabel 3.6 Pencapaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran Tahun 2023 .....	60
Tabel 3.7 Formasi Pegawai Sekretariat Daerah Tahun 2022 .....	61
Tabel 3.8 Formasi Pegawai Sekretariat Daerah Tahun 2023 .....	61
Tabel 3.9 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Tahun 2023.....	62
Tabel 3.10 Sarana Prasarana Sekretariat Daerah Tahun 2023 .....	65
Tabel 3.11 Efisiensi Penggunaan Sarana Prasarana Sekretariat Daerah Tahun 2023 .....	71

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu laporan kinerja tahunan yang merupakan komponen dari instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. Komponen yang merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengumpulan dan pengukuran serta pelaporan kinerja. Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah berisi pelaporan atas pencapaian pelayanan organisasi output yang dihasilkan berupa capaian dari pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai sasaran strategis yang membandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Dalam rangka menjamin adanya peningkatan kualitas dalam pelayanan publik, maka analisis kinerja diperlukan dengan melakukan klarifikasi output dan outcome suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi yang ditetapkan.

Setiap Perangkat Daerah/Organisasi wajib menyusun dan menyajikan laporan kinerja berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Laporan yang dibuat secara sistematis ini memuat seluruh informasi tentang pencapaian kinerja suatu organisasi yang terdiri atas perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, target jangka menengah, realisasi kinerja dua tahun terakhir dan realisasi kinerja di level nasional/provinsi. Selain itu, Laporan ini juga memuat informasi kualitas atas capaian kinerja, informasi efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, serta informasi upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja.

Adapun Laporan ini dibuat untuk mengatasi berbagai hambatan dan persoalan yang sering dihadapi dalam penentuan dan capaian kinerja, supaya terjadinya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta realisasi atas pencapaian kinerja utama. Dengan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang dapat menjalankan kinerjanya sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta mampu menghadapi hambatan yang timbul dari permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan indikator kinerja utama organisasi.

### **1.2 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 dimaksudkan untuk melaksanakan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah, pada pasal 5 yang menyebutkan bahwa pelaporan kinerja merupakan bagian dari SAKIP.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

1. Memberi informasi mengenai target tentang Penjenjangan Kinerja;

2. Memberikan gambaran Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang yang akuntabel, sehingga dapat berperan secara efektif, efisien dan ekonomis serta responsive;
3. Memberikan gambaran keberhasilan/kegagalan tentang kinerja penyelenggaraan di Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang dalam pencapaian target sasaran pada kurun waktu tahun anggaran 2023 secara jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
4. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur di lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
5. Sebagai bahan evaluasi terhadap dalam penyusunan perencanaan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang.

### **1.3 Dasar Hukum**

Dasar hukum atau landasan normatif penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yaitu:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se Jawa Timur;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 3/D);
16. Peraturan Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Bupati Jombang Nomor 41 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 41/E, Tambahan Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 41/E);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja;
22. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;
24. Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang;
25. Peraturan Bupati Jombang Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang.

#### **1.4 Profil Sekretariat Daerah**

Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai fungsi:

1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
4. Pelayanan administrasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi Daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

#### **1.5 Susunan Organisasi Sekretariat Daerah**

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang sebagaimana Peraturan Bupati Jombang Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang Kabupaten Jombang terdiri dari:

- a. Sekretaris Daerah
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
  1. Bagian Tata Pemerintahan, membawahi:
    - a) Kelompok Jabatan Fungsional
  2. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
    - a) Kelompok Jabatan Fungsional
  3. Bagian Hukum, membawahi:
    - a) Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:
  1. Bagian Perekonomian, membawahi:
    - a) Kelompok Jabatan Fungsional
  2. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahi:
    - a) Kelompok Jabatan Fungsional
  3. Bagian Pengadaan Barang /Jasa, membawahi:
    - a) Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Asisten Administrasi Umum, membawahi:
  1. Bagian Umum, membawahi:
    - a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
    - b) Sub Bagian Perlengkapan; dan
    - c) Sub Bagian Rumah Tangga.
  2. Bagian Organisasi, membawahi:
    - a) Kelompok Jabatan Fungsional
  3. Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan, membawahi:

- a) Sub Bagian Protokol;
  - b) Sub Bagian Komunikasi dan Pimpinan.
4. Bagian Perencanaan dan Keuangan, membawahi:
- a) Kelompok Jabatan Fungsional

Masing-masing Asisten Sekretaris Daerah dipimpin oleh Asisten yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah, dan masing-masing Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten, Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

### **1.6 Permasalahan dan Isu Strategis**

Berdasarkan tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Bupati Jombang Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang dijadikan perumusan kebijakan penyusunan perencanaan sebagai berikut:

1. Penerapan Kebijakan Bidang Tata Pemerintahan masih belum maksimal;
2. Pengelolaan Fasilitas sarana prasarana ibadah dan lembaga keagamaan masih belum maksimal;
3. Belum optimalnya pemahaman perangkat daerah tentang tugas dan fungsi Sekretariat Daerah terhadap harmonisasi dan sinkronisasi Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
4. Kontribusi BUMD terhadap PAD masih rendah;
5. Pejabat Pembuat Komitmen, Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan harus memiliki Sertifikat Kompetensi;
6. Penyediaan sarana dan prasarana belum berdasarkan analisis kebutuhan barang;
7. Pengelolaan aset lingkup Setda masih secara manual;
8. Kualitas Pelayanan Publik yang prima belum maksimal; dan
9. Implementasi Akuntabilitas Kinerja Setda belum berjalan maksimal.

Disamping permasalahan utama (*strategic issued*) sebagaimana tersebut di atas, isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance* dan *clean government* sehingga akan berdampak pada pembangunan daerah. Secara umum isu dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain sebagai berikut:

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima;
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintah;
3. Perkembangan teknologi yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya;
4. Ekspetasi terhadap produk hukum daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
5. Dinamika penataan organisasi dan ketatalaksanaan perangkat daerah;

6. membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk mewujudkan komitmen; dan
7. Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Dalam hal menyiasati perkembangan permasalahan yang terjadi serta isu-isu strategis yang muncul, tentunya dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap pelaksanaan penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang belum berjalan dengan baik sebagai upaya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional dengan peningkatan kualitas yang terukur, relevan serta memaksimalkan monitoring, pengukuran serta evaluasi kinerja di setiap tingkatan.

### **1.7. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan unsur terpenting dalam suatu organisasi. Demi mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dan berdaya saing, maka diperlukan sumber daya manusia yang mencukupi secara kuantitas maupun kualitas.

**Tabel 1. 1 Pegawai Jabatan Struktural Eselon II dan III Sekretariat Daerah per desember 2023**

No	Nama	Jabatan
1.	AGUS PURNOMO, S.H., M.Si NIP. 19720710 199803 1 010	Sekretaris Daerah
2.	SUDIRO SETIONO, S.Sos., M.Si. NIP. 19760501 200112 1 002	Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan
3.	Drs. MOCHAMAD SALEH, M.Si. NIP. 19670917 199403 1 009	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum dan Politik
4.	SRI SURJATI, S.Si., M.Si. NIP. 19700113 199703 2 003	Staf Ahli Bidang Keuangan, Ekonomi dan Pembangunan
5.	Drs. PURWANTO, M.KP. NIP. 19661206 198902 1 002	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat
6.	Drs. WIGNYO HANDOKO, M.Si NIP. 19641211 199412 1 002	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
7.	Dr. drg. SUBANDRIYAH, M.KP. NIP. 19640316 198903 2 013	Asisten Administrasi Umum
8.	Plt. ADI PRASETYO, S.P., M.Si. NIP. 19700714 199703 1 013	Kepala Bagian Tata Pemerintahan
9.	Plt. IMRON, S.IP., M.Si NIP. 19681012 199003 1 008	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
10.	YAUMASSYIFA', M.Si NIP. 19690605 200312 2 009	Kepala Bagian Hukum
11.	AMINATUR ROKHIYAH, S.E., M.KP. NIP. 19670717 199202 2 003	Kepala Bagian Perekonomian
12.	SUPRADIGDO, ST., M.Si NIP. 19690904 200112 1 005	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
13.	JOKO MURCOYO, ST., M.Si. NIP. 19690309 199202 1 001	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa
14.	MOCHAMAD HASAN, S.Sos., M.Si NIP. 19661205 199011 1 002	Kepala Bagian Umum
15.	SUGIANTO, S.Sos NIP. 19740414 199302 1 001	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
16.	ADI PRASETYO, S.P., M.Si. NIP. 19700714 199703 1 013	Kepala Bagian Organisasi
17.	IMRON, S.IP., M.Si NIP. 19681012 199003 1 008	Kepala Bagian Perencanaan Dan Keuangan

**Tabel 1. 2 Formasi Pegawai Berdasarkan Eselon, Jenis Jabatan, dan Golongan per Desember 2023**

No	Unit Kerja / Bagian	Jenis Eselon			Golongan				Struktural	Jenis Jabatan			Status		Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		II	III	IV	I	II	III	IV		Fungsional Tertentu	Fungsional Umum	Pelaksana	PNS	Honorer	L	P	
1.	<b>Sekretariat Daerah</b>	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	<b>1</b>
2.	<b>Asisten</b>	3	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	3	-	2	1	<b>3</b>
3.	<b>Staf Ahli</b>	3	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	3	-	3	-	<b>3</b>
4.	<b>Bagian Tata Pemerintahan</b>	-	-	-	-	1	7	-	-	-	3	5	8	1	4	5	<b>9</b>
5.	<b>Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat</b>	-	-	-	-	1	5	1	-	-	3	4	7	6	10	3	<b>13</b>
6.	<b>Bagian Hukum</b>	-	1	-	-	-	6	1	1	6	-	-	7	3	4	6	<b>10</b>
7.	<b>Bagian Perekonomian</b>	-	1	-	-	2	4	2	1	-	3	4	8	2	5	5	<b>10</b>
8.	<b>Bagian Administrasi Pembangunan</b>	-	1	-	1	4	5	1	1	-	3	7	11	1	8	4	<b>12</b>

No	Unit Kerja / Bagian	Jenis Eselon			Golongan				Struktural	Jenis Jabatan			Status		Jenis Kelamin		Jumlah Pegawai
		II	III	IV	I	II	III	IV		Fungsional Tertentu	Fungsional Umum	Pelaksana	PNS	Honorrer	L	P	
9.	<b>Bagian Pengadaan Barang/Jasa</b>	-	1	-	-	2	22	1	1	12	2	10	25	-	16	9	<b>25</b>
10.	<b>Bagian Umum</b>	-	1	3	1	12	18	1	4	-	-	34	32	65	70	27	<b>97</b>
11.	<b>Bagian Organisasi</b>	-	1	-	-	1	7	3	1	-	3	7	11	1	5	7	<b>12</b>
12.	<b>Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	-	1	2	-	3	5	1	3	-	-	6	9	9	12	6	<b>18</b>
13.	<b>Bagian Perencanaan dan Keuangan</b>	-	1	-	-	2	7	-	1	-	2	6	9	-	1	8	<b>9</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>28</b>	<b>86</b>	<b>18</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>83</b>	<b>134</b>	<b>88</b>	<b>141</b>	<b>81</b>	<b>222</b>

**Tabel 1. 3 Formasi Pegawai berdasarkan Pendidikan per desember 2023**

No	Unit Kerja / Bagian	Pendidikan								Jumlah
		SD	SLTP	SLTA	Dipl. II	Dipl. III	Dipl. IV	S1	S2	
1.	Sekretaris Daerah	-	-	-	-	-	-	-	1	<b>1</b>
2.	Asisten	-	-	-	-	-	-	-	3	<b>3</b>
3.	Staf Ahli	-	-	-	-	-	-	-	3	<b>3</b>
4.	Bagian Tata Pemerintahan	-	-	2	-	1	1	5	-	<b>9</b>
5.	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	-	-	4	-	-	-	9	-	<b>13</b>
6.	Bagian Hukum	-	-	-	-	-	-	9	1	<b>10</b>
7.	Bagian Perekonomian	-	-	3	-	1	-	4	2	<b>10</b>
8.	Bagian Administrasi Pembangunan	1	-	2	2	-	-	1	4	<b>12</b>
9.	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	-	-	3	-	1	-	19	2	<b>25</b>
10.	Bagian Umum	3	2	51	-	7	3	28	4	<b>97</b>

No	Unit Kerja / Bagian	Pendidikan								Jumlah
		SD	SLTP	SLTA	Dipl. II	Dipl. III	Dipl. IV	S1	S2	
11.	Bagian Organisasi	-	-	1	-	1	1	6	3	<b>12</b>
12.	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-	5	-	1	2	10	-	<b>18</b>
13.	Bagian Perencanaan dan Keuangan	-	-	-	2	-	-	4	3	<b>9</b>
<b>JUMLAH</b>		<b>4</b>	<b>2</b>	<b>71</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>96</b>	<b>26</b>	<b>222</b>

Keterangan: \*) Jumlah PNS: 134 orang

\*) Jumlah Non PNS: 88 orang

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Perencanaan Strategis**

Rencana Strategis atau yang disebut dengan RENSTRA merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu, berisikan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018-2023. namun Rencana Strategis Lingkup Pemerintah Kabupaten jombang telah terjadi perubahan sebanyak 2 kali. Pada penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2023 awal dan perubahan P-APBD 2023, berpedoman pada Rencana Strategis 2018-2023 Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021.

#### **2.2 Visi**

Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang adalah menjalankan Visi dari Pemerintah Kabupaten Jombang 2018-2023, yakni:

#### **“Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing”**

Berdasarkan visi yang telah dibangun, terdapat 2 (dua) nilai dasar yang hendak diwujudkan dalam periode pembangunan lima tahun terakhir, yakni nilai berkarakter dan berdaya saing. Secara filosofis, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

1. “BERKARAKTER” dapat dimaknai bahwa Jombang sebagai Kabupaten yang memiliki karakter religius dan agamis akan menjadi norma-norma dan nilai agama sebagai basis pijakan pembangunan. Pembangunan daerah di segala bidang yang dilakukan di Kabupaten Jombang pada dasarnya bertujuan mewujudkan masyarakat Jombang yang memiliki kepribadian luhur, berjiwa sosial, dan berorientasi ke depan. Sehingga kepribadian tersebut akan menjadi karakter manusia dan masyarakat yang unggul di Kabupaten Jombang.
2. “BERDAYA SAING” dapat dimaknai Setiap program yang dijalankan, setiap kegiatan yang dilaksanakan, dan setiap produk yang dihasilkan di Kabupaten Jombang dapat bersaing dengan baik pada level lokal, regional, nasional bahkan internasional. Pelaksanaan program dan kegiatan yang baik pada tingkat pemerintahan maupun swasta didasarkan pada efektivitas dan efisiensi sehingga menciptakan produktivitas tinggi. Sedangkan setiap produk atau output yang dihasilkan, baik barang maupun jasa mempunyai

daya saing yang tinggi sehingga produk atau output dari Kabupaten Jombang dapat dibanggakan dan dijadikan sebagai role model bagi daerah lain.

### **2.3 Misi**

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah dibangun, diperlukan adanya Misi untuk terwujudnya Sistem Pemerintahan Kabupaten Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing. Misi Sekretariat Daerah 2018-2023 yaitu:

#### **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Profesional”**

Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Profesional dapat diwujudkan dengan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif serta dibangun dengan nilai-nilai kejujuran sebagai karakter dasarnya. Dengan prinsip-prinsip tersebut diharapkan akan tercipta tata pemerintahan yang baik sehingga mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

### **2.4 Tujuan**

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan masalah dan menangani isu strategis yang dihadapi. Tujuan jangka menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang adalah:

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi
2. Meningkatkan kualitas pelayanan public dengan indikator Indeks Kualitas Pelayanan Publik
3. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dengan indikator Indeks SPBE

### **2.5 Sasaran**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Sekretariat Daerah menetapkan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Dengan Indikator Sasaran:
  - a. Nilai LPPD
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Dengan Indikator Sasaran:
  - a. Nilai SAKIP Pemda.
  - b. Nilai SAKIP SETDA.
  - c. Persentase kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB.
3. Meningkatnya kualitas layanan. Dengan Indikator Sasaran:
  - a. Persentase peningkatan Nilai IKM Pemda

- b. Persentase peningkatan Nilai IPP Pemda
- 4. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. Dengan indikator Sasaran:
  - a. Persentase Kesesuaian penilaian mandiri SPBE dengan Indeks SPBE

## 2.6 Program dan Kegiatan

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, sedangkan kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi. Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang memiliki 3 program dengan 32 indikator program, 19 kegiatan dengan 60 indikator kegiatan, dan 57 sub kegiatan dengan 105 indikator sub kegiatan.

## 2.7 Strategi dan Kebijakan

Dengan memperhatikan sasaran strategis, program, dan kegiatan diatas, ditetapkan rumusan strategi dan arah kebijakan antara lain:

**Tabel 2. 1 Strategi dan Arah Kebijakan**

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan melalui pelaksanaan urusan pemerintahan secara efektif dan efisien	Peningkatan kualitas dan kuantitas koordinasi dan penyelenggaraan pemerintahan tingkat kecamatan melalui Penilaian Sinergitas Kinerja Kecamatan
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah	Implementasi SAKIP berbasis teknologi informasi
				Peningkatan koordinasi, asistensi, bimbingan, monitoring dan evaluasi implementasi SAKIP
			Peningkatan pemahaman dan komitmen seluruh aparatur Sekretariat Daerah terhadap kinerja dan SAKIP	
2.	Meningkatkan kualitas	Meningkatnya kualitas	Perbaiki pelayanan publik yang cepat	Perbaiki SOP layanan publik

No.	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	pelayanan publik	layanan	dan inovatif kepada masyarakat	Implementasi pelayanan publik berbasis Teknologi informasi Optimalisasi Pemenuhan fasilitas layanan publik Monitoring dan evaluasi terhadap seluruh Perangkat daerah penyelenggara Pelayanan Publik Peningkatan kualitas Pelayanan Publik dengan menciptakan inovasi
3.	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik	tata kelola SPBE, layanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi, dan SDM SPBE.	Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu

## 2.8 Perjanjian Kinerja

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan.

Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang telah menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023, sebagai berikut:



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

### SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

**NOMOR: 050/270/415.01/2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AGUS PURNOMO, SH., M. Si**

Jabatan : **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Hj. MUNDJIDAH WAHAB**

Jabatan : **BUPATI JOMBANG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jombang, 27 Januari 2023

PIHAK PERTAMA

Sekretaris Daerah

Ditandatangani secara elektronik



**AGUS PURNOMO, SH., M.Si.**

NIP. 197207101998031010

PIHAK KEDUA  
BUPATI JOMBANG

Ditandatangani secara elektronik



**Hj. MUNDJIDAH WAHAB**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>Anggaran</b>
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai LPPD	3,44	Rp 75.799.866.526
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Pemda	73,50	
		Nilai SAKIP Setda	81	
		Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB	90%	
3.	Meningkatnya Kualitas Layanan	Persentase Peningkatan Nilai IKM Pemda	1,96%	
		Persentase Peningkatan Nilai IPP Pemda	2,87%	
4.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Kesesuaian Penilaian Mandiri SPBE dengan Indeks SPBE	96%	

Jombang, 16 Oktober 2023  
PIHAK PERTAMA  
Sekretaris Daerah  
Ditandatangani secara elektronik



**AGUS PURNOMO, SH., M.Si.**  
NIP. 197207101998031010

PIHAK KEDUA  
Pj. BUPATI JOMBANG  
Ditandatangani secara elektronik



**Hj. MUNDJIDAH WAHAB**



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

**NOMOR: 050/759/415.01/2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AGUS PURNOMO, SH., M.Si**

Jabatan : **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SUGIAT, S.Sos., M.Psi.T.**

Jabatan : **Pj. BUPATI JOMBANG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jombang, 16 Oktober 2023

PIHAK PERTAMA

Sekretaris Daerah

Ditandatangani secara elektronik



**AGUS PURNOMO, SH., M.Si.**

NIP. 197207101998031010

PIHAK KEDUA

Pj. BUPATI JOMBANG

Ditandatangani secara elektronik



**SUGIAT, S.Sos., M.Psi.T.**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

<b>NO.</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>Anggaran</b>
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai LPPD	3,44	Rp 97.938.953.960
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Pemda	73,50	
		Nilai SAKIP Setda	81	
		Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB	90%	
3.	Meningkatnya Kualitas Layanan	Persentase Peningkatan Nilai IKM Pemda	1,96%	
		Persentase Peningkatan Nilai IPP Pemda	2,87%	
4.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Kesesuaian Penilaian Mandiri SPBE dengan Indeks SPBE	96%	

Jombang, 16 Oktober 2023  
PIHAK PERTAMA  
Sekretaris Daerah  
Ditandatangani secara elektronik



**AGUS PURNOMO, SH., M.Si.**  
NIP. 197207101998031010

PIHAK KEDUA  
Pj. BUPATI JOMBANG  
Ditandatangani secara elektronik



**SUGIAT, S.Sos., M.Psi.T.**

## 2.9 Indikator Kinerja Individu (IKU)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai LPPD	Nilai LPPD Tahun n-2	Laporan Kegiatan
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP PEMDA	Nilai Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah Tahun n	LHE Implementasi SAKIP KEMENPAN RB
		Nilai SAKIP SETDA	Nilai Evaluasi SAKIP Sekretariat Daerah Tahun n	LHE Implementasi SAKIP SETDA oleh Tim APIP
		% Kesesuaian PMPRB Dengan Indeks RB	Nilai RB ----- X100% Nilai PMPRB	Hasil LKE RB Pemda oleh KEMENPAN RB
3.	Meningkatnya Kualitas Layanan	% Peningkatan IKM Pemda	IKM tahun n - IKM tahun n-1 ----- X100%IKM tahun n-1	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun n
		% Peningkatan IPP Pemda	IPP tahun n - IPP tahun n-1 -----X100% IPP tahun n-1	LHE IPP Tahun n
4.	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik	% Kesesuaian Penilaian Mandiri SPBE dengan Indeks SPBE	Nilai SPBE ----- x100% Nilai PMSPBE	Hasil LHE PMSPBE dan LHE SPBE oleh KEMENPAN RB

## 2.10 Indikator Kinerja Individu (IKI)

### 2.10.1 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

No.	Kinerja	Indikator Kinerja Individu	Formulasi	Sumber Data
1.	Terpenuhinya dokumen LPPD dan RLPPD	Presentase penyampaian dokumen LPPD dan RLPPD tepat waktu	Nilai LPPD	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
2.	Terlaksananya perumusan kebijakan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Data Kecamatan yang dinilai Kinerjanya

No.	Kinerja	Indikator Kinerja Individu	Formulasi	Sumber Data
	dan monev pelaksanaan kebijakan di rentang koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra	Persentase Kebijakan bidang Tata Pemerintahan yang ditetapkan	Jumlah Kebijakan Bid. Tapem yg ditetapkan ----- -----X 100% Jumlah Kebijakan Bid. Tapem yg diusulkan	Kebijakan bidang tata pemerintahan
		Persentase Kebijakan bidang Kesejahteraan rakyat yang ditetapkan tepat waktu	Jumlah Kebijakan Bid. Kesra yg ditetapkan ----- -----X 100% Jumlah Kebijakan Bid. Kesra yg diusulkan	Kebijakan bidang kesejahteraan rakyat
		Persentase produk hukum yang ditetapkan tepat waktu	Jumlah Produk Hukum yang ditetapkan ----- -----X 100% Jumlah Produk Hukum yang diusulkan	Produk hukum yang ditetapkan
		Jumlah Kebijakan Di Rentang Koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra Yang ditetapkan	Kebijakan Yang disusun pada rentang koordinasi Asisten Pemerintahan Dan Kesra	Rumusan Kebijakan
		Jumlah Monev Kebijakan Di Rentang Koordinasi Asisten Pemerintahan Dan Kesra	Monitoring dan evaluasi kebijakan pada Rentang Koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra	Monitoring dan evaluasi
3		Meningkatnya Implementasi SAKIP di Perangkat Daerah rentang koordinasi	Persentase OPD rentang koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra dengan Nilai SAKIP Minimal 80	Jumlah PD dengan nilai SAKIP Minimal 80 ----- -----X 100%

No.	Kinerja	Indikator Kinerja Individu	Formulasi	Sumber Data
	Asisten Pemerintahan dan Kesra		Jumlah PD Rentang Koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra	
4	Meningkatnya capaian kinerja aparatur pada Bagian Tapem, Kesra, Hukum	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Aparatur	$\frac{\text{Jumlah Realisasi}}{\text{Jumlah Pegawai}} \times 100\%$	LKjIP
5	Meningkatnya Implementasi RB di rentang koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra	Persentase OPD rentang koordinasi yang mengimplementasikan RB Minimal 50	$\frac{\text{Jumlah PD yang mengimplementasikan RB}}{\text{Jumlah seluruh PD Rentang Koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra}} \times 100\%$	LKE RB
6	Meningkatnya kepuasan pengguna layanan pada rentang koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra	Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum dan Penyusunan Perundang-undangan	Hasil Survey Kepuasan Layanan Bantuan Hukum dan Penyusunan Perundang-undangan	Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
		Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat	Hasil Survey Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat	Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
		Indeks Kepuasan Layanan Tata Pemerintahan	Hasil Survey Kepuasan Layanan Tata Pemerintahan	Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
7	Meningkatnya pemenuhan standar pelayanan pada rentang koordinasi dan rentang	Rata-rata nilai IPP Rentang Kendali dan Rentang Koordinasi	Nilai IPP OPD rentang Koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra	Nilai IPP Pemda

No.	Kinerja	Indikator Kinerja Individu	Formulasi	Sumber Data
	koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra			
8	Meningkatnya indicator penilaian SPBE pada rentang koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra	Presentase Tingkat Kematangan Indikator penilaian SPBE dengan kategori baik pada perangkat daerah pengampu rentang koordinasi dan rentang kendali Asisten Pemerintahan dan Kesra	Jumlah PD dengan Tingkat Kematangan Indikator SPBE baik -----X 100% Jumlah PD Rentang Koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra	LKE SPBE

### 2.10.2 Program Perekonomian dan Pembangunan

No.	Kinerja	Indikator Kinerja Individu	Formulasi	Sumber Data
1.	Terlaksananya perumusan kebijakan dan monev pelaksanaan kebijakan di Rentang Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Kebijakan bidang Administrasi Pembangunan yang ditetapkan tepat waktu	Jumlah Kebijakan Bidang Administrasi Pembangunan yang ditetapkan -----X 100% Jumlah Kebijakan Bidang Administrasi Pembangunan yang diusulkan	Kebijakan/Peraturan Perundangan bidang Administrasi Pembangunan
		Persentase Kebijakan bidang Perekonomian yang ditetapkan tepat waktu	Jumlah Kebijakan Bidang Perekonomian yang ditetapkan -----X 100% Jumlah Kebijakan Bidang Perekonomian yang diusulkan	Kebijak/Peraturan Perundangan bidang Perekonomian
		Persentase Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Hingga Selesai Ada Pemenangnya	Jumlah Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Hingga Selesai Ada Pemenangnya -----X 100% Jumlah Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik yang masuk LPSE	LPSE
2.	Meningkatnya Implementasi SAKIP di	Persentase OPD Rentang Koordinasi Asisten Perekonomian	Jumlah PD dengan nilai SAKIP minimal 80 -----X 100% Jumlah PD Rentang Koordinasi	LHE AKIP

	Perangkat Daerah Rentang Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan	dan Pembangunan dengan Nilai SAKIP Minimal 80	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
3.	Meningkatnya capaian kinerja aparatur pada Bagian Perekonomian, Bagian Administrasi Pembangunan dan Bagian Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Aparatur	Jumlah Realisasi ----- ---X 100% Jumlah Pegawai	LKjIP
4.	Meningkatnya Implementasi RB di rentang koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Persentase OPD rentang koordinasi yang mengimplementasikan RB	Jumlah PD yang mengimplementasikan RB ----- ---X 100% Jumlah seluruh PD Rentang Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan	LKE RB
5.	Meningkatnya kepuasan pengguna layanan pada rentang koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Pembangunan	Hasil Survey Kepuasan Layanan Administrasi Pembangunan	Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
		Indeks Kepuasan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Hasil Survey Kepuasan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
		Indeks Kepuasan Layanan Perekonomian	Hasil Survey Kepuasan Layanan Perekonomian	Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
6.	Meningkatnya pemenuhan standar pelayanan pada rentang koordinasi	Rata-rata nilai IPP Rentang Kendali dan Rentang Koordinasi Asisten Perekonomian	Nilai IPP OPD rentang Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Laporan IPP Pemda

	dan rentang kendali Asisten Perekonomian dan Pembangunan	dan Pembangunan		
7.	Meningkatnya indikator penilaian SPBE pada rentang koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Presentase Tingkat Kematangan Indikator penilaian SPBE dengan kategori baik pada perangkat daerah pengampu rentang koordinasi dan rentang kendali Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah PD dengan Tingkat Kematangan Indikator SPBE baik ----- ---X 100% Jumlah PD Rentang Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan	LKE SPBE

### 2.10.3 Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota

No.	Kinerja	Indikator Kinerja Individu	Formulasi	Sumber Data
1.	Terlaksananya perumusan kebijakan dan monev pelaksanaan kebijakan di rentang koordinasi Asisten Administrasi Umum	Persentase kebijakan bidang Perencanaan dan keuangan yang disusun tepat waktu	Jumlah Kebijakan Bid. Renkeu yg ditetapkan ----- ----X 100% Jumlah Kebijakan Bid. Renkeu yg diusulkan	Kebijakan Bidang Perencanaan dan Keuangan
		Persentase kebijakan bidang keorganisasian yang disusun tepat waktu	Jumlah Kebijakan Bid. Organisasi yg ditetapkan ----- -----X 100% Jumlah Kebijakan Bid. Organisasi yg diusulkan	Kebijakan Bidang Organisasi
2.	Meningkatnya Implementasi SAKIP di Perangkat Daerah	Persentase OPD dengan Nilai SAKIP Minimal 80	Jumlah PD dengan nilai SAKIP Minimal 80 ----- -----X 100% Jumlah OPD	LHE AKIP
3.	Meningkatnya Implementasi SAKIP di Perangkat Daerah rentang koordinasi Asisten	Persentase OPD rentang koordinasi Asisten administrasi umum dengan Nilai SAKIP Minimal 80	Jumlah PD dengan nilai SAKIP minimal 80 ----- ----X 100% Jumlah PD Rentang Koordinasi Asisten Administrasi Umum	LHE SAKIP Setda

	Administrasi Umum			
4.	Meningkatnya implementasi SAKIP di Setda	Persentase Peningkatan Nilai SAKIP Setda	<p>Nilai SAKIP Setda Tahun n – Nilai SAKIP Setda Tahun n-1</p> <p>-----X 100%</p> <p>Nilai SAKIP Setda Tahun n-1</p>	LHE SAKIP Setda
5.	Meningkatnya capaian kinerja aparatur pada Bagian Umum, Prokopim, Renkeu, Organisasi	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Aparatur	<p>Jumlah Realisasi -----X</p> <p>100%</p> <p>Jumlah Pegawai</p>	LKJIP
6.	Meningkatnya Implementasi RB di Kabupaten Jombang	Nilai PMPRB Pemda	Nilai PMPRB Pemda	LKE RB
		Jumlah unit kerja yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	Jumlah unit kerja yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	LKE ZI
		Persentase OPD dengan Nilai Indeks Efektivitas dan Efisiensi OPD dengan kategori minimal Baik	<p>Jumlah PD dengan Nilai Indeks Efektivitas dan Efisiensi OPD dengan kategori minimal Baik</p> <p>-----X 100%</p> <p>Jumlah Seluruh PD</p>	Anjab ABK
		Persentase OPD dengan Tingkat Kematangan Tinggi	<p>Jumlah PD dengan Tingkat Kematangan Tinggi</p> <p>-----X 100%</p> <p>Jumlah Seluruh PD</p>	Form Evaluasi Kelembagaan Permenpan RB dan Permendagri
7.	Meningkatnya Implementasi RB di Sekretariat Daerah	Nilai PMPRB Setda	Nilai PMPRB Setda	LKE RB Setda
8.	Meningkatnya Implementasi RB di rentang koordinasi Asisten Administrasi Umum dengan nilai RB minimal 50	Persentase OPD rentang koordinasi Asisten Administrasi Umum dengan nilai RB minimal 50	<p>Jumlah PD yang mengimplementasikan RB</p> <p>-----X 100%</p> <p>Jumlah Seluruh PD Rentang Koordinasi Asisten Administrasi Umum</p>	LKE RB

9.	Meningkatnya kepuasan pengguna layanan lingkup Pemda	Nilai IKM Pemda	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemda	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Pemda
10.	Meningkatnya kepuasan pengguna layanan pada rentang kendali Asisten Administrasi Umum	Nilai IKM Setda	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat atas Layanan Setda	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Setda
		Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	Hasil survey kepuasan masyarakat layanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	LH SKM Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan
		Persentase pelayanan keprotokolan dan komunikasi kepala daerah/wakil kepala daerah	Jumlah pelayanan keprotokolan dan komunikasi KDH/WKDH -----X 100% Jumlah layanan yang direncanakan	Rencana Kerja
		Indeks Kepuasan Layanan Umum	Hasil survey kepuasan masyarakat layanan Umum	LH SKM Umum
		Indeks Kepuasan Layanan Perencanaan dan Keuangan	Hasil survey kepuasan masyarakat layanan Perencanaan dan Keuangan	LH SKM Perencanaan dan Keuangan
		Indeks Kepuasan Layanan Organisasi	Hasil survey kepuasan masyarakat layanan Keorganisasian	LH SKM Organisasi
11.	Meningkatnya pemenuhan standar pelayanan lingkup Pemda	Nilai IPP Pemda	Nilai IPP Pemda	Laporan IPP Pemda
		Presentase peningkatan pemenuhan pengadaan sarpras lingkup Setda	Jumlah realisasi sarpras -----X 100% Jumlah usulan sarpras dari bagian	Laporan Renja
12.	Meningkatnya pemenuhan standar pelayanan pada rentang koordinasi dan rentang kendali Asisten Administrasi Umum	Nilai IPP Setda	Nilai IPP Setda	Laporan IPP Setda
		Rata-rata nilai IPP Rentang Kendali dan Rentang Koordinas Asisten administrasi Umum	Nilai IPP OPD rentang Koordinasi Asisten Administrasi Umum	Laporan IPP Pemda

13.	Meningkatnya Implementasi SPBE di Kabupaten Jombang	Nilai Penilaian Mandiri SPBE	Nilai Penilaian Mandiri SPBE	LKE SPBE
14.	Meningkatnya indikator penilaian SPBE pada rentang koordinasi Asisten Administrasi Umum	Presentase Tingkat Kematangangan Indikator penilaian SPBE dengan kategori baik pada perangkat daerah pengampu rentang koordinasi dan rentang kendal Asisten Pemerintahan dan Kesra	Jumlah PD dengan Tingkat Kematangan Indikato SPBE Baik ----- -----X 100% Jumlah PD pada Rentang Koordinasi Asisten Administrasi Umum	LKE SPBE

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja merupakan gambaran dari pengukuran kinerja, yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang. Cakupan pengukuran kinerja adalah penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja. Hasil pengukuran kinerja didapatkan dari suatu penilaian sistematis dan didasarkan kepada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa indikator-indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*).

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Sekretariat Daerah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan untuk membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja dari indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja yang dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan

keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, menggunakan skala pengukuran ordinal (berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2022) sebagai tabel berikut:

**KLASIFIKASI PENILAIAN DAN KATEGORI PENILAIAN KEBERHASILAN/KEGAGALAN  
PENCAPAIAN SASARAN STRATEGI DAN CAPAIAN INDIKATOR**

NO	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	>110% – 120%	Istimewa (Sangat Berhasil)
2	>90% – 110%	Baik (Berhasil)
3	>70% - 80%	Butuh Perbaikan (Cukup)
4	>50% - 70%	Kurang
5	0%-50%	Sangat Kurang

### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Organisasi merupakan tolak ukur keberhasilan suatu organisasi yang disajikan dalam bentuk persentase berdasarkan perbandingan target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi yang dihasilkan.

Capaian Kinerja Sekretariat Daerah dapat dijabarkan berdasarkan sasaran strategis yang membandingkan antara target dan realisasi tahun berjalan, antara realisasi kinerja tahun berjalan dengan dua tahun terakhir, antara realisasi kinerja tahun berjalan dengan target jangka menengah, antara realisasi kinerja tahun berjalan dengan realisasi kinerja di level internasional/internasional.

#### 3.1.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun Berjalan

Berikut adalah Capaian Kinerja Sekretariat Daerah berdasarkan sasaran strategis yang membandingkan target dengan realisasi tahun berjalan:

**Tabel 3.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun Berjalan**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,44	2,78	80,81%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Pemda	Nilai dan Predikat (A)	73,50	72,70	98,91%
		Nilai SAKIP Setda	Nilai dan Predikat (A)	81	82,10	101,36%
		Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB	%	90	N/A	N/A
3.	Meningkatnya Kualitas Layanan	Persentase Peningkatan	%	1,96	1,93	98,26%

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	Capaian (%)
		Nilai IKM Pemda				
		Persentase Peningkatan Nilai IPP Pemda	%	2,87	7,30	120%
4.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Kesesuaian Penilaian Mandiri SPBE dengan Indeks SPBE	%	96	73	76,54%
<b>Rata - rata Capaian Tahun 2023</b>						<b>95,98%</b>

Berdasarkan perhitungan kinerja sasaran diatas, diperoleh rata-rata capaian kinerja tahun 2023 sebesar 95,98% termasuk kategori Baik (Berhasil) namun lebih rendah dari tahun sebelumnya, karena bentuk formulasi indikator yang kurang tepat menyebabkan realisasi lebih rendah dari target yang telah ditetapkan. berikut adalah penjelasan tiap indikator antara lain:

1. Nilai LPPD

Penilaian LPPD dilaksanakan dua tahun sekali, Realisasi Tahun 2023 menggunakan Nilai Tahun n-2 yaitu nilai tahun 2021 yang keluar di awal tahun 2023 sebesar 2,78. Nilai LPPD mengalami penurunan karena adanya perubahan sistem penilaian yang tidak bisa diprediksi. Dengan adanya hambatan tersebut, Capaian realisasi indikatornya hanya sebesar 80,81% termasuk dalam kategori Butuh Perbaikan (Cukup).

2. Nilai SAKIP Pemda

Realisasi Nilai SAKIP Pemda 2023 adalah sebesar 72,70 dan belum memenuhi target tahunan yang ditetapkan namun mengalami peningkatan dari realisasi tahun sebelumnya. Capaian realisasi Nilai SAKIP Pemda adalah sebesar 98,91% termasuk dalam kategori Baik (Berhasil).

3. Nilai SAKIP Setda

Realisasi Nilai SAKIP Sekretariat Daerah Tahun 2023 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, karena adanya dorongan dan kerja sama yang baik dari seluruh pegawai Lingkup Sekretariat Daerah. Nilai SAKIP Setda terealisasi 82,10 dari target 81 yang telah ditetapkan. Capaian Realisasinya sebesar 101,36 % termasuk dalam kategori Baik (Berhasil).

4. Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB

PermenPAN-RB menyatakan bahwa PMPRB tidak dilaksanakan lagi, dan Nilai RB Kabupaten belum dikeluarkan, sehingga belum bisa memperhitungkan Persentase

Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB Kabupaten. Hal tersebut menyebabkan realisasi dan capaian Sekretaris Daerah pada tahun 2023 menjadi N/A.

#### 5. Persentase Peningkatan Nilai IKM Pemda

Persentase Peningkatan Nilai IKM Pemda dihitung berdasarkan perbandingan selisih antara Nilai IKM Pemda tahun n dan Nilai IKM Pemda tahun n-1 dengan nilai IKM Pemda tahun n. Nilai IKM Pemda tahun 2022 sebesar 86,71, dan Nilai IKM Pemda tahun 2023 sebesar 88,38, sehingga persentase peningkatannya diperoleh sebesar 1,93%. meskipun mengalami peningkatan Nilai IKM, namun realisasi persentase peningkatannya belum memenuhi target tahunan yang ditetapkan, sehingga capaiannya diperoleh 98,26% termasuk dalam kategori Baik (Berhasil).

#### 6. Persentase Peningkatan Nilai IPP Pemda

Persentase Peningkatan Nilai IPP Pemda dihitung berdasarkan perbandingan selisih antara Nilai IPP Pemda tahun n dan Nilai IPP Pemda tahun n-1 dengan nilai IPP Pemda tahun n. Nilai IPP Pemda berdasarkan Penilaian MenPAN-RB tahun 2022 sebesar 3,97, dan tahun 2023 sebesar 4,26, sehingga persentase peningkatannya diperoleh sebesar 7,30%. Realisasi persentase peningkatannya Melebihi target tahunan yang ditetapkan, sehingga capaiannya 120% berada di batas maksimal termasuk dalam kategori Istimewa (Sangat Berhasil).

#### 7. Persentase Kesesuaian Penilaian Mandiri SPBE dengan Indeks SPBE

Persentase Kesesuaian Penilaian Mandiri SPBE dengan Indeks SPBE Pemda dihitung berdasarkan perbandingan antara hasil Nilai Indeks SPBE dan Hasil Penilaian PMSPE. Realisasi Indeks SPBE tahun 2023 sebesar 3,49 berdasarkan LHE MenPAN-RB dan hasil Penilaian Mandiri SPBE adalah 4,75, berdasarkan realisasi tersebut diperoleh persentase Kesesuaian Penilaian Mandiri SPBE dengan Indeks SPBE sebesar 73% lebih rendah daripada target yang ditentukan, sehingga capaian kinerjanya hanya 76,54% termasuk dalam kategori Butuh Perbaikan (Cukup). meskipun belum memenuhi target yang ditetapkan, Indeks SPBE Pemda sudah termasuk kategori baik secara nasional dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Berikut adalah Capaian Kinerja Sekretariat Daerah berdasarkan Program yang membandingkan target dengan realisasi tahun berjalan:

##### a. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

NO.	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Terpenuhinya dokumen LPPD dan RLPPD	Persentase penyampaian dokumen LPPD dan RLPPD tepat waktu	100%	100%	100%
2	Terlaksananya perumusan kebijakan dan monev pelaksanaan kebijakan di rentang koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	70	66.83	95%
		Persentase kebijakan bidang tata pemerintahan yang ditetapkan	100%	100%	100%
		Persentase kebijakan	100%	100%	100%

NO.	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
		bidang kesejahteraan rakyat yang ditetapkan tepat waktu			
		Persentase produk hukum yang ditetapkan tepat waktu	100%	100%	100%
		Jumlah kebijakan di rentang koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra yang ditetapkan	11	11	100%
		Jumlah monev kebijakan di rentang koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra	11	11	100%
3	Meningkatnya Implementasi SAKIP di Perangkat Daerah rentang koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra	Persentase OPD rentang koordinasi dengan Nilai SAKIP Minimal 80	14%	25,71%	120%
4	Meningkatnya capaian kinerja aparatur pada Bagian Tapem, Kesra, Hukum	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Aparatur	100%	100%	100%
5	Meningkatnya Implementasi RB di rentang koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra	Persentase OPD rentang koordinasi yang mengimplementasikan RB	50%	100%	120%
6	Meningkatnya kepuasan pengguna layanan pada rentang koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra	Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum dan Penyusunan Perundang - undangan	93,88	88,59	94%
		Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat	85,97	81,48	108.14%
		Indeks Kepuasan Layanan Tata Pemerintahan	80,03	88,59	111%
7	Meningkatnya pemenuhan standar pelayanan pada rentang koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra	Rata-rata nilai IPP rentang kendali dan rentang koordinasi	3.21	3,339	104%
8	Meningkatnya tingkat kematangan indikator SPBE pada rentang koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra	Persentase tingkat kematangan indikator penilaian SPBE dengan kategori baik pada perangkat daerah pengampu rentang koordinasi dan rentang kendali Asisten Pemerintahan dan Kesra	56%	97,14%	120%
Rata-rata					103,93%

Rata-rata capaian kinerja Program Pemerintahan, Kesra, dan Hukum mencapai 103,93% dalam kategori Baik (Berhasil). Terdapat beberapa indikator yang melebihi target kinerja yang ditetapkan karena adanya peningkatan nilai SAKIP, nilai RB, dan

nilai SPBE di Rentang Koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang. Adapun beberapa indikator yang belum bisa maksimal karena beberapa hal diantaranya:

- Pada Bagian Tata Pemerintah, Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan belum terpenuhi namun capaiannya masih dalam kategori Baik (Berhasil)
- Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat, anggaran terkait hibah tidak terserap maksimal karena penerimaan bantuan hibah tidak bisa melengkapi persyaratan administrasi yang ditentukan sehingga tidak bisa direalisasikan
- Pada Bagian Hukum, Perkada harus melalui harmonisasi di Kanwil Kemenkumham sehingga prosesnya menjadi lama dan bantuan hukum tidak bisa diprediksi.

#### **b. Program Perekonomian dan Pembangunan**

<b>NO.</b>	<b>KINERJA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN (%)</b>
1.	Terlaksananya perumusan kebijakan dan monev pelaksanaan kebijakan di rentang koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Persentase kebijakan bidang administrasi pembangunan yang ditetapkan tepat waktu	100%	100%	100%
		Persentase kebijakan bidang administrasi perekonomian yang ditetapkan tepat waktu	100%	100%	100%
		Persentase Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Hingga Selesai Ada Pemenangannya	100%	93,06%	93%
2.	Meningkatnya Implementasi SAKIP di Perangkat Daerah rentang koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Persentase OPD rentang koordinasi dengan Nilai SAKIP Minimal 80	34%	75%	120%
3.	Meningkatnya capaian kinerja aparatur pada Bagian Perekonomian, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian PBJ	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Aparatur	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya Implementasi RB di rentang koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Persentase OPD rentang koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan dengan Nilai RB minimal 50	67%	100%	120%
5.	Meningkatnya kepuasan pengguna layanan pada rentang koordinasi dan rentang kendali Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Pembangunan	84,47	85,5	101%
		Indeks Kepuasan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	89,45	98,99	111%
		Indeks Kepuasan Layanan Perekonomian	86,88	82,46	95%
6.	Meningkatnya pemenuhan standar pelayanan pada rentang koordinasi dan rentang kendali Asisten Perekonomian dan	Rata-rata nilai IPP Rentang kendali dan rentang koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan	3.33	3.783	114%

NO.	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
	Pembangunan				
7.	Meningkatnya indikator penilaian SPBE pada rentang koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Tingkat kematangan indikator penilaian SPBE dengan indikator baik pada perangkat daerah pengampu rentang koordinasi dan rentang kendali Asisten Perekonomian dan Pembangunan	60%	100	120
Rata-Rata					106,72%

Rata-rata capaian kinerja Program Perekonomian dan Peembangunann mencapai 106,72% dalam kategori Baik (Berhasil). Terdapat beberapa indikator yang melebihi target kinerja yang ditetapkan karena adanya peningkatan nilai SAKIP, nilai RB, dan nilai SPBE di Rentang Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang. Adapun beberapa indikator yang belum bisa maksimal karena beberapa hal diantaranya:

- Pada Bagian Perekonomian, terdapat kendala pada perubahan regulasi penggunaan dan tata Kelola terutama anggaran yang bersumber dari DBHCHT, serta inflasi yang cenderung meningkat
- Pada Bagian Administrasi Pembangunan, terdapat kendala pada peraturan yang bersifat dinamis dan tidak sinkron dengan peraturan lainnya dan kurangnya pemahaman SKPD terhadap aturan
- Pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, terdapat kendala terkait dengan jumlah tender/seleksi, yang mana di akhir tahun harus terdapat tender dini, namun tidak ada tender dini dari perangkat daerah.

### c. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

NO.	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Terlaksananya perumusan kebijakan dan monev pelaksanaan kebijakan di rentang koordinasi Asisten Administrasi Umum	Persentase kebijakan bidang perencanaan dan keuangan yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%
		Persentase kebijakan bidang keorganisasian yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya Implementasi SAKIP di Perangkat Daerah	Persentase OPD dengan Nilai SAKIP Minimal 80	47%	45,28%	96%
3.	Meningkatnya Implementasi SAKIP di Perangkat Daerah rentang koordinasi Asisten Administrasi Umum	Persentase OPD rentang koordinasi Asisten administrasi Umum dengan Nilai SAKIP Minimal 80	100%	100%	100%

<b>NO.</b>	<b>KINERJA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN (%)</b>
3.	Meningkatnya implementasi SAKIP di Setda	Persentase peningkatan nilai SAKIP Setda	0.7%	2,5%	120%
4.	Meningkatnya capaian kinerja aparatur pada Bagian Umum, Prokopim, Renkeu, Organisasi	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Aparatur	100%	100%	100%
5.	Meningkatnya Implementasi RB di Kabupaten Jombang	Nilai PMPRB Pemda	69,20	N/A	N/A
		Jumlah unit kerja yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	3 unit kerja	2	67
		Persentase OPD dengan Nilai Indeks Efektivitas dan Efisiensi OPD dengan kategori minimal Baik	100%	100%	100%
		Persentase OPD dengan Tingkat Kematangan Tinggi	100%	100%	100%
6.	Meningkatnya Implementasi RB di Sekretariat Daerah	Nilai PMPRB Setda	70	82,5	118%
7.	Meningkatnya Implementasi RB di rentang koordinasi Asisten Administrasi Umum	Persentase OPD rentang koordinasi yang mengimplementasikan RB	80%	100%	120%
8.	Meningkatnya kepuasan pengguna layanan lingkup Pemda	Nilai IKM Pemda	88.41	88.38	99,97%
9.	Meningkatnya kepuasan pengguna layanan pada rentang koordinasi dan rentang kendali Asisten Administrasi Umum	Nilai IKM Setda	87,35	88.72	102%
		Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	85,83	89,55	104%
		Persentase pelayanan keprotokolan dan komunikasi Kepala Daerah/Wakil Kpala Daerah	100%	100%	100%
		Indeks Kepuasan Layanan Umum	90,79	90,31	99%
		Indeks Kepuasan Layanan Perencanaan dan Keuangan	90	89,43	99%
		Indeks Kepuasan Layanan Organisasi	84,58	92,28	109%
10.	Meningkatnya pemenuhan standar pelayanan lingkup Pemda	Nilai IPP Pemda	3,734	4,26	114%
		Persentase peningkatan pemenuhan pengadaan Sarpras lingkup Setda	5%	29,5%	120%
11.	Meningkatnya pemenuhan	Nilai IPP Setda	3.95	4,04	102%

NO.	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
	standar pelayanan pada rentang koordinasi dan rentang kendali Asisten Administrasi Umum	Rata-rata nilai IPP Rentang Kendali dan Rentang Koordinasi Asisten Administrasi Umum	3.25	3,504	108%
12.	Meningkatnya Implementasi SPBE di Kabupaten Jombang	Nilai Penilaian Mandiri SPBE	4.35	4.75	109%
13.	Meningkatnya indikator penilaian SPBE pada rentang koordinasi Asisten Administrasi Umum	Persentase Tingkat Kematangan Indikator penilaian SPBE dengan kategori baik pada perangkat daerah pengampu rentang koordinasi dan rentang kendali Asisten Administrasi Umum	48%	100%	120%
Rata-rata					104,70%

Rata-rata capaian kinerja Program Perekonomian dan Peembangunann mencapai 106,72% dalam kategori Baik (Berhasil). Terdapat beberapa indikator yang melebihi target kinerja yang ditetapkan karena adanya peningkatan nilai SAKIP, nilai RB, dan nilai SPBE di Rentang Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang. Adapun beberapa indikator yang belum bisa maksimal karena beberapa hal diantaranya:

- Pada Bagian Umum, terdapat kendala terkait kegiatan rutin yang menjadi kebijakan baru
- Pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, terdapat kendala kurangnya kesempatan peningkatan kompetensi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi
- Pada Bagian Perencanaan dan Keuangan, terdapat adanya kendala adanya mutasi dan pension PNS, serta pergantian KDH/WKDH.

### 3.1.2 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan 2 (dua) tahun terakhir

Berikut adalah Capaian Kinerja Sekretariat Daerah berdasarkan sasaran strategis yang membandingkan realisasi kinerja tahun berjalan dengan dua tahun terakhir:

**Tabel 3. 2 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan 2 (dua) tahun terakhir**

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI		
					2021	2022	2023
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,44	3,44	3,44	2,78

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI		
					2021	2022	2023
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Pemda	Nilai dan Predikat (A)	73,50	71,28	72,14	72,70
		Nilai SAKIP Setda	Nilai dan Predikat (A)	81	80,43	80,06	82,10
		Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB	%	90	80,27	89	N/A
3.	Meningkatnya Kualitas Layanan	Persentase Peningkatan Nilai IKM Pemda	%	1,96	1,56	2,65	1,93
		Persentase Peningkatan Nilai IPP Pemda	%	2,87	1,56	4,01	7,30
4.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Kesesuaian Penilaian Mandiri SPBE dengan Indeks SPBE	%	96	51,75	68,84	73

Berdasarkan tabel perbandingan sasaran strategis antara realisasi tahun 2023 dengan 2 tahun terakhir diatas bisa di jelaskan pada masing-masing indikator bahwa:

a. Nilai LPPD

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pada tahun 2023, nilai LPPD mengalami penurunan menjadi 2,78 dari target yang ditetapkan sebesar 3,44. Hal ini menunjukkan adanya penurunan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. adanya perubahan sistem penilaian, menyebabkan Indikator Nilai LPPD menurun di tahun 2023. Indikator ini tidak muncul kembali pada Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah tahun 2024 karena adanya perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah.

b. Nilai SAKIP Pemda

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa realisasi nilai indikator kinerja ini cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 73,50. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya usaha atau perbaikan dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang.

c. Nilai SAKIP Setda

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa realisasi nilai indikator kinerja ini mengalami sedikit fluktuasi pada tahun 2021 ke tahun 2022 karena tingkat keterlibatan aparatur Lingkup Sekretariat Daerah dalam mengimplementasikan SAKIP relatif kecil, tetapi secara keseluruhan cenderung meningkat dari tahun 2022 ke tahun 2023 karena adanya evaluasi atas penurunan kinerja tahun sebelumnya sehingga akan terus dijadikan sebagai pembelajaran untuk meningkatkan implementasi SAKIP Sekretariat Daerah. Meskipun peningkatan tidak signifikan, namun masih mencapai atau melampaui target yang ditetapkan yaitu 81 pada tahun 2023.

d. Persentase kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB

Berdasarkan data tabel tersebut, terlihat bahwa pada tahun 2021, persentase kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB masih di bawah target yang ditetapkan, yaitu hanya terealisasi 80,27% dari 90%. Namun, terjadi peningkatan signifikan pada tahun 2022, di mana persentase kesesuaian mencapai 89%. Namun data untuk tahun 2023 tidak tersedia karena Indeks RB belum keluar dan tidak dilaksanakan lagi PMPRB, sehingga tidak dapat dievaluasi. Namun, peningkatan dari 2021 ke 2022 menunjukkan bahwa langkah-langkah atau perubahan yang diimplementasikan pada tahun sebelumnya mungkin telah memberikan hasil yang positif dalam meningkatkan kesesuaian penilaian mandiri dengan indeks reformasi birokrasi.

e. Persentase Peningkatan nilai IKM Pemda

Berdasarkan data tabel tersebut, terlihat bahwa pada tahun 2021 ke tahun 2022 nilai IKM Pemerintah Daerah mengalami kenaikan yang sangat signifikan, sehingga diperoleh persentase peningkatan yang cukup besar, dan dari tahun 2022 ke tahun 2023 nilai IKM Pemerintah Daerah juga mengalami kenaikan dan diberikan predikat “SANGAT BERKUALITAS”, namun kenaikannya lebih kecil dari tahun sebelumnya sehingga ketika dihitung persentase kenaikannya, mengalami penurunan dan belum sesuai target yang ditetapkan. Penurunan tersebut disebabkan karena pada tahun 2023 terdapat penambahan fitur baru yaitu survei persepsi anti korupsi, sehingga jumlah responden mengalami penurunan akibat terlalu banyak isian survey. Peningkatan nilai IKM Pemerintah Daerah Diharapkan pelayanan di Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang semakin meningkat dan lebih baik untuk tahun-tahun sebelumnya.

f. Persentase Peningkatan nilai IPP Pemda

Berdasarkan tabel data tersebut, terlihat bahwa terjadi peningkatan yang signifikan pada nilai IPP Persentase Peningkatan nilai IPP Pemda dari tahun ke tahun. Realisasi tahun 2021 sebesar 1,56% berada di bawah target, tetapi terjadi peningkatan yang cukup besar pada tahun 2022 sebesar 4,01%, dan peningkatan yang lebih signifikan lagi pada tahun 2023 sebesar

7,30%. IPP merupakan instrumen penting untuk memberikan gambaran kemajuan. Peningkatan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya karena adanya perbaikan dalam sistem layanan publik, peningkatan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

g. Persentase Kesesuaian Penilaian Mandiri SPBE dengan Indeks SPBE

Berdasarkan tabel data tersebut, terlihat bahwa terjadi peningkatan dalam persentase kesesuaian penilaian mandiri SPBE dari tahun ke tahun. Meskipun masih di bawah target yang ditetapkan sebesar 96%, realisasi pada tahun 2022 sebesar 68,84% dan 2023 sebesar 73% menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dari tahun 2021 51,75%. Peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun disebabkan karena adanya perbaikan dalam infrastruktur teknologi informasi, peningkatan keterampilan pegawai pemerintah dalam menggunakan sistem berbasis elektronik, dan perbaikan dalam proses penilaian mandiri sistem pemerintah berbasis elektronik itu sendiri. Perlu adanya penyesuaian target yang ditetapkan.

**1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**

NO.	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		
				2021	2022	2023
1.	Terpenuhinya dokumen LPPD dan RLPPD	Persentase penyampaian dokumen LPPD dan RLPPD tepat waktu	100%	100%	100%	100%
2.	Terlaksananya perumusan kebijakan dan monev pelaksanaan kebijakan di rentang koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	70	68,50	66,49	66.83
		Persentase kebijakan bidang tata pemerintahan yang ditetapkan	100%	100%	100%	100%
		Persentase kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditetapkan tepat waktu	100%	100%	100%	100%
		Persentase produk hukum yang ditetapkan tepat waktu	100%	127%	139%	100%
		Jumlah kebijakan di rentang koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra yang ditetapkan	11	N/A	11	11
		Jumlah monev kebijakan di rentang koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra	11	N/A	11	11
3.	Meningkatnya Implementasi	Persentase OPD rentang koordinasi	14%	N/A	14,28%	25,71%

NO.	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		
				2021	2022	2023
	SAKIP di Perangkat Daerah rentang koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra	dengan Nilai SAKIP Minimal 80				
4.	Meningkatnya capaian kinerja aparatur pada Bagian Tapem, Kesra, Hukum	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Aparatur	100%	N/A	100%	100%
5.	Meningkatnya Implementasi RB di rentang koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra	Persentase OPD rentang koordinasi yang mengimplementasikan RB	50%	N/A	100%	100%
6.	Meningkatnya kepuasan pengguna layanan pada rentang koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra	Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum dan Penyusunan Perundang - undangan	93,88	86	93,88	88,59
		Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat	85,97	79,5	85,97	81,48
		Indeks Kepuasan Layanan Tata Pemerintahan	80,03	90,17	80,03	88,59
7.	Meningkatnya pemenuhan standar pelayanan pada rentang koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra	Rata-rata nilai IPP rentang kendali dan rentang koordinasi	3.21	N/A	4,4	3,339
8.	Meningkatnya tingkat kematangan indikator SPBE pada rentang koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra	Persentase tingkat kematangan indikator penilaian SPBE dengan kategori baik pada perangkat daerah pengampu rentang koordinasi dan rentang kendali Asisten Pemerintahan dan Kesra	56%	N/A	0%	97,14%

## 2. Program Perekonomian dan Pembangunan

NO.	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		
				2021	2022	2023
1.	Terlaksananya perumusan kebijakan dan monev pelaksanaan kebijakan di rentang koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Persentase kebijakan bidang administrasi pembangunan yang ditetapkan tepat waktu	100%	N/A	100%	100%
		Persentase kebijakan bidang administrasi perekonomian yang ditetapkan tepat waktu	100%	109	100%	100%
		Persentase Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Hingga Selesai Ada Pemenangnya	100%	103%	105%	93,06%
2.	Meningkatnya Implementasi SAKIP di Perangkat Daerah rentang koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Persentase OPD rentang koordinasi dengan Nilai SAKIP Minimal 80	34%	N/A	33,75%	75%
3.	Meningkatnya capaian kinerja aparatur pada Bagian Perekonomian, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian PBJ	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Aparatur	100%	N/A	99,52%	100%
4.	Meningkatnya Implementasi RB di rentang koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Persentase OPD rentang koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan dengan Nilai RB minimal 50	67%	N/A	100%	100%
5.	Meningkatnya kepuasan pengguna layanan pada rentang koordinasi dan rentang kendali Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Pembangunan	84,47	77,78	84,47	85,5
		Indeks Kepuasan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	89,45	84,39	89,45	98,99
		Indeks Kepuasan Layanan Perekonomian	86,88	79	86,88	82,46

NO.	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		
				2021	2022	2023
6.	Meningkatnya pemenuhan standar pelayanan pada rentang koordinasi dan rentang kendali Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Rata-rata nilai IPP Rentang kendali dan rentang koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan	3.33	N/A	3,4	3.783
7.	Meningkatnya indikator penilaian SPBE pada rentang koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Tingkat kematangan indikator penilaian SPBE dengan indikator baik pada perangkat daerah pengampu rentang koordinasi dan rentang kendali Asisten Perekonomian dan Pembangunan	60%	N/A	0%	100

### 3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota

NO.	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		
				2021	2022	2023
1.	Terlaksananya perumusan kebijakan dan monev pelaksanaan kebijakan di rentang koordinasi Asisten Administrasi Umum	Persentase kebijakan bidang perencanaan dan keuangan yang disusun tepat waktu	100%	N/A	50%	100%
		Persentase kebijakan bidang keorganisasian yang disusun tepat waktu	100%	N/A	100%	100%
2.	Meningkatnya Implementasi SAKIP di Perangkat Daerah	Persentase OPD dengan Nilai SAKIP Minimal 80	47%	27%	40%	45,28%
3.	Meningkatnya Implementasi SAKIP di Perangkat Daerah rentang koordinasi Asisten Administrasi Umum	Persentase OPD rentang koordinasi Asisten administrasi Umum dengan Nilai SAKIP Minimal 80	100%	N/A	100	100%
3.	Meningkatnya implementasi SAKIP di Setda	Persentase peningkatan nilai SAKIP Setda	0.7%	0,5%	0%	2,5%

NO.	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		
				2021	2022	2023
4.	Meningkatnya capaian kinerja aparatur pada Bagian Umum, Prokopim, Renkeu, Organisasi	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Aparatur	100%	102,92%	110,1%	100%
5.	Meningkatnya Implementasi RB di Kabupaten Jombang	Nilai PMPRB Pemda	69,20	77,1	69	N/A
		Jumlah unit kerja yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	3 unit kerja	1	1	2
		Persentase OPD dengan Nilai Indeks Efektivitas dan Efisiensi OPD dengan kategori minimal Baik	100%	100%	100%	100%
		Persentase OPD dengan Tingkat Kematangan Tinggi	100%	72,58%	100%	100%
6.	Meningkatnya Implementasi RB di Sekretariat Daerah	Nilai PMPRB Setda	70	30,81	40,47	82,5
7.	Meningkatnya Implementasi RB di rentang koordinasi Asisten Administrasi Umum	Persentase OPD rentang koordinasi yang mengimplementasikan RB	80%	N/A	100%	100%
8.	Meningkatnya kepuasan pengguna layanan lingkup Pemda	Nilai IKM Pemda	88.41	84,47	86,71	88.38
9.	Meningkatnya kepuasan pengguna layanan pada rentang koordinasi dan rentang kendali Asisten Administrasi Umum	Nilai IKM Setda	87,35	83,39	87,31	88.72
		Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	85,83	85,65	85	89,55
		Persentase pelayanan keprotokolan dan komunikasi Kepala Daerah/Wakil Kpala Daerah	100%	106%	95%	100%
		Indeks Kepuasan Layanan Umum	90,79	90,26	90,75	90,31
		Indeks Kepuasan Layanan Perencanaan dan Keuangan	90	84,43	89,96	89,43
		Indeks Kepuasan Layanan Organisasi	84,58	N/A	83,83	92,28
10.	Meningkatnya	Nilai IPP Pemda	3,734	3,33	3,63	4,26

NO.	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI		
				2021	2022	2023
	pemenuhan standar pelayanan lingkup Pemda	Persentase peningkatan pemenuhan pengadaan Sarpras lingkup Setda	5%	N/A	33,33%	29,5%
11.	Meningkatnya pemenuhan standar pelayanan pada rentang koordinasi dan rentang kendali Asisten Administrasi Umum	Nilai IPP Setda	3.95	3,33	3,91	4,04
		Rata-rata nilai IPP Rentang Kendali dan Rentang Koordinasi Asisten Administrasi Umum	3.25	N/A	3,07	3,504
12.	Meningkatnya Implementasi SPBE di Kabupaten Jombang	Nilai Penilaian Mandiri SPBE	4.35	N/A	4,35	4.75
13.	Meningkatnya indikator penilaian SPBE pada rentang koordinasi Asisten Administrasi Umum	Persentase Tingkat Kematangan Indikator penilaian SPBE dengan kategori baik pada perangkat daerah pengampu rentang koordinasi dan rentang kendali Asisten Administrasi Umum	48%	N/A	48%	100%

### 3.1.3 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah

Berikut adalah Capaian Kinerja Sekretariat Daerah berdasarkan sasaran strategis yang membandingkan realisasi kinerja tahun berjalan dengan target jangka menengah:

**Tabel 3. 3 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target Akhir RPJMD/ Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan (%)
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,01	2,78	80,81%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP Pemda	Nilai dan Predikat (A)	82	72,70	88,66%

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target Akhir RPJMD/ Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan (%)
	Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Setda	Nilai dan Predikat (A)	84	82,10	97,74%
		Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB	%	98,70	N/A	N/A
3.	Meningkatnya Kualitas Layanan	Persentase Peningkatan Nilai IKM Pemda	%	1,89	1,93	102,12%
		Persentase Peningkatan Nilai IPP Pemda	%	2,87	7,30	254,36%
4.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Kesesuaian Penilaian Mandiri SPBE dengan Indeks SPBE	%	96	73	76,04%

Penjelasan Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah antara lain:

- a. Target akhir yang ditetapkan sebesar 3,01 untuk indikator kinerja Nilai LPPD dalam RPJMD/Renstra. Namun, realisasi saat ini adalah 2,78, yang mengindikasikan bahwa kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah masih di bawah target yang ditetapkan. tingkat kemajuan mencapai sekitar 80,81%, yang mungkin menggambarkan progres yang telah dicapai dalam mencapai target akhir renstra tersebut.
- b. Indikator nilai SAKIP Pemerintah Daerah belum melebihi target akhir RPJMD/Renstra yang telah ditentukan, sehingga tingkat kemajuannya hanya mencapai 88,66%, meskipun nilai SAKIP Pemerintah Daerah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
- c. Indikator nilai SAKIP Sekretariat Daerah belum melebihi target akhir RPJMD/Renstra yang telah ditentukan, sehingga tingkat kemajuannya hanya mencapai 97,74%, diharapkan tahun berikutnya dapat meningkatkan implementasi SAKIP untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi.
- d. Target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD/Renstra untuk indikator persentase kesesuaian PMPRB dengan indeks RB adalah sebesar 98,70%, namun belum ada

realisasi karena PMPRB sudah tidak dilaksanakan dan nilai RB masih menunggu hasil evaluasi oleh MenPAN-RB.

- e. Target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD/Renstra untuk indikator Persentase Peningkatan Nilai IKM Pemerintah Daerah adalah sebesar 1,89%, dan realisasinya mencapai 1,93% melebihi target yang ditetapkan, sehingga diperoleh tingkat kemajuan sebesar 102,12%. hal tersebut mengindikasikan bahwa kualitas layanan pemerintah daerah telah berhasil ditingkatkan dan kepuasan masyarakat meningkat sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.
- f. Target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD/Renstra untuk indikator Persentase Peningkatan Nilai IPP Pemerintah Daerah adalah sebesar 2,87%, dan realisasinya mencapai 7,30% yang secara signifikan melebihi target yang ditetapkan, sehingga tingkat kemajuannya mencapai 254,36%. Hal ini menunjukkan bahwa program-program dan kebijakan yang telah diimplementasikan, berhasil meningkatkan kualitas layanan pemerintah daerah dalam jumlah yang cukup signifikan. Pencapaian ini menunjukkan komitmen dan keberhasilan pemerintah daerah dalam memperbaiki pelayanan publik kepada masyarakat.
- g. Target akhir yang ditetapkan dalam RPJMD/Renstra untuk indikator Persentase Kesesuaian Penilaian Mandiri SPBE dengan Indeks SPBE adalah sebesar 96%, dan realisasinya hanya mencapai 73% jauh dibawah target, sehingga tingkat kemajuannya hanya 76,04%. oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan tersebut.

### 1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target Akhir RPJMD/Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan (%)
1.	Terpenuhinya dokumen LPPD dan RLPPD	Persentase penyampaian dokumen LPPD dan RLPPD tepat waktu	Persen	100%	100%	100%
2.	Terlaksananya perumusan kebijakan dan monev pelaksanaan kebijakan di rentang koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Nilai	70	66.83	95,47%
		Persentase kebijakan bidang tata pemerintahan yang ditetapkan	Persen	100%	100%	100%
		Persentase kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditetapkan tepat waktu	Persen	100%	100%	100%
		Persentase produk hukum yang ditetapkan tepat waktu	Persen	100%	100%	100%
		Jumlah kebijakan di rentang koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra yang ditetapkan	Angka	N/A	11	N/A
		Jumlah monev	Angka	N/A	11	N/A

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target Akhir RPJMD/ Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan (%)
		kebijakan di rentang koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra				
3.	Meningkatnya Implementasi SAKIP di Perangkat Daerah rentang koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra	Persentase OPD rentang koordinasi dengan Nilai SAKIP Minimal 80	Persen	N/A	25,71%	N/A
4.	Meningkatnya capaian kinerja aparatur pada Bagian Tapem, Kesra, Hukum	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Aparatur	Persen	100%	100%	100%
5.	Meningkatnya Implementasi RB di rentang koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra	Persentase OPD rentang koordinasi yang mengimplementasikan RB	Persen	N/A	100%	N/A
6.	Meningkatnya kepuasan pengguna layanan pada rentang koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra	Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum dan Penyusunan Perundang - undangan	Angka	88	88,59	100,6%
		Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat	Angka	83	81,48	98,16%
		Indeks Kepuasan Layanan Tata Pemerintahan	Angka	79,82	88,59	110%
7.	Meningkatnya pemenuhan standar pelayanan pada rentang koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra	Rata-rata nilai IPP rentang kendali dan rentang koordinasi	Nilai	N/A	3,339	N/A
8.	Meningkatnya tingkat kematangan indikator SPBE pada rentang koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra	Persentase tingkat kematangan indikator penilaian SPBE dengan kategori baik pada perangkat daerah pengampu rentang koordinasi dan rentang kendali Asisten Pemerintahan dan Kesra	Persen	N/A	97,14%	N/A

## 2. Program Perekonomian dan Pembangunan

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target Akhir RPJMD/ Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan (%)
1.	Terlaksananya perumusan kebijakan dan monev pelaksanaan kebijakan di rentang koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Persentase kebijakan bidang administrasi pembangunan yang ditetapkan tepat waktu	Persen	100%	100%	100%
		Persentase kebijakan bidang administrasi perekonomian yang ditetapkan tepat waktu	Persen	100%	100%	100%
		Persentase Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Hingga Selesai Ada Pemenangnya	Persen	95%	93,06%	97,95%
2.	Meningkatnya Implementasi SAKIP di Perangkat Daerah rentang koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Persentase OPD rentang koordinasi dengan Nilai SAKIP Minimal 80	Persen	N/A	75%	N/A
3.	Meningkatnya capaian kinerja aparatur pada Bagian Perekonomian, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian PBJ	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Aparatur	Persen	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya Implementasi RB di rentang koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Persentase OPD rentang koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan dengan Nilai RB minimal 50	Persen	N/A	100%	N/A
5.	Meningkatnya kepuasan pengguna layanan pada rentang koordinasi dan rentang kendali Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Pembangunan	Angka	100	85,5	85,5%
		Indeks Kepuasan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	Angka	88	98,99	112%
		Indeks Kepuasan Layanan Perekonomian	Angka	83	82,46	99,34%

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target Akhir RPJMD/ Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan (%)
6.	Meningkatnya pemenuhan standar pelayanan pada rentang koordinasi dan rentang kendali Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Rata-rata nilai IPP Rentang kendali dan rentang koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Nilai	N/A	3.783	N/A
7.	Meningkatnya indikator penilaian SPBE pada rentang koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Tingkat kematangan indikator penilaian SPBE dengan indikator baik pada perangkat daerah pengampu rentang koordinasi dan rentang kendali Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Persen	N/A	100	N/A

### 3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target Akhir RPJMD/ Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan (%)
1.	Terlaksananya perumusan kebijakan dan monev pelaksanaan kebijakan di rentang koordinasi Asisten Administrasi Umum	Persentase kebijakan bidang perencanaan dan keuangan yang disusun tepat waktu	Persen	N/A	100%	N/A
		Persentase kebijakan bidang keorganisasian yang disusun tepat waktu	Persen	N/A	100%	N/A
2.	Meningkatnya Implementasi SAKIP di Perangkat Daerah	Persentase OPD dengan Nilai SAKIP Minimal 80	Persen	25%	45,28%	181%
3.	Meningkatnya Implementasi SAKIP di Perangkat Daerah rentang koordinasi Asisten Administrasi Umum	Persentase OPD rentang koordinasi Asisten administrasi Umum dengan Nilai SAKIP Minimal 80	Persen	N/A	100%	N/A
3.	Meningkatnya implementasi SAKIP di Setda	Persentase peningkatan nilai SAKIP Setda	Persen	0,6%	2,5%	416%

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target Akhir RPJMD/ Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan (%)
4.	Meningkatnya capaian kinerja aparatur pada Bagian Umum, Prokopim, Renkeu, Organisasi	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Aparatur	Persen	100%	100%	100%
5.	Meningkatnya Implementasi RB di Kabupaten Jombang	Nilai PMPRB Pemda	Nilai	77	N/A	N/A
		Jumlah unit kerja yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	unit kerja	3	2	66,67%
		Persentase OPD dengan Nilai Indeks Efektivitas dan Efisiensi OPD dengan kategori minimal Baik	Persen	95%	100%	105%
		Persentase OPD dengan Tingkat Kematangan Tinggi	Persen	95%	100%	105%
6.	Meningkatnya Implementasi RB di Sekretariat Daerah	Nilai PMPRB Setda	Nilai	35	82,5	235%
7.	Meningkatnya Implementasi RB di rentang koordinasi Asisten Administrasi Umum	Persentase OPD rentang koordinasi yang mengimplementasikan RB	Persen	N/A	100%	N/A
8.	Meningkatnya kepuasan pengguna layanan lingkup Pemda	Nilai IKM Pemda	Nilai	90,08	88,38	98,11%
9.	Meningkatnya kepuasan pengguna layanan pada rentang koordinasi dan rentang kendali Asisten Administrasi Umum	Nilai IKM Setda	Nilai	85	88,72	104,3%
		Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	Angka	85	89,55	105,3%
		Persentase pelayanan keprotokolan dan komunikasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Persen	100%	100%	100%
		Indeks Kepuasan Layanan Umum	Angka	85	90,31	106,2%
		Indeks Kepuasan Layanan Perencanaan dan Keuangan	Angka	84,43	89,43	118,6%

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Target Akhir RPJMD/ Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan (%)
		Indeks Kepuasan Layanan Organisasi	Angka	N/A	92,28	N/A
10.	Meningkatnya pemenuhan standar pelayanan lingkup Pemda	Nilai IPP Pemda	Nilai	3,59	4,26	
		Persentase peningkatan pemenuhan pengadaan Sarpras lingkup Setda	Persen	N/A	29,5%	N/A
11.	Meningkatnya pemenuhan standar pelayanan pada rentang koordinasi dan rentang kendali Asisten Administrasi Umum	Nilai IPP Setda	Nilai	4,02	4,04	100,4%
		Rata-rata nilai IPP Rentang Kendali dan Rentang Koordinasi Asisten Administrasi Umum	Nilai	N/A	3,504	N/A
12.	Meningkatnya Implementasi SPBE di Kabupaten Jombang	Nilai Penilaian Mandiri SPBE	Nilai	3,75	4,75	126%
13.	Meningkatnya indikator penilaian SPBE pada rentang koordinasi Asisten Administrasi Umum	Persentase Tingkat Kematangan Indikator penilaian SPBE dengan kategori baik pada perangkat daerah pengampu rentang koordinasi dan rentang kendali Asisten Administrasi Umum	Persen	N/A	100%	N/A

### 3.1.4 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja di level nasional/provinsi

Berikut adalah Capaian Kinerja Sekretariat Daerah berdasarkan sasaran strategis yang membandingkan realisasi kinerja tahun berjalan dengan realisasi kinerja di level provinsi/nasional/provinsi:

**Tabel 3. 4 Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi kinerja di level nasional/provinsi**

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Realisasi	Realisasi Nasional/ Provinsi
1.	Meningkatnya akuntabilitas	Nilai SAKIP Pemda	72,70	83,86

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Realisasi	Realisasi Nasional/ Provinsi
	kinerja pemerintah daerah	Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB	N/A	N/A
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan nilai IKM Pemda	1,93%	N/A
		Persentase Peningkatan nilai IPP Pemda	7,30%	N/A
		Persentase Kesesuaian Penilaian Mandiri SPBE dengan Indeks SPBE	73%	N/A

Berdasarkan tabel di atas, yang bisa diperbandingkan dengan realisasi nasional/provinsi adalah Indikator Nilai SAKIP Kabupaten saja, sedangkan indikator lain tidak bisa diperbandingkan karena prioritas dan fokus tingkat nasional/provinsi berbeda dengan tingkat Kabupaten Jombang. Realisasi nilai SAKIP Pemda adalah sebesar 72,70, sedangkan realisasi nasional/provinsi adalah 83,86. Terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara realisasi nilai SAKIP Pemda dengan realisasi nasional/provinsi, Perbedaan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki tingkat akuntabilitas kinerja yang lebih rendah dibandingkan dengan tingkat nasional/provinsi.

### 1. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Realisasi	Realisasi Nasional/ Provinsi
1.	Terpenuhinya dokumen LPPD dan RLPPD	Persentase penyampaian dokumen LPPD dan RLPPD tepat waktu	100%	N/A
2.	Terlaksananya perumusan kebijakan dan monev pelaksanaan kebijakan di rentang koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	66.83	N/A
		Persentase kebijakan bidang tata pemerintahan yang ditetapkan	100%	N/A
		Persentase kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditetapkan tepat waktu	100%	N/A
		Persentase produk hukum yang ditetapkan tepat waktu	100%	N/A
		Jumlah kebijakan di rentang koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra	11	N/A

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Realisasi	Realisasi Nasional/ Provinsi
		yang ditetapkan		
		Jumlah monev kebijakan di rentang koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra	11	N/A
3.	Meningkatnya Implementasi SAKIP di Perangkat Daerah rentang koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra	Persentase OPD rentang koordinasi dengan Nilai SAKIP Minimal 80	25,71%	N/A
4.	Meningkatnya capaian kinerja aparatur pada Bagian Tapem, Kesra, Hukum	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Aparatur	100%	N/A
5.	Meningkatnya Implementasi RB di rentang koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra	Persentase OPD rentang koordinasi yang mengimplementasikan RB	100%	N/A
6.	Meningkatnya kepuasan pengguna layanan pada rentang koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra	Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum dan Penyusunan Perundang - undangan	88,59	N/A
		Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat	81,48	N/A
		Indeks Kepuasan Layanan Tata Pemerintahan	88,59	N/A
7.	Meningkatnya pemenuhan standar pelayanan pada rentang koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra	Rata-rata nilai IPP rentang kendali dan rentang koordinasi	3,339	N/A
8.	Meningkatnya tingkat kematangan indikator SPBE pada rentang koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra	Persentase tingkat kematangan indikator penilaian SPBE dengan kategori baik pada perangkat daerah pengampu rentang koordinasi dan rentang kendali Asisten Pemerintahan dan Kesra	97,14%	N/A

## 2. Program Perekonomian dan Pembangunan

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Realisasi	Realisasi Nasional/ Provinsi
1.	Terlaksananya perumusan kebijakan dan monev pelaksanaan kebijakan di rentang koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Persentase kebijakan bidang administrasi pembangunan yang ditetapkan tepat waktu	100%	N/A
		Persentase kebijakan bidang administrasi perekonomian yang ditetapkan tepat waktu	100%	N/A

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Realisasi	Realisasi Nasional/ Provinsi
		Persentase Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Hingga Selesai Ada Pemenangnya	93,06%	N/A
2.	Meningkatnya Implementasi SAKIP di Perangkat Daerah rentang koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Persentase OPD rentang koordinasi dengan Nilai SAKIP Minimal 80	75%	N/A
3.	Meningkatnya capaian kinerja aparatur pada Bagian Perekonomian, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian PBJ	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Aparatur	100%	N/A
4.	Meningkatnya Implementasi RB di rentang koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Persentase OPD rentang koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan dengan Nilai RB minimal 50	100%	N/A
5.	Meningkatnya kepuasan pengguna layanan pada rentang koordinasi dan rentang kendali Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Pembangunan	85,5	N/A
		Indeks Kepuasan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	98,99	N/A
		Indeks Kepuasan Layanan Perekonomian	82,46	N/A
6.	Meningkatnya pemenuhan standar pelayanan pada rentang koordinasi dan rentang kendali Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Rata-rata nilai IPP Rentang kendali dan rentang koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan	3.783	N/A
7.	Meningkatnya indikator penilaian SPBE pada rentang koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Tingkat kematangan indikator penilaian SPBE dengan indikator baik pada perangkat daerah pengampu rentang koordinasi dan rentang kendali Asisten Perekonomian dan Pembangunan	100	N/A

### 3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Realisasi	Realisasi Nasional/ Provinsi
1.	Terlaksananya perumusan kebijakan dan monev pelaksanaan	Persentase kebijakan bidang perencanaan dan keuangan yang disusun tepat waktu	100%	N/A

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Realisasi	Realisasi Nasional/ Provinsi
	kebijakan di rentang koordinasi Asisten Administrasi Umum	Persentase kebijakan bidang keorganisasian yang disusun tepat waktu	100%	N/A
2.	Meningkatnya Implementasi SAKIP di Perangkat Daerah	Persentase OPD dengan Nilai SAKIP Minimal 80	45,28%	N/A
3.	Meningkatnya Implementasi SAKIP di Perangkat Daerah rentang koordinasi Asisten Administrasi Umum	Persentase OPD rentang koordinasi Asisten administrasi Umum dengan Nilai SAKIP Minimal 80	100%	N/A
3.	Meningkatnya implementasi SAKIP di Setda	Persentase peningkatan nilai SAKIP Setda	2,5%	N/A
4.	Meningkatnya capaian kinerja aparatur pada Bagian Umum, Prokopim, Renkeu, Organisasi	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Aparatur	100%	N/A
5.	Meningkatnya Implementasi RB di Kabupaten Jombang	Nilai PMPRB Pemda	N/A	N/A
		Jumlah unit kerja yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	2	N/A
		Persentase OPD dengan Nilai Indeks Efektivitas dan Efisiensi OPD dengan kategori minimal Baik	100%	N/A
		Persentase OPD dengan Tingkat Kematangan Tinggi	100%	N/A
6.	Meningkatnya Implementasi RB di Sekretariat Daerah	Nilai PMPRB Setda	82,5	N/A
7.	Meningkatnya Implementasi RB di rentang koordinasi Asisten Administrasi Umum	Persentase OPD rentang koordinasi yang mengimplementasikan RB	100%	N/A
8.	Meningkatnya kepuasan pengguna layanan lingkup Pemda	Nilai IKM Pemda	88.38	86,25
9.	Meningkatnya kepuasan pengguna layanan pada rentang koordinasi dan rentang kendali Asisten Administrasi Umum	Nilai IKM Setda	88.72	N/A
		Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	89,55	N/A
		Persentase pelayanan keprotokolan dan komunikasi Kepala Daerah/Wakil Kpala Daerah	100%	N/A
		Indeks Kepuasan Layanan	90,31	N/A

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Realisasi	Realisasi Nasional/ Provinsi
		Umum		
		Indeks Kepuasan Layanan Perencanaan dan Keuangan	89,43	N/A
		Indeks Kepuasan Layanan Organisasi	92,28	N/A
10.	Meningkatnya pemenuhan standar pelayanan lingkup Pemda	Nilai IPP Pemda	4,26	4,36
		Persentase peningkatan pemenuhan pengadaan Sarpras lingkup Setda	29,5%	N/A
11.	Meningkatnya pemenuhan standar pelayanan pada rentang koordinasi dan rentang kendali Asisten Administrasi Umum	Nilai IPP Setda	4,04	N/A
		Rata-rata nilai IPP Rentang Kendali dan Rentang Koordinasi Asisten Administrasi Umum	3,504	N/A
12.	Meningkatnya Implementasi SPBE di Kabupaten Jombang	Nilai Penilaian Mandiri SPBE	4.75	N/A
13.	Meningkatnya indikator penilaian SPBE pada rentang koordinasi Asisten Administrasi Umum	Persentase Tingkat Kematangan Indikator penilaian SPBE dengan kategori baik pada perangkat daerah pengampu rentang koordinasi dan rentang kendali Asisten Administrasi Umum	100%	N/A

### 3.1.5 Analisis atas Realisasi Kinerja

Berdasarkan hasil penjelasan capaian kinerja melalui perbandingan antara target dan realisasi tahun berjalan, antara realisasi kinerja tahun berjalan dengan dua tahun terakhir, antara realisasi kinerja tahun berjalan dengan target jangka menengah, antara realisasi kinerja tahun berjalan dengan realisasi kinerja di level internasional/internasional, dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi kinerja Sekretariat Daerah tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun 2022, namun masih masuk dalam kategori Baik (Berhasil) dengan rata-rata capaian sebesar 95,98%. Terdapat beberapa indikator yang belum melebihi/memenuhi target yang ditetapkan namun telah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Adanya penurunan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor antara lain:

1. Adanya perubahan kebijakan dari pemerintah terkait sistem penilaian LPPD, sehingga pemenuhan dokumen pendukung penilaian yang telah dicukupi belum sesuai dengan sistem penilaian yang baru dan hasil nilai yang keluar kurang memuaskan.

- Adanya Perubahan kebijakan yang menyatakan bahwa Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) tidak dilaksanakan kembali, dan Laporan Hasil Evaluasi dari MenPAN-RB belum realis, sehingga indikator tidak bisa diperhitungkan.

Selain penurunan tersebut, terdapat beberapa indikator yang belum memenuhi target namun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- Adanya usaha atau perbaikan setiap Aparatur dalam meningkatkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah baik Lingkup Sekretariat Daerah dan Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang
- Adanya Perbaikan dalam sistem pelayanan publik serta peningkatan kualitas layanan lebih baik yang diberikan kepada masyarakat Kabupaten Jombang
- Adanya perbaikan dalam infrastruktur teknologi informasi, serta peningkatan keterampilan Sumber Daya Manusia dalam menggunakan sistem berbasis elektronik.

### 3.2 Realisasi Anggaran

Dalam konteks penyusunan laporan kinerja, realisasi anggaran digunakan sebagai salah satu faktor untuk mengevaluasi pencapaian tujuan dan efektivitas pengelolaan keuangan terhadap indikator kinerja oleh instansi pemerintah. Capaian realisasi anggaran tergambar melalui perbandingan antara realisasi kinerja dengan realisasi anggaran dan tingkat efisiensi penggunaan Sumber daya terhadap realisasi anggaran yang dicapai.

#### 3.2.1 Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran

**Tabel 3. 5 Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran**

KINERJA							ANGGARAN		
No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Realisasi	Capaian (%)	Pagu Tahunan	Realisasi	Persentase %
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	Nilai	3,44	2,78	80,81%	Rp97.938 953.960	Rp92.432 2.292.802	94,38%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Pemda	Nilai dan Predikat	73,50	72,70	98,91%			
		Nilai SAKIP Setda	Nilai dan Predikat	81	82,10	101,36%			

KINERJA							ANGGARAN		
		Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB	%	90	N/A	N/A			
3.	Meningkatnya Kualitas Layanan	Persentase Peningkatan Nilai IKM Pemda	%	1,96	1,93	98,26%			
		Persentase Peningkatan Nilai IPP Pemda	%	2,87	7,30	120%			
4.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Kesesuaian Penilaian Mandiri SPBE dengan Indeks SPBE	%	96	73	76,54%			
						95,98%	BAIK (BERHASIL)		

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah, ditetapkan pagu anggaran tahun 2023 sebesar Rp97.938.953.960 dan terserap sebesar Rp92.432.292.802, sehingga capaian realisasi anggarannya sebesar 94,38% berdasarkan pengukuran kinerja Tribunal IV Tahun 2023 yang datanya diambil dari LRA SIPD per tanggal 31 Desember 2023. Namun, terdapat pengembalian dana hibah Mushola Al Hikmah karena mushola tersebut merupakan aset SD (Lembaga Milik Daerah) sebesar Rp45.000.000 sebagaimana bukti surat tanda setoran pengembalian dana terlampir, sehingga realisasi anggaran setelah adanya pengembalian tertanggal 2 Maret 2024 menjadi Rp92.387.292.802 dan capaian realisasinya sebesar 94,33%.

### 3.2.2 Efisiensi penggunaan sumber daya

#### 1). Efisiensi Anggaran

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, diharapkan dapat menggunakan sumber daya secara efisien khususnya pada penggunaan anggaran seminimal mungkin dengan hasil kinerja yang berdaya saing atau sesuai yang telah direncanakan. Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan tersaji pada tabel berikut:

**Tabel 3. 6 Pencapaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran Tahun 2023**

No	Sasaran Kinerja	Indikator kinerja	% Capaian Kinerja	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai LPPD	80,81%	94,38%	1,6%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Pemda	98,91%		
		Nilai SAKIP Setda	101,36%		
		Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB	N/A		
3.	Meningkatnya Kualitas Layanan	Persentase Peningkatan Nilai IKM Pemda	98,26%		
		Persentase Peningkatan Nilai IPP Pemda	120%		
4.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Kesesuaian Penilaian Mandiri SPBE dengan Indeks SPBE	76,54%		
Rata-rata Capaian			95,98%	94,38%	1,6%

Pada Tahun 2023 didapatkan tingkat efisiensi sebesar 1,6% yang dihitung dari selisih antara capaian realisasi pagu anggaran dengan rata-rata capaian kinerja. Semakin besar alokasi anggaran yang tidak digunakan dan rata-rata capaian lebih tinggi daripada realisasi, maka semakin tinggi tingkat Efisiensi Anggaran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyerapan/tingkat efisiensi anggaran terhadap capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang tahun 2023 terbilang cukup efisien.

## 2). Efisiensi Sumber Daya Manusia

Kebutuhan pegawai Berdasarkan Analisa Beban Kerja pemenuhan kebutuhan pegawai seharusnya sebanyak 124 orang. Sampai dengan 31 Desember 2023 jumlah pemenuhan pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang sejumlah 222 orang, sehingga persentase pemenuhan kebutuhan pegawai sebesar 98 %. Dengan jumlah SDM yang masih terbatas namun capaian kinerja pada Tahun 2023 telah tercapai dengan predikat Sangat Baik pada indikator Kinerja Sasaran bahkan ada yang mencapai sebesar 100% bahkan lebih

**Tabel 3. 7 Formasi Pegawai Sekretariat Daerah Tahun 2022**

NO	UNIT KERJA/BAGIAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH PEGAWAI
		L	P	
1	Sekretaris Daerah	1	-	1
2	Asisten	2	1	3
3	Staf Ahli	3	-	3
4	Bagian Tata Pemerintahan	5	5	10
5	Bagian Kesejahteraan Rakyat	12	3	16
6	Bagian Hukum	6	5	11
7	Bagian Perekonomian	4	5	9
8	Bagian Administrasi Pembangunan	6	4	10
9	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	15	7	22
10	Bagian Umum	75	32	107
11	Bagian Organisasi	4	7	11
12	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	14	8	22
13	Bagian Perencanaan dan Keuangan	4	7	11
<b>JUMLAH</b>		<b>151</b>	<b>84</b>	<b>235</b>

Keterangan : \*) Jumlah PNS : 143 orang

\*) Jumlah Non PNS : 92 orang

**Tabel 3. 8 Formasi Pegawai Sekretariat Daerah Tahun 2023**

NO	UNIT KERJA/BAGIAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH PEGAWAI
		L	P	
1	Sekretaris Daerah	1	-	1
2	Asisten	2	1	3
3	Staf Ahli	2	1	3
4	Bagian Tata Pemerintahan	4	5	9
5	Bagian Kesejahteraan Rakyat	10	3	13
6	Bagian Hukum	4	6	10

7	Bagian Perekonomian	5	5	10
8	Bagian Administrasi Pembangunan	8	4	12
9	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	16	9	26
10	Bagian Umum	70	27	97
11	Bagian Organisasi	5	7	12
12	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	12	6	18
13	Bagian Perencanaan dan Keuangan	1	8	9
<b>JUMLAH</b>		<b>141</b>	<b>81</b>	<b>222</b>

Keterangan : \*) Jumlah PNS: 134 orang

\*) Jumlah Non PNS: 88 orang

Efisiensi Sumber Daya Sekretariat Daerah pada tahun 2022, dengan jumlah PNS: 134 orang, dan jumlah Non PNS: 88 orang, realisasi kinerja dengan target kinerja keseluruhan, dengan serapan anggaran mencapai 94,38% total capaian kinerja 95,98%, sehingga tingkat efisiensi mencapai 99,17%. Efisiensi Sumber Daya Sekretariat Daerah pada tahun 2023, dengan jumlah PNS: 134 orang dan jumlah Non PNS: 88 orang, dengan peningkatan efisiensi sebesar 98% pada Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sekretariat Daerah dan penyerapan anggaran di tahun 2023 meningkat sebesar 94,38%. Sehingga perbandingan dari tahun 2022 ketahun 2023 sebesar 0,38%.

Sebagaimana Peraturan Bupati Jombang Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, dalam pelaksanaan program, kegiatan dan Sub kegiatan serta tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan diharapkan dapat terlaksana dengan efisien yaitu penggunaan sumber daya manusia yang ada dengan hasil kinerja yang berdaya guna tercapai sesuai yang telah direncanakan. Guna mengetahui tingkat efisiensi penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan tersaji pada tabel berikut:

**Tabel 3. 9 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah Tahun 2023**

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	% Capaian kinerja	% ketercukupan pegawai	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai LPPD	80,81%	71,81%	22,78%

2.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP Pemda	98,91%	33,91%	65%
		Nilai SAKIP Setda	101,36%	113,64%	12,28%
		Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB	N/A	N/A	N/A
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan nilai IKM Pemda	98,26%	33,26%	65%
		Persentase Peningkatan nilai IPP Pemda	120%	55%	65%
4.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Kesesuaian Penilaian Mandiri SPBE dengan Indeks SPBE	76,54%	138,46%	61,92%

Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya Manusia sebagai berikut:

- Sasaran Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan indikator Nilai LPPD ada efisiensi sumber daya manusia sebesar 22,78%. Sasaran ini pendukung utamanya adalah Sumber Daya Manusia dari Bagian Tata Pemerintahan, yang mana jumlah eksisting pegawai pada Bagian Tata Pemerintahan sebanyak 8 orang ASN dan 1 Non ASN, sedangkan berdasarkan hasil Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK) kebutuhan pegawai sebanyak 20 orang.
- Sasaran Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dengan indikator Nilai SAKIP Pemda ada efisiensi sumber daya manusia sebesar 65%. Sasaran ini pendukung utamanya adalah Sumber Daya Manusia dari Bagian Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Bagian Perekonomian, Bagian Pembangunan, Bagian Organisasi dan Bagian Perencanaan dan Keuangan yang mana jumlah eksisting pegawai pada Bagian Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Bagian Perekonomian, Bagian Pembangunan, Bagian Organisasi dan Bagian Perencanaan dan Keuangan sebanyak 50 orang ASN dan 15 Non ASN, sedangkan berdasarkan hasil Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK) kebutuhan pegawai sebanyak 155 orang.
- Sasaran Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dengan indikator Nilai SAKIP Setda ada efisiensi sumber daya manusia sebesar 12,28%. Sasaran ini pendukung utamanya adalah Sumber Daya Manusia dari Bagian Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian, Bagian Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang/Jasa, Bagian Umum, Bagian Organisasi, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dan Bagian Perencanaan dan Keuangan yang mana jumlah eksisting pegawai pada Bagian Tata

Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian, Bagian Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang/Jasa, Bagian Umum, Bagian Organisasi, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dan Bagian Perencanaan dan Keuangan sebanyak 127 orang ASN dan 88 Non ASN, sedangkan berdasarkan hasil Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK) kebutuhan pegawai sebanyak 458 orang.

- Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dengan indikator Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB ada efisiensi sumber daya manusia sebesar N/A. Sasaran ini pendukung utamanya adalah Sumber Daya Manusia dari Bagian Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian, Bagian Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang/Jasa, Bagian Umum, Bagian Organisasi, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dan Bagian Perencanaan dan Keuangan yang mana jumlah eksisting pegawai pada Bagian Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian, Bagian Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang/Jasa, Bagian Umum, Bagian Organisasi, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dan Bagian Perencanaan dan Keuangan sebanyak 127 orang ASN dan 88 Non ASN, sedangkan berdasarkan hasil Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK) kebutuhan pegawai sebanyak 458 orang.
- Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator Persentase Peningkatan nilai IKM Pemda ada efisiensi sumber daya manusia sebesar 65%. Sasaran ini pendukung utamanya adalah Sumber Daya Manusia dari Bagian Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Bagian Perekonomian, Bagian Pembangunan, Bagian Organisasi dan Bagian Perencanaan dan Keuangan yang mana jumlah eksisting pegawai pada Bagian Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Bagian Perekonomian, Bagian Pembangunan, Bagian Organisasi dan Bagian Perencanaan dan Keuangan sebanyak 50 orang ASN dan 15 Non ASN, sedangkan berdasarkan hasil Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK) kebutuhan pegawai sebanyak 155 orang.
- Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator Persentase Peningkatan nilai IPP Pemda ada efisiensi sumber daya manusia sebesar 65%. Sasaran ini pendukung utamanya adalah Sumber Daya Manusia dari Bagian Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Bagian Perekonomian, Bagian Pembangunan, Bagian Organisasi dan Bagian Perencanaan dan Keuangan yang mana jumlah eksisting pegawai pada Bagian Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Bagian Perekonomian, Bagian Pembangunan, Bagian Organisasi dan Bagian Perencanaan dan Keuangan sebanyak 50 orang ASN dan 15 Non ASN, sedangkan berdasarkan hasil Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK) kebutuhan pegawai sebanyak 155 orang.
- Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator Persentase Kesesuaian Penilaian Mandiri SPBE dengan Indeks SPBE ada efisiensi sumber

daya manusia sebesar 61,92%. Sasaran ini pendukung utamanya adalah Sumber Daya Manusia dari Bagian Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian, Bagian Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang/Jasa, Bagian Umum, Bagian Organisasi, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dan Bagian Perencanaan dan Keuangan yang mana jumlah eksisting pegawai pada Bagian Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian, Bagian Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang/Jasa, Bagian Umum, Bagian Organisasi, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dan Bagian Perencanaan dan Keuangan sebanyak 127 orang ASN dan 88 Non ASN, sedangkan berdasarkan hasil Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK) kebutuhan pegawai sebanyak 458 orang.

### 3) Efisiensi Sarana Prasarana

Efisiensi sarana prasarana sekretariat daerah dapat berperan penting dalam mencapai target kinerja dengan memaksimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia dan meningkatkan efektivitas operasional secara keseluruhan. Sarana prasarana yang efisien dapat meningkatkan produktivitas staf dan proses kerja sehingga target kinerja organisasi dapat tercapai.

**Tabel 3. 10 Sarana Prasarana Sekretariat Daerah Tahun 2023**

NO	URAIAN	JUMLAH TERSEDIA	STANDAR KEBUTUHAN	SELISIH
1	AC Sentral	17	17	-
2	AC Split	145	147	-2
3	AC Window	24	24	-
4	Air Blower	6	6	-
5	Alat dapur lainnya	15	15	-
6	Alat Hiasan	22	22	-
7	Alat Kantor Lainnya	15	15	-
8	Alat Kedokteran umum lainnya	6	6	-
9	Alat Kesehatan olahraga lainnya	2	2	-
10	Alat Khusus Keamanan Lainnya	4	4	-
11	Alat Komunikasi Radio SSB	2	2	-
12	alat komunikasi radio ssb lainnya (dst)	2	2	-
13	alat komunikasi telephone lainnya (dst)	5	5	-
14	Alat Musik Modern/Band	2	2	-
15	Alat Musik Tradisional/Daerah	6	6	-
16	Alat pemadam kebakaran	46	46	-
17	Alat Pemanas Ruangan	3	3	-
18	Alat Pembersih lainnya	3	3	-
19	Alat Pemotong Kertas	2	2	-
20	Alat Pencetak Label	1	1	-

NO	URAIAN	JUMLAH TERSEDIA	STANDAR KEBUTUHAN	SELISIH
21	Alat Pendingin lainnya	5	5	-
22	Alat Penghancur Kertas	23	23	-
23	Alat Rumah Tangga lain lain	14	10	4
24	Alat Studio Video Lainnya	3	3	-
25	Alat ukur Universal Lainnya	1	2	-2
26	alat-alat sandi lainnya (dst)	1	1	-
27	Aquarium (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6	6	-
28	Audio Amplifier	4	4	-
29	Audio Monitor Active	1	1	-
30	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	1	1	-
31	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	5	5	-
32	Bangunan Gedung Kantor Permanen	14	14	-
33	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	2	2	-
34	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	1	-
35	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	3	3	-
36	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	1	1	-
37	Bangunan Pembawa Air Bersih Lain-lain	1	1	-
38	Bangunan Pengamanan Air Kotor Lain-lain	4	4	-
39	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1	1	-
40	Bracket Standing Peralatan	4	4	-
41	Brankas	9	9	-
42	Buffet Kaca	2	2	-
43	Bus ( Penumpang 30 Orang Keatas )	1	1	-
44	Camera Conference	9	9	-
45	Camera Digital	5	5	-
46	Camera elektronik	27	27	-
47	Camera Film	6	6	-
48	Camera+Attachment	2	2	-
49	Coffee Maker	3	3	-
50	CPU	3	3	-
51	Dispenser	22	22	-
52	Elevator /Lift	1	1	-
53	Encoder/Decoder	1	1	-
54	Exercise Treadmil	1	1	-
55	Exhauster Fan	21	21	-
56	Facsimile	12	12	-
57	Filling Kabinet Besi	102	99	3
58	Gambar Presiden/Wakil Presiden	1	1	-

NO	URAIAN	JUMLAH TERSEDIA	STANDAR KEBUTUHAN	SELISIH
59	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	1	-
60	Gedung Garasi/Pool Permanen	6	6	-
61	Gedung Pos Jaga Permanen	4	4	-
62	Gordyin / kray	49	49	-
63	Guci	2	2	-
64	Handy Cam	3	2	1
65	Handy talky	39	39	-
66	Hard Disk	3	3	-
67	Hidran Kebakaran	1	1	-
68	Ils Calibation RX	1	4	-3
69	Instalasi Air Sumber / Mata Air Kapasitas Kecil	1	1	-
70	Instalasi Penangkal Petir Manual	1	1	-
71	Jalan Kabupaten Lain-lain	2	2	-
72	Jalan Khusus Lainnya	3	3	-
73	Jam Mekanis	2	2	-
74	Jaringan Distribusi Lain-lain	14	14	-
75	Jaringan Pembawa Lain-lain	1	1	-
76	Jeep	11	11	-
77	Kasur/Spring Bed	10	10	-
78	Kipas Angin	4	4	-
79	Kitchen Set	4	4	-
80	Kompore Gas (Alat Dapur)	14	14	-
81	Kursi Besi / Metal	15	15	-
82	Kursi biasa	236	222	14
83	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	4	4	-
84	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	11	11	-
85	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon V	4	4	-
86	Kursi kayu	46	46	-
87	Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	7	7	-
88	Kursi kerja pegawai Non struktural	18	18	-
89	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	4	4	-
90	Kursi kerja pejabat eselon III	8	8	-
91	Kursi kerja pejabat eselon IV	36	36	-
92	Kursi Kerja Pejabat lainnya	51	51	-
93	Kursi Lipat	170	170	-
94	Kursi Putar	94	94	-
95	Kursi rapat	837	834	3
96	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	10	10	-

NO	URAIAN	JUMLAH TERSEDIA	STANDAR KEBUTUHAN	SELISIH
97	Kursi tamu	67	67	-
98	Kursi tamu di depan ajudan menteri/gubernur/bupati/walikota	1	1	-
99	Lambang Garuda Pancasila	1	1	-
100	Lap Top	52	65	- 13
101	Layar Film/Proyektor	48	48	-
102	Lemari besi	19	19	-
103	Lemari buku arsip untuk arsip dinamis	23	23	-
104	Lemari Es	12	12	-
105	Lemari kaca	10	10	-
106	Lemari kayu	63	62	1
107	Lemari Makan	2	2	-
108	Lemari Penyimpan	3	3	-
109	Lemari sorok	8	8	-
110	Lensa Kamera	4	4	-
111	Logam (Gong, Mandau)	1	1	-
112	Loudspeaker	12	12	-
113	Lukisan Cat Air	25	25	-
114	Lukisan Cat Minyak	10	10	-
115	Meja 1/2 biro	151	122	29
116	Meja Bundar	2	2	-
117	Meja Kerja Kayu	10	10	-
118	Meja Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	6	6	-
119	Meja kerja pegawai non struktural	40	40	-
120	Meja Kerja Pejabat Eselon II	6	6	-
121	Meja kerja pejabat Eselon III	11	11	-
122	Meja kerja pejabat Eselon IV	25	25	-
123	Meja kerja pejabat lainnya	19	19	-
124	Meja komputer	20	32	- 12
125	Meja Makan Besi	7	7	-
126	Meja panjang	32	32	-
127	Meja Podium	1	1	-
128	Meja rapat	148	148	-
129	Meja Rapat Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	1	1	-
130	Meja Resepsionis	4	4	-
131	Meja tambahan	19	19	-
132	Meja Tamu Biasa	42	42	-
133	Meja Telepon	3	3	-
134	Meja Tulis	19	19	-
135	Mesin Absensi	7	7	-
136	Mesin Cuci	5	5	-
137	Mesin Finger Print	1	1	-

NO	URAIAN	JUMLAH TERSEDIA	STANDAR KEBUTUHAN	SELISIH
138	Mesin Gergaji	1	1	-
139	Mesin ketik elektronik/selektrik	3	3	-
140	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	16	17	- 1
141	Mesin Pemotong Rumput	11	11	-
142	Mesin Pengering Tangan	10	10	-
143	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	16	16	-
144	Meubelair lainnya	443	443	-
145	Mic Conference	2	2	-
146	Micro Bus ( Penumpang 15 S/D 29 Orang )	1	1	-
147	Microphone	56	56	-
148	Microphone Floor Stand	11	11	-
149	Microphone Table Stand	13	13	-
150	Microphone/Wireless MIC	26	26	-
151	Mimbar/Podium	7	7	-
152	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	4	4	-
153	Mini Komputer	2	2	-
154	Mobil Golfcar	1	1	-
155	Modem	2	2	-
156	Monitor	12	12	-
157	Morse Keyer	1	1	-
158	Nebulizer	2	2	-
159	Netware Interface External	113	113	-
160	Note Book	76	73	3
161	Orgen/Electrone	1	1	-
162	Oven Listrik	8	8	-
163	Pagar Permanen	1	1	-
164	Papan Nama Instansi	64	64	-
165	Papan pengumuman	3	3	-
166	Papan Tulis	1	1	-
167	Papan visual / papan nama / papan struktur	3	3	-
168	PC Unit	165	166	-1
169	PC Workstation	1	1	-
170	peralatan antena uhf lainnya (dst)	1	1	-
171	Peralatan Jaringan lainnya	3	3	-
172	Peralatan Komputer Lainnya	6	6	-
173	Peralatan Komputer lainnya	1	1	-
174	Peralatan Minikomputer lainnya	1	1	-
175	Peralatan Personal Komputer lainnya	12	12	-
176	Peralatan Studio Audio Lainnya	6	6	-
177	peralatan studio audio lainnya (dst)	43	43	-
178	Personal komputer lainnya	4	4	-
179	Pick Up	4	4	-

NO	URAIAN	JUMLAH TERSEDIA	STANDAR KEBUTUHAN	SELISIH
180	Pompa Air	69	69	-
181	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	5	5	-
182	Portable Water Pump	5	5	-
183	Printer (peralatan personal komputer)	211	211	-
184	Printer Epson L5190 Ecotank	-	4	-4
185	Proyektor+Attachment	1	1	-
186	Rak besi	28	27	1
187	Rak Besi Buku 6 ruang	19	19	-
188	Rak Kayu	42	42	-
189	Rak kayu kaca	1	1	-
190	Repeater RX/TX	1	1	-
191	Rice Cooker (Alat Dapur)	3	3	-
192	Rice Warmer	2	2	-
193	Router	1	1	-
194	Rumah Negara Golongan I Tipe A Darurat	2	2	-
195	Rumah Negara Golongan I Tipe A Semi Permanen	1	1	-
196	Scanner (peralatan personal komputer)	16	16	-
197	Sedan	2	2	-
198	Sepeda	9	9	-
199	Sepeda Motor	96	96	-
200	Sepeda Statis	1	1	-
201	Server	6	6	-
202	Sice	4	8	- 4
203	Sketsel	3	3	-
204	Sofa	38	37	1
205	Sound system	54	53	1
206	Sound system / Sonny Audio System MHC-V43	-	1	- 1
207	Speaker Komputer	1	1	-
208	Stabilisator	2	2	-
209	Station Wagon	47	47	-
210	Stationary Generating Set	2	2	-
211	Submersible Pump	3	3	-
212	Sumersible Pump	16	16	-
213	Tablet PC	7	7	-
214	Tabung Gas	3	3	-
215	Taman Permanen	6	6	-
216	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	5	5	-
217	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	1	1	-
218	Tanah unt bangunan ibadah lainnya	1	1	-
219	Tanaman Hias	44	44	-
220	Tanaman Keras	1	1	-

NO	URAIAN	JUMLAH TERSEDIA	STANDAR KEBUTUHAN	SELISIH
221	Tangga	1	1	-
222	Tangga Aluminium	3	3	-
223	Telephone (PABX)	23	23	-
224	Telephone Hybrid	1	1	-
225	Televisi	76	76	-
226	Telex	5	5	-
227	Tempat Tidur Besi	4	4	-
228	Tempat Tidur Kayu	21	21	-
229	Tenda	1	1	-
230	Transportable Compressor	2	2	-
231	Transportable Generating Set	5	5	-
232	Tripod Kamera	3	3	-
233	Truck + Attachment	3	3	-
234	TV LCD 75 inch	-	1	- 1
235	Ukiran Kayu dan sejenisnya	2	2	-
236	Unit Power Supply	24	24	-
237	Video Mixer	1	1	-
238	Video Patch Panel	1	1	-
239	Voice Recorder	3	3	-
240	Walkman Detector	5	5	-
241	Water Filter	3	3	-
242	Water Purification	1	1	-
243	Wayang Kulit	7	7	-
244	White board	6	6	-
245	Wireless	7	7	-
Jumlah		5.442	5.424	18

Berdasar data di atas dapat dijelaskan bahwa sampai dengan 31 Desember 2023 jumlah pemenuhan sarana dan prasarana di Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang sejumlah 5.442 unit, dengan standar kebutuhan sarpras sejumlah 5.424 unit sehingga diperoleh persentase ketercukupan sarana prasaran sebesar 100,33%.

**Tabel 3. 11 Efisiensi Penggunaan Sarana Prasarana Sekretariat Daerah Tahun 2023**

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	% Capaian kinerja	% Ketercukupan Sarana Prasarana	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD	80,81%	100,33%	80,54%
2	Meningkatnya akuntabilitas	Nilai SAKIP Pemda	98,91%	100,33%	98,58%

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	% Capaian kinerja	% Ketercukupan Sarana Prasarana	Tingkat Efisiensi
	kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP Setda	101,36%	100,33%	101,02%
		Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB	N/A	100,33%	N/A
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan nilai IKM Pemda	98,26%	100,33%	97,93%
		Persentase Peningkatan nilai IPP Pemda	120%	100,33%	119,60%
		Persentase Kesesuaian Penilaian Mandiri SPBE dengan Indeks SPBE	76,54%	100,33%	76,28%

Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan tingkat efisiensi pengguna sarana dan prasarana Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang sebagai berikut:

- Sasaran Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan indikator Nilai LPPD adanya efisiensi sarana dan prasarana 100,33%. Adanya efisiensi capaian kinerja dan capaian sarana prasarana dari Bagian Tata Pemerintahan capaian kinerja 80,81 dan sehingga tingkat efisiensi sarana dan prasarana 80,54%.
- Sasaran Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dengan indikator Nilai SAKIP Pemda efisiensi sarana dan prasarana 100,33%. Adanya efisiensi capaian kinerja dan capaian sarana prasarana dari Bagian Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Bagian Perekonomian, Bagian Pembangunan, Bagian Organisasi dan Bagian Perencanaan dan Keuangan capaian kinerja 98,91% dan sehingga tingkat efisiensi sarana dan prasarana 98,58%.
- Sasaran Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dengan indikator Nilai SAKIP Setda efisiensi sarana dan prasarana 100,33%. Adanya efisiensi capaian kinerja dan capaian sarana prasarana dari Bagian Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian, Bagian Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang/Jasa, Bagian Umum, Bagian Organisasi, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dan Bagian Perencanaan dan Keuangan capaian kinerja 101,36% dan sehingga tingkat efisiensi sarana dan prasarana 101,02%.
- Sasaran Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dengan indikator Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB ada efisiensi sarana dan prasarana 100,33%. Adanya efisiensi capaian kinerja dan capaian sarana prasarana dari Bagian Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Bagian Hukum,

Bagian Perekonomian, Bagian Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang/Jasa, Bagian Umum, Bagian Organisasi, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dan Bagian Perencanaan dan Keuangan capaian kinerja N/A dan sehingga tingkat efisiensi sarana dan prasarana N/A.

- Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator Persentase Peningkatan nilai IKM Pemda ada efisiensi sarana dan prasarana 100,33%. Sasaran ini pendukung utamanya adalah Sumber Daya Manusia dari Bagian Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Bagian Perekonomian, Bagian Pembangunan, Bagian Organisasi dan Bagian Perencanaan dan Keuangan capaian kinerja 98,26% dan sehingga tingkat efisiensi sarana dan prasarana 97,93%..
- Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator Persentase Peningkatan nilai IPP Pemda ada efisiensi sarana dan prasarana 100,33%. Sasaran ini pendukung utamanya adalah Sumber Daya Manusia dari Bagian Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Bagian Perekonomian, Bagian Pembangunan, Bagian Organisasi dan Bagian Perencanaan dan Keuangan capaian kinerja 120% dan sehingga tingkat efisiensi sarana dan prasarana 119,60%.
- Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator Persentase Kesesuaian Penilaian Mandiri SPBE dengan Indeks SPBE ada efisiensi sarana dan prasarana 100,33%. Sasaran ini pendukung utamanya adalah Sumber Daya Manusia dari Bagian Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian, Bagian Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang/Jasa, Bagian Umum, Bagian Organisasi, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dan Bagian Perencanaan dan Keuangan capaian kinerja 76,54% dan sehingga tingkat efisiensi sarana dan prasarana 76,28%.

### **3.3 Hambatan atas Pencapaian Indikator Kinerja yang Belum Tercapai**

Dalam mencapai indikator kinerja terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan capaian kinerja belum optimal, antara lain:

1. Penerapan pelaksanaan penjenjangan kinerja yang belum maksimal karena minimnya volume dialog kinerja dari atasan hingga bawahan;
2. Terjadi kesenjangan transfer pengetahuan terkait tugas pokok dan fungsi sehingga kinerja yang dihasilkan kurang optimal;
3. Kurangnya inovasi atau parameter untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah
4. Perumusan formulasi indikator kinerja utama yang kurang tepat sehingga capaian kinerja tidak bisa maksimal. Meskipun dari tahun ke tahun indeks atau nilai faktor pendukung IKU Sekda terus meningkat, capaian tidak bisa melebihi 100% karena kesalahan dalam merumuskan formulasinya.

### **3.4 Upaya Perbaikan Kinerja**

Dalam rangka perbaikan budaya kinerja dan meningkatkan kualitas birokrasi suatu organisasi, perlu adanya dukungan dan komitmen pimpinan untuk melakukan berbagai perubahan. berikut adalah beberapa upaya yang perlu dilakukan antara lain:

1. Melakukan evaluasi dan penyempurnaan berkelanjutan secara menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah pada periode sebelumnya mulai dari sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan melakukan dialog kinerja dengan seluruh aparatur Lingkup Sekretariat Daerah
2. Melakukan perbaikan sistem dan prosedur kinerja untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, dengan menyusun SOP dan Proses Bisnis Sekretariat Daerah, sehingga terdapat alur kerja yang jelas dan hasil kerja menjadi optimal
3. Melakukan perbandingan dan *benchmarking* dengan pemerintah daerah lain yang memiliki kinerja lebih tinggi dalam hal akuntabilitas, serta mengidentifikasi praktik terbaik (*best practices*) yang dapat diadopsi dan disesuaikan dengan konteks pemerintah Kabupaten Jombang.
4. Menyesuaikan kembali penetapan formulasi pada indikator kinerja yang tiap tahun realisasinya meningkat namun belum mencapai target indikator yang ditetapkan.

### **3.5 Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP oleh APIP Tahun 2023**

1. Dilaksanakan evaluasi terkait indikator sekda yang digunakan untuk mengukur sasaran "meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah" dan telah ditetapkan pada Renstra/ RPD Sekretariat Daerah bahwa sasaran tersebut tidak menjadi sasaran Sekda pada tahun 2024, karena pada tahun 2024-2026 sasaran Sekda berubah menjadi 2 sasaran dan berbeda dengan sasaran tahun sebelumnya;
2. Memperbaiki dokumen Kertas Kerja Penetapan Target pada masing-masing Bagian dengan melaksanakan asistensi penyusunan kertas kerja penetapan target yang menantang dan bisa dicapai (*achievable*) dengan dasar perhitungan yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan pada seluruh Bagian Lingkup Sekretariat Daerah;
3. Memperbaiki dokumen Laporan Kinerja Tahun 2022 dan menyusun Laporan Kinerja Tahun 2023 dengan memuat informasi kinerja secara jelas dan lengkap sesuai dengan rekomendasi hasil evaluasi;
4. Dilaksanakan internalisasi kepada seluruh Bagian Lingkup Sekretariat Daerah dengan melaksanakan dialog kinerja terkait evaluasi capaian target kinerja tahun 2023 serta rencana target dan capaian tahun 2024.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Sekretariat Daerah atas capaian kinerja selama tahun 2023. Berdasarkan hasil pengukuran evaluasi dan analisis pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat dua indikator sasaran kinerja yang telah dilaksanakan dan terealisasi sesuai target, yaitu indikator Nilai SAKIP Setda dan Persentase Peningkatan Nilai IPP Pemda.
2. Terdapat tiga indikator sasaran kinerja yang telah dilaksanakan dan belum terealisasi sesuai target, namun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu Indikator Nilai SAKIP Pemda, Persentase Peningkatan Nilai IKM Pemda, Persentase Kesesuaian Penilaian Mandiri SPBE dengan Indeks SPBE.
3. Terdapat dua indikator mengalami penurunan karena adanya perubahan kebijakan penilaian dan penurunan responden survei, yaitu Indikator Nilai LPPD dan Persentase Peningkatan Nilai IKM Pemda.
4. Terdapat satu indikator tidak dapat diperhitungkan karena perubahan sistem penilaian mandiri tidak dilaksanakan lagi, dan hasil nilai RB belum keluar, yaitu Indikator Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB.
5. Capaian Kinerja Sekretariat Daerah mencapai 95,98% dan capaian realisasi Anggaran Sekretariat Daerah mencapai 94,38% yang termasuk dalam kategori Baik (Berhasil).

#### **4.2 Rekomendasi**

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja yang belum memenuhi target dan mempertahankan capaian kinerja yang telah melebihi target, terdapat beberapa saran atau rekomendasi yang diharapkan dapat direalisasikan pada tahun berikutnya antara lain:

1. Menambah pagu anggaran untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Lingkup Sekretariat Daerah
2. Menyesuaikan penetapan dan formulasi indikator Sasaran, Program, dan kegiatan tahun berikutnya.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan melaksanakan bimtek atau pelatihan di berbagai bidang sesuai dengan kebutuhan
4. Meningkatkan ketersediaan dan ketercukupan sarana prasarana penunjang pelaksanaan program dan kegiatan

Diharapkan dalam tahun-tahun berikutnya, kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam tahun 2023 ini dapat dijadikan sebagai bahan perbaikan dalam

penyusunan Rencana Strategis atau Rencana Kerja sehingga pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya dapat berjalan lebih optimal dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Jombang, 7 Februari 2024

Sekretaris Daerah  
Kabupaten Jombang



AGUS TURNOMO, SH., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197207101998031010

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. PK dan PK Perubahan Sekda 2023
2. SKP 2023
3. RENAKSI 2023
4. MONEV RENAKSI 2023 TB IV
5. KURJA 2023 TB IV
6. LRA 2023
7. BUKTI STS PENGEMBALIAN HIBAH
8. Data Honorer Setda Per Desember 2023
9. Data PNS Setda Per Desember 2023
10. Data Kebutuhan Pegawai 2023
11. Data Kebutuhan Sarana Prasarana 2023



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG  
NOMOR: 050/759/415.01/2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AGUS PURNOMO, SH., M.Si**  
Jabatan : **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **SUGIAT, S.Sos., M.Psi.T.**  
Jabatan : **Pj. BUPATI JOMBANG**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jombang, 16 Oktober 2023  
PIHAK PERTAMA  
Sekretaris Daerah

Ditandatangani secara elektronik



**AGUS PURNOMO, SH., M.Si**  
NIP. 197207101998031010

PIHAK KEDUA

Pj. Bupati Jombang

Ditandatangani secara elektronik



**SUGIAT, S.Sos., M.Psi.T.**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Anggaran
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai LPPD	3,44	Rp 97.938.953.960
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Pemda	73,50	
		Nilai SAKIP Setda	81	
		Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB	90%	
3.	Meningkatnya Kualitas Layanan	Persentase Peningkatan Nilai IKM Pemda	1,96%	
		Persentase Peningkatan Nilai IPP Pemda	2,87%	
4.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Kesesuaian Penilaian Mandiri SPBE dengan Indeks SPBE	96%	

Jombang, 16 Oktober 2023  
**PIHAK PERTAMA**  
 Sekretaris Daerah  
 Ditandatangani secara elektronik



**AGUS PURNOMO, SH., M.Si**  
 NIP. 197207101998031010

**PIHAK KEDUA**  
 Pj. Bupati Jombang  
 Ditandatangani secara elektronik



**SUGIAT, S.Sos., M.Psi.T.**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG  
NOMOR : 050/270/415.01/2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AGUS PURNOMO, SH., M.Si**  
Jabatan : **Sekretaris Daerah**  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Hj. MUNDJIDAH WAHAB**  
Jabatan : **Bupati Jombang**  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jombang, 27 Januari 2023  
**PIHAK PERTAMA**  
Sekretaris Daerah

Ditandatangani secara elektronik



**AGUS PURNOMO, SH., M.Si**  
NIP. 197207101998031010

**PIHAK KEDUA**  
Bupati Jombang

Ditandatangani secara elektronik



**Hj. MUNDJIDAH WAHAB**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai LPPD	3,44	Rp. 75.799.866.526
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Pemda	73,50	
		Nilai SAKIP Setda	81	
		Persentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB	90%	
3.	Meningkatnya Kualitas Layanan	Persentase Peningkatan Nilai IKM Pemda	1,96%	
		Persentase Peningkatan Nilai IPP Pemda	2,87%	
4.	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Kesesuaian Penilaian Mandiri SPBE dengan Indeks SPBE	96%	

Jombang, 27 Januari 2023  
**PIHAK PERTAMA**  
Sekretaris Daerah

Ditandatangani secara elektronik



**AGUS PURNOMO, SH., M.Si**  
NIP. 197207101998031010

**PIHAK KEDUA**  
Bupati Jombang

Ditandatangani secara elektronik



**Hj. MUNDJIDAH WAHAB**

**SASARAN KINERJA PEGAWAI  
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF  
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

PERIODE PENILAIAN: 2 JANUARI SD 30 DESEMBER TAHUN 2023

NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	AGUS PURNOMO, SH, M.Si	1	NAMA	Hj. MUNDJIDAH WAHAB
2	NIP	19720710 199803 1 010	2	NIP	.
3	PANGKAT/GOL. RUANG	Pembina Utama Muda (IV/c)	3	PANGKAT/GOL. RUANG	.
4	JABATAN	Sekretaris Daerah	4	JABATAN	BUPATI JOMBANG
5	UNIT KERJA	Sekretariat Daerah	5	UNIT KERJA	PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

**HASIL KERJA**

NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>A. UTAMA</b>				
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai LPPD	3,44	Penguatan Internal
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP Pemda	73,50	Anggaran
		Nilai SAKIP Setda	81,00	Anggaran
		Presentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB	90%	Penguatan Internal
3	Meningkatnya kualitas layanan	Persentase peningkatan Nilai IKM Pemda	1,96%	Penguatan Internal
		Persentase peningkatan Nilai IPP Pemda	2,87%	Penguatan Internal
4	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik	Persentase Kesesuaian penilaian mandiri SPBE dengan Indeks SPBE	96%	Penguatan Internal

**B. TAMBAHAN**

<b>PERILAKU KERJA*</b>				
------------------------	--	--	--	--

1	Berorientasi pelayanan - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
2	Akuntabel - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
3	Kompeten - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
4	Harmonis - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
5	Loyal - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
6	Adaptif - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan:
7	Kolaboratif - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk	Ekspektasi Khusus Pimpinan:

Pegawai Yang Dinilai



**AGUS PURNOMO, SH, M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19720710 199803 1 010

Jombang, 02 Januari 2023  
Pejabat Penilai Kinerja



**Hj. MUNDJIDAH WAHAB**

**SASARAN KINERJA PEGAWAI  
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF  
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI**

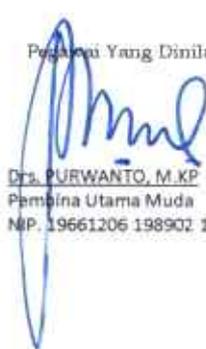
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

PERIODE PENILAIAN 02 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2023

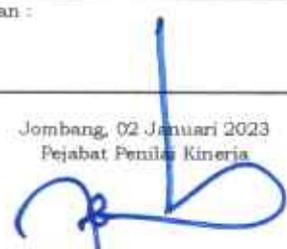
NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	Drs. PURWANTO, M.KP	1	NAMA	AGUS PURNOMO, SH, M.Si
2	NIP	19661206 198902 1 002	2	NIP	19720710 199803 1 010
3	PANGKAT/GOL. RUANG	Pembina Utama Muda (IV/c)	3	PANGKAT/GOL. RUANG	Pembina Utama Muda (IV/c)
4	JABATAN	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat	4	JABATAN	Sekretaris Daerah
5	UNIT KERJA	Sekretariat Daerah	5	UNIT KERJA	Sekretariat Daerah
<b>HASIL KERJA</b>					
NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A. UTAMA</b>					
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Terpenuhinya dokumen LPPD dan RLPPD Terlaksananya perumusan kebijakan dan monev pelaksanaan kebijakan di rentang koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra	Kuantitas Kuantitas Kuantitas Kuantitas Kuantitas Kuantitas	Persentase penyampaian dokumen LPPD dan RLPPD tepat waktu Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan Persentase kebijakan bidang tata pemerintahan yang ditetapkan Persentase kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditetapkan tepat waktu Persentase produk hukum yang ditetapkan tepat waktu Jumlah kebijakan di rentang koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra yang ditetapkan Jumlah monev kebijakan di rentang koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra	100% 70 Nilai 100% 100% 100% 11 Kebijakan 11 Monev
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Meningkatnya Implementasi SAKIP di Perangkat Daerah rentang koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra Meningkatnya capaian kinerja aparatur pada Bagian Tapem, Kesra, Hukum Meningkatnya Implementasi RB di rentang koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra	Kuantitas Kuantitas Kuantitas	Persentase OPD rentang koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra dengan Nilai SAKIP Minimal 80 Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Aparatur Persentase OPD rentang koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra dengan nilai RB minimal 50	14.29% 100% 51.43%
		Meningkatnya kepuasan pengguna layanan pada rentang koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra Meningkatnya pemenuhan standar pelayanan pada rentang koordinasi dan rentang koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra Meningkatnya tingkat kematangan indikator SPBE pada rentang koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra	Kuantitas Kuantitas Kuantitas Kuantitas	Indeks Kepuasan Layanan Barituan Hukum dan Penyusunan Perundang-undangan Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat Indeks Kepuasan Layanan Tata Pemerintahan Rata-rata nilai IPP Rentang Kendali dan Rentang Koordinasi Persentase tingkat kematangan indikator penilaian SPBE dengan kategori baik pada perangkat daerah pengampu rentang koordinasi dan rentang kendali Asisten Pemerintahan dan Kesra	93,88 Angka 85,97 Angka 80,03 Angka 3,21 Angka 56%
<b>B. TAMBAHAN</b>					
1	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI		Kuantitas Kuantitas Kuantitas		
2	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI		Kuantitas Kuantitas Kuantitas		
3	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI		Kuantitas Kuantitas Kuantitas		
<b>PERILAKU KERJA</b>					
1	Berorientasi Pelayanan Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan Melakukan perbaikan tiada henti			Ekspektasi Khusus Pimpinan :	
2	Akuntabel Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi			Ekspektasi Khusus Pimpinan :	

HASIL KERJA					
NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A. UTAMA</b>					
	Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien				
	Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan				
3	Kompeten				
	Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah			Ekspektasi Khusus Pimpinan :	
	Membantu orang lain belajar				
	Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik				
4	Harmonis				
	Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya			Ekspektasi Khusus Pimpinan :	
	Suka menolong orang lain				
	Membangun lingkungan kerja yang kondusif				
5	Loyal				
	Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah			Ekspektasi Khusus Pimpinan :	
	Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara				
	Menjaga rahasia jabatan dan negara				
6	Adaptif				
	Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan			Ekspektasi Khusus Pimpinan :	
	Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas				
	Bertindak proaktif				
7	Kolaboratif				
	Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi			Ekspektasi Khusus Pimpinan :	
	Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah				
	Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama				

Pejabat Yang Dinilai

  
Drs. PURWANTO, M.KP  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661206 198902 1 002

Jombang, 02 Januari 2023  
Pejabat Penilai Kinerja

  
AGUS PURWONO, SH, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19720710 199803 1 010

**SASARAN KINERJA PEGAWAI  
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF**

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

PERIODE PENILAIAN 02 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2023

NO	PEGAWAI YANG DINILAI		NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	Drs. WIGNYO HANDOKO, M.Si	1	NAMA	AGUS PURNOMO, SH, M.Si
2	NIP	19641211 199412 1 002	2	NIP	19720710 199803 1 010
3	PANGKAT/GOL. RUANG	Pembina Utama Muda (IV/c)	3	PANGKAT/GOL. RUANG	Pembina Utama Muda (IV/c)
4	JABATAN	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	4	JABATAN	Sekretaris Daerah
5	UNIT KERJA	Sekretariat Daerah	5	UNIT KERJA	Sekretariat Daerah

NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

A. UTAMA					
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Terlaksananya perumusan kebijakan dan monev pelaksanaan kebijakan di rentang koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Kuantitas	Persentase kebijakan bidang administrasi pembangunan yang ditetapkan tepat waktu	100%
			Kuantitas	Persentase kebijakan bidang perekonomian yang ditetapkan tepat waktu	100%
			Kuantitas	Persentase Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik Hingga Selesai Ada Pemenangnya	100%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Meningkatnya Implementasi SAKIP di Perangkat Daerah rentang koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Kuantitas	Persentase OPD rentang koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan dengan Nilai SAKIP Minimal 80	33,75%
			Kuantitas	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Aparatur	100%
			Kuantitas	Persentase OPD rentang koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan dengan nilai RB minimal 50	66,67%
3	Meningkatnya kualitas layanan	Meningkatnya kepuasan pengguna layanan pada rentang koordinasi dan rentang kendali Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Kuantitas	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Pembangunan	84,47 Angka
			Kuantitas	Indeks Kepuasan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	89,45 Angka
			Kuantitas	Indeks Kepuasan Layanan Perekonomian	86,88 Angka
		Kuantitas	Rata-rata nilai IPP Rentang Kendali dan Rentang Koordinasi Asisten perekonomian dan Pembangunan	3,33 Angka	
		Kuantitas	Persentase tingkat kematangan indikator penilaian SPBE dengan kategori baik pada perangkat daerah pengampu rentang koordinasi dan rentang kendali Asisten Perekonomian dan Pembangunan	60%	

B. TAMBAHAN					
1	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI		Kuantitas		
			Kuantitas		
			Kuantitas		
2	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI		Kuantitas		
			Kuantitas		
			Kuantitas		
3	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI		Kuantitas		
			Kuantitas		
			Kuantitas		

PERILAKU KERJA					
1	Berorientasi Pelayanan	Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat	Ekspektasi Khusus Pimpinan :		
		Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan			
		Melakukan perbaikan tiada henti			
2	Akuntabel	Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi	Ekspektasi Khusus Pimpinan :		
		Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien			
		Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan			
3	Kompeten	Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah	Ekspektasi Khusus Pimpinan :		
		Membantu orang lain belajar			
		Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik			

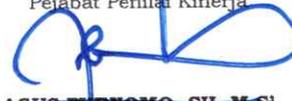
4	Harmonis	Ekspektasi Khusus Pimpinan :
	Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya	
	Suka menolong orang lain Membangun lingkungan kerja yang kondusif	
5	Loyal	Ekspektasi Khusus Pimpinan :
	Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah	
	Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara Menjaga rahasia jabatan dan negara	
6	Adaptif	Ekspektasi Khusus Pimpinan :
	Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan	
	Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas Bertindak proaktif	
7	Kolaboratif	Ekspektasi Khusus Pimpinan :
	Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi	
	Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah Mengerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	

Pegawai Yang Dinilai



**Drs. WIGNYO HANDOKO, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19641211 199412 1 002

Jombang, 3 Januari 2022  
Pejabat Penilai Kinerja



**AGUS PURNOMO, SH, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19720710 199803 1 010

**SASARAN KINERJA PEGAWAI  
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF  
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI**

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

PERIODE PENILAIAN 02 JANUARI S/D 31 DESEMBER 2023

NO		PEGAWAI YANG DINILAI		NO		PEJABAT PENILAI KINERJA	
1	NAMA	Dr. drg. SUBANDRIYAH, MKP		1	NAMA	AGUS PURNOMO, SH, M.Si	
2	NIP	19640316 198903 2 013		2	NIP	19720710 199803 1 010	
3	PANGKAT/GOL. RUANG	Pembina Utama Muda (IV/c)		3	PANGKAT/GOL. RUANG	Pembina Utama Muda (IV/c)	
4	JABATAN	Asisten Administrasi Umum		4	JABATAN	Sekretaris Daerah	
5	UNIT KERJA	Sekretariat Daerah		5	UNIT KERJA	Sekretariat Daerah	
HASIL KERJA							
NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
A. UTAMA							
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Terlaksananya perumusan kebijakan dan monev pelaksanaan kebijakan di rentang koordinasi Asisten Administrasi Umum	Kualitas	Persentase kebijakan bidang perencanaan dan keuangan yang disusun tepat waktu	100%		
			Kualitas	Persentase kebijakan bidang keorganisasian yang disusun tepat waktu	100%		
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Meningkatnya Implementasi SAKIP di Perangkat Daerah	Kualitas	Persentase OPD dengan Nilai SAKIP Minimal 80	47,17%		
			Kualitas	Persentase OPD rentang koordinasi Asisten Administrasi Umum dengan Nilai SAKIP Minimal 80	100%		
			Kualitas	Persentase peningkatan nilai SAKIP Setda	0,70%		
			Kualitas	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Aparatur	100%		
			Kualitas	Nilai PMPRB Pemda	69,20 Nilai		
			Kualitas	Jumlah unit kerja yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	3 unit kerja		
			Kualitas	Persentase OPD dengan Nilai Indeks Efektivitas dan Efisiensi OPD dengan kategori minimal Baik	100,00%		
			Kualitas	Persentase OPD dengan Tingkat Kematangan Tinggi	100,00%		
3	Meningkatnya kualitas layanan	Meningkatnya kepuasan pengguna layanan	Kuantitas	Nilai IKM Pemda	88,41 Angka		
			Kualitas	Nilai IKM Setda	87,35 Angka		
			Kualitas	Indeks Kepuasan Layanan Keprotokolan dan Komunikasi Pimpinan	85,83 Angka		
			Kualitas	Persentase pelayanan keprotokolan dan komunikasi kepala daerah/ wakil kepala daerah	100%		
			Kualitas	Indeks Kepuasan Layanan Umum	90,79 Angka		
			Kualitas	Indeks Kepuasan Layanan Perencanaan dan Keuangan	90 Angka		
			Kualitas	Indeks Kepuasan Layanan Organisasi	84,58 Angka		
			Kualitas	Nilai IPP Pemda	3,734 Angka		
	Meningkatnya pemenuhan standar pelayanan lingkup Pemda	Meningkatnya pemenuhan standar pelayanan pada rentang koordinasi dan rentang kendali Asisten Administrasi Umum	Kualitas	Presentase peningkatan pemenuhan pengadaan sarpras lingkup Setda	5%		
			Kualitas	Nilai IPP Setda	3,95 Angka		
			Kualitas	Rata-rata nilai IPP Rentang Kendali dan Rentang Koordinasi Asisten Administrasi Umum	3,25 Angka		
			Kualitas	Nilai Penilaian Mandiri SPBE	4,35 Angka		
	Meningkatnya indikator penilaian SPBE pada rentang koordinasi Asisten Administrasi Umum		Kualitas	Persentase tingkat kematangan indikator penilaian SPBE dengan kategori baik pada perangkat daerah pengampu rentang koordinasi dan rentang kendali Asisten Administrasi Umum	48%		

HASIL KERJA					
NO	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>A. UTAMA</b>					
<b>B. TAMBAHAN</b>					
1	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI		Kuantitas		
2	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI		Kuantitas		
3	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI		Kuantitas		
<b>PERILAKU KERJA</b>					
1	Berorientasi Pelayanan Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan Melakukan perbaikan tiada henti			Ekspektasi Khusus Pimpinan :	
2	Akuntabel Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan			Ekspektasi Khusus Pimpinan :	
3	Kompeten Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah Membantu orang lain belajar Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik			Ekspektasi Khusus Pimpinan :	
4	Harmonis Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya Suka menolong orang lain Membangun lingkungan kerja yang kondusif			Ekspektasi Khusus Pimpinan :	
5	Loyal Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara Menjaga rahasia jabatan dan negara			Ekspektasi Khusus Pimpinan :	
6	Adaptif Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas Bertindak proaktif			Ekspektasi Khusus Pimpinan :	
7	Kolaboratif Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah Mengerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama			Ekspektasi Khusus Pimpinan :	

Pegawai Yang Dinilai

  
Dr. drg. S. BANDRIYAH, MKP  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196403161989032013

Jombang, 02 Januari 2023  
Pejabat Penilai Kinerja

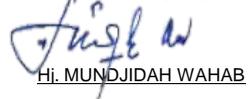
  
AGUS PURNOMO, SH, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197207101998031010

**RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2023**

1 NAMA : AGUS PURNOMO, SH, M.Si  
 2 NIP : 19720710 199803 1 010  
 3 PANGKAT/GOL. RUANG : Pembina Utama Muda (IV/c)  
 4 JABATAN : Sekretaris Daerah  
 5 UNIT KERJA : Sekretariat Daerah

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TRIBULAN 1		TRIBULAN 2		TRIBULAN 3		TRIBULAN 4	
			RENCANA AKSI	TARGET						
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai LPPD	1 Menyelia dan supervisi nilai LPPD	2 Dokumen	1 Menyelia dan supervisi nilai LPPD	- Dokumen	1 Menyelia dan supervisi nilai LPPD	- Dokumen	1 Menyelia dan supervisi nilai LPPD	- Dokumen
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP Pemda	1 Menyelia dan supervisi implementasi SAKIP Pemda	1 Dokumen	1 Menyelia dan supervisi implementasi SAKIP Pemda	1 Dokumen	1 Menyelia dan supervisi implementasi SAKIP Pemda	1 Dokumen	1 Menyelia dan supervisi implementasi SAKIP Pemda	1 Dokumen
		Nilai SAKIP Setda	2 Menyelia dan supervisi implementasi SAKIP di Lingkup Sekretariat Daerah	1 Dokumen	2 Menyelia dan supervisi implementasi SAKIP di Lingkup Sekretariat Daerah	1 Dokumen	2 Menyelia dan supervisi implementasi SAKIP di Lingkup Sekretariat Daerah	1 Dokumen	2 Menyelia dan supervisi implementasi SAKIP di Lingkup Sekretariat Daerah	1 Dokumen
		Presentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB	3 Menyelia dan supervisi implementasi RB	1 Dokumen	3 Menyelia dan supervisi implementasi RB	1 Dokumen	3 Menyelia dan supervisi implementasi RB	1 Dokumen	3 Menyelia dan supervisi implementasi RB	1 Dokumen
3	Meningkatnya kualitas layanan	Persentase peningkatan Nilai IKM Pemda	1 Menyelia dan supervisi pelaksanaan pelayanan publik dari aspek penerima layanan di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang	1 Dokumen	1 Menyelia dan supervisi pelaksanaan pelayanan publik dari aspek penerima layanan di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang	1 Dokumen	1 Menyelia dan supervisi pelaksanaan pelayanan publik dari aspek penerima layanan di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang	1 Dokumen	1 Menyelia dan supervisi pelaksanaan pelayanan publik dari aspek penerima layanan di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang	1 Dokumen
		Persentase peningkatan Nilai IPP Pemda	2 Menyelia dan supervisi pelaksanaan pelayanan publik dari aspek Pemberi layanan di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang	- Dokumen	2 Menyelia dan supervisi pelaksanaan pelayanan publik dari aspek Pemberi layanan di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang	1 Dokumen	2 Menyelia dan supervisi pelaksanaan pelayanan publik dari aspek Pemberi layanan di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang	- Dokumen	2 Menyelia dan supervisi pelaksanaan pelayanan publik dari aspek Pemberi layanan di lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang	1 Dokumen
4	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik	Persentase Kesesuaian penilaian mandiri SPBE dengan Indeks SPBE	1 Menyelia dan supervisi penyelenggaraan SPBE	- Dokumen	1 Menyelia dan supervisi penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	1 Menyelia dan supervisi penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen	1 Menyelia dan supervisi penyelenggaraan SPBE	1 Dokumen

Atasan Langsung



Hi. MUNDJIDAH WAHAB

 Jombang, 02 Januari 2023  
 Sekretaris Daerah



AGUS PURNOMO, SH, M.Si  
 NIP.19720710 199803 1 010

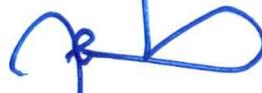
**RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2023**

- 1 NAMA : Drs. PURWANTO, M.KP
- 2 NIP : 196612061989021002
- 3 PANGKAT/GOL. RUANG : Pembina Utama Muda (IV/c)
- 4 JABATAN : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat
- 5 UNIT KERJA : Sekretariat Daerah

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TRIBUNAL 1		TRIBUNAL 2		TRIBUNAL 3		TRIBUNAL 4		
			RENCANA AKSI	TARGET	RENCANA AKSI	TARGET	RENCANA AKSI	TARGET	RENCANA AKSI	TARGET	
1	Terpenuhinya dokumen LPPD dan RLPPD	Persentase penyampaian dokumen LPPD dan RLPPD tepat waktu	1	Memberikan fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mengkoordinasikan penyusunan pemenuhan dokumen laporan LPPD dan RLPPD serta Melakukan evaluasi dokumen laporan LPPD dan RLPPD	1 kegiatan	1	Memberikan fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mengkoordinasikan penyusunan pemenuhan dokumen laporan LPPD dan RLPPD serta Melakukan evaluasi dokumen laporan LPPD dan RLPPD	0 kegiatan	1	Memberikan fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mengkoordinasikan penyusunan pemenuhan dokumen laporan LPPD dan RLPPD serta Melakukan evaluasi dokumen laporan LPPD dan RLPPD	0 kegiatan
			2	Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi nilai LPPD	1 kegiatan	2	Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi nilai LPPD	0 kegiatan	2	Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi nilai LPPD	0 kegiatan
2	Terlaksananya perumusan kebijakan dan move pelaksanaan kebijakan di rentang koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	1	Mengkoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan kecamatan	0 kegiatan	1	Mengkoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan kecamatan	0 kegiatan	1	Mengkoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan kecamatan	0 kegiatan
			2	Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi nilai sinergitas kinerja kecamatan	0 kegiatan	2	Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi nilai sinergitas kinerja kecamatan	0 kegiatan	2	Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi nilai sinergitas kinerja kecamatan	0 kegiatan
		Persentase kebijakan bidang tata pemerintahan yang ditetapkan	1	Mengkoordinasikan perumusan kebijakan yang diusulkan	1 kegiatan	2	Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi nilai indeks kepuasan layanan tata pemerintahan	0 kegiatan	2	Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi nilai indeks kepuasan layanan tata pemerintahan	0 kegiatan
			2	Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi nilai indeks kepuasan layanan tata pemerintahan	0 kegiatan	2	Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi nilai indeks kepuasan layanan tata pemerintahan	0 kegiatan	2	Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi nilai indeks kepuasan layanan tata pemerintahan	1 kegiatan
		Persentase kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditetapkan tepat waktu	3	Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi kebijakan yang ditetapkan dalam bidang kesejahteraan rakyat	1 kegiatan	3	Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi kebijakan yang ditetapkan dalam bidang kesejahteraan rakyat	1 kegiatan	3	Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi kebijakan yang ditetapkan dalam bidang kesejahteraan rakyat	1 kegiatan
		Persentase produk hukum yang ditetapkan tepat waktu	4	Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi implementasi Persentase produk hukum yang ditetapkan tepat waktu	1 kegiatan	4	Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi implementasi Persentase produk hukum yang ditetapkan tepat waktu	1 kegiatan	4	Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi implementasi Persentase produk hukum yang ditetapkan tepat waktu	1 kegiatan
		Jumlah kebijakan di rentang koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra yang ditetapkan	5	Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi kebijakan di rentang koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra yang ditetapkan	0 kegiatan	5	Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi kebijakan di rentang koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra yang ditetapkan	1 kegiatan	5	Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi kebijakan di rentang koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra yang ditetapkan	1 kegiatan
		Jumlah move kebijakan di rentang koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra	6	Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi move kebijakan di rentang koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra	0 kegiatan	6	Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi move kebijakan di rentang koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra	1 kegiatan	6	Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi move kebijakan di rentang koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra	1 kegiatan
3	Meningkatnya Implementasi SAKIP di Perangkat Daerah rentang koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra dengan Nilai SAKIP Minimal 80	Persentase OPD rentang koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra dengan Nilai SAKIP Minimal 80	1	Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi Implementasi SAKIP di Perangkat Daerah rentang koordinasi Asisten Pemerintah dan Kesra	0 kegiatan	1	Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi Implementasi SAKIP di Perangkat Daerah rentang koordinasi Asisten Pemerintah dan Kesra	1 kegiatan	1	Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi Implementasi SAKIP di Perangkat Daerah rentang koordinasi Asisten Pemerintah dan Kesra	1 kegiatan
			1	Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi capaian kinerja aparatur pada Bagian Tapem, Kesra, Hukum	1 kegiatan	1	Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi capaian kinerja aparatur pada Bagian Tapem, Kesra, Hukum	1 kegiatan	1	Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi capaian kinerja aparatur pada Bagian Tapem, Kesra, Hukum	1 kegiatan
4	Meningkatnya capaian kinerja aparatur pada Bagian Tapem, Kesra, Hukum	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Aparatur	1	Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi capaian kinerja aparatur pada Bagian Tapem, Kesra, Hukum	1 kegiatan	1	Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi capaian kinerja aparatur pada Bagian Tapem, Kesra, Hukum	1 kegiatan	1	Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi capaian kinerja aparatur pada Bagian Tapem, Kesra, Hukum	1 kegiatan
5	Meningkatnya Implementasi RB di rentang koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra	Persentase OPD rentang koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra dengan nilai RB minimal 50	1	Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi Implementasi RB di rentang koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra	0 kegiatan	1	Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi Implementasi RB di rentang koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra	1 kegiatan	1	Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi Implementasi RB di rentang koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra	1 kegiatan

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TRIBUNAL 1		TRIBUNAL 2		TRIBUNAL 3		TRIBUNAL 4	
			RENCANA AKSI	TARGET						
6	Meningkatnya kepuasan pengguna layanan pada rentang koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra	Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum dan Penyusunan Perundang - undangan	1 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi implementasi Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum dan Penyusunan Perundang - undangan	1 kegiatan	2 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi implementasi Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum dan Penyusunan Perundang - undangan	1 kegiatan	2 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi implementasi Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum dan Penyusunan Perundang - undangan	1 kegiatan	2 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi implementasi Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum dan Penyusunan Perundang - undangan	1 kegiatan
		Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat	2 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi implementasi Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat	1 kegiatan	3 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi implementasi Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat	1 kegiatan	3 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi implementasi Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat	1 kegiatan	3 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi implementasi Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat	1 kegiatan
		Indeks Kepuasan Layanan Tata Pemerintahan	3 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi implementasi Indeks Kepuasan Layanan Tata Pemerintahan	1 kegiatan	4 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi implementasi Indeks Kepuasan Layanan Tata Pemerintahan	1 kegiatan	4 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi implementasi Indeks Kepuasan Layanan Tata Pemerintahan	1 kegiatan	4 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi implementasi Indeks Kepuasan Layanan Tata Pemerintahan	1 kegiatan
7	Meningkatnya pemenuhan standar pelayanan pada rentang koordinasi dan rentang koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra	Rata-rata nilai IPP Rentang Kendali dan Rentang Koordinasi	1 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi pemenuhan standar pelayanan pada rentang koordinasi dan rentang kendali Asisten Pemerintahan dan Kesra	0 kegiatan	1 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi pemenuhan standar pelayanan pada rentang koordinasi dan rentang kendali Asisten Pemerintahan dan Kesra	1 kegiatan	1 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi pemenuhan standar pelayanan pada rentang koordinasi dan rentang kendali Asisten Pemerintahan dan Kesra	1 kegiatan	1 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi pemenuhan standar pelayanan pada rentang koordinasi dan rentang kendali Asisten Pemerintahan dan Kesra	1 kegiatan
			2 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi pemenuhan standar pelayanan pada rentang koordinasi dan rentang kendali Asisten Pemerintahan dan Kesra dari aspek nilai IPP Rentang Kendali dan Rentang Koordinasi	0 kegiatan	2 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi pemenuhan standar pelayanan pada rentang koordinasi dan rentang kendali Asisten Pemerintahan dan Kesra dari aspek nilai IPP Rentang Kendali dan Rentang Koordinasi	1 kegiatan	2 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi pemenuhan standar pelayanan pada rentang koordinasi dan rentang kendali Asisten Pemerintahan dan Kesra dari aspek nilai IPP Rentang Kendali dan Rentang Koordinasi	1 kegiatan	2 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi pemenuhan standar pelayanan pada rentang koordinasi dan rentang kendali Asisten Pemerintahan dan Kesra dari aspek nilai IPP Rentang Kendali dan Rentang Koordinasi	1 kegiatan
8	Meningkatnya tingkat kematangan indikator penilaian SPBE pada rentang koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra	Persentase tingkat kematangan indikator penilaian SPBE dengan kategori baik pada perangkat daerah pengampu rentang koordinasi dan rentang kendali Asisten Pemerintahan dan Kesra	1 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi indikator penilaian SPBE pada rentang koordinasi Asisten Pemerintah dan Kesra	0 kegiatan	1 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi indikator penilaian SPBE pada rentang koordinasi Asisten Pemerintah dan Kesra	1 kegiatan	1 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi indikator penilaian SPBE pada rentang koordinasi Asisten Pemerintah dan Kesra	1 kegiatan	1 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi indikator penilaian SPBE pada rentang koordinasi Asisten Pemerintah dan Kesra	1 kegiatan

Atasan Langsung



Agus PURNOMO, SH, M.Si  
NIP.197207101998031010

Jember, 02 Januari 2023  
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat

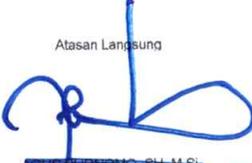


Drs. PURWANTO, M.KP  
NIP.196612061989021002

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

- 1 NAMA : Drs. WIGNYO HANDOKO, M.Si
- 2 NIP : 19641211 199412 1 002
- 3 PANGKAT/GOL. RUANG : Pembina Utama Muda (IV/c)
- 4 JABATAN : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
- 5 UNIT KERJA : Sekretariat Daerah

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TRIBUNAL 1		TRIBUNAL 2		TRIBUNAL 3		TRIBUNAL 4					
			RENCANA AKSI	TARGET	RENCANA AKSI	TARGET	RENCANA AKSI	TARGET	RENCANA AKSI	TARGET				
1	Terlaksananya perumusan kebijakan dan move pelaksanaan kebijakan di rentang koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Persentase kebijakan bidang administrasi pembangunan yang ditetapkan tepat waktu	1	Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi kebijakan bidang administrasi pembangunan	1	Kegiatan	1	Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi kebijakan bidang administrasi pembangunan	1	Kegiatan	1	Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi kebijakan bidang administrasi pembangunan	1	Kegiatan
		Persentase kebijakan bidang perekonomian yang ditetapkan tepat waktu	2	Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi kebijakan bidang perekonomian yang ditetapkan tepat waktu	1	Kegiatan	2	Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi kebijakan bidang perekonomian yang ditetapkan tepat waktu	1	Kegiatan	2	Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi kebijakan bidang perekonomian yang ditetapkan tepat waktu	1	Kegiatan
		Persentase Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik Hingga Selesai Ada Pemenangannya	3	Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Hingga Selesai Ada Pemenangannya	1	Kegiatan	3	Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Hingga Selesai Ada Pemenangannya	1	Kegiatan	3	Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Hingga Selesai Ada Pemenangannya	1	Kegiatan
2	Meningkatnya Implementasi SAKIP di Perangkat Daerah rentang koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Persentase OPD rentang koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan dengan Nilai SAKIP Minimal 80	1	Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi Implementasi SAKIP di Perangkat Daerah rentang koordinasi Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan	1	Kegiatan	1	Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi Implementasi SAKIP di Perangkat Daerah rentang koordinasi Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan	1	Kegiatan	2	Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi Implementasi SAKIP di Perangkat Daerah rentang koordinasi Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan	1	Kegiatan
3	Meningkatnya capaian kinerja aparatur pada Bagian Perekonomian, AP, PBJ	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Aparatur	1	Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi implementasi capaian kinerja aparatur pada Bagian Perekonomian, Bagian Administrasi Pembangunan dan Bagian PBJ	1	Kegiatan	1	Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi implementasi capaian kinerja aparatur pada Bagian Perekonomian, Bagian Administrasi Pembangunan dan Bagian PBJ	1	Kegiatan	1	Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi implementasi capaian kinerja aparatur pada Bagian Perekonomian, Bagian Administrasi Pembangunan dan Bagian PBJ	1	Kegiatan
4	Meningkatnya Implementasi RB di rentang koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Persentase OPD rentang koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan dengan nilai RB minimal 50	1	Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi Implementasi RB di rentang koordinasi Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan	1	Kegiatan	1	Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi Implementasi RB di rentang koordinasi Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan	1	Kegiatan	1	Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi Implementasi RB di rentang koordinasi Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan	1	Kegiatan
5	Meningkatnya kepuasan pengguna layanan pada rentang koordinasi dan rentang kendali Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Pembangunan	1	Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Pembangunan	1	Kegiatan	1	Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Pembangunan	1	Kegiatan	1	Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Pembangunan	1	Kegiatan
		Indeks Kepuasan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	2	Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi Indeks Kepuasan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	1	Kegiatan	2	Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi Indeks Kepuasan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	1	Kegiatan	2	Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi Indeks Kepuasan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	1	Kegiatan
		Indeks Kepuasan Layanan Perekonomian	3	Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi Indeks Kepuasan Layanan Perekonomian	1	Kegiatan	3	Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi Indeks Kepuasan Layanan Perekonomian	1	Kegiatan	3	Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi Indeks Kepuasan Layanan Perekonomian	1	Kegiatan
6	Meningkatnya pemenuhan standar pelayanan pada rentang koordinasi dan rentang kendali Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Rata-rata nilai IPP Rentang Kendali dan Rentang Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan	4	Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi pemenuhan standar pelayanan pada rentang koordinasi dan rentang kendali Asisten Perekonomian dan Pembangunan dari aspek nilai IPP Rentang Kendali dan Rentang Koordinasi	0	Kegiatan	4	Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi pemenuhan standar pelayanan pada rentang koordinasi dan rentang kendali Asisten Perekonomian dan Pembangunan dari aspek nilai IPP Rentang Kendali dan Rentang Koordinasi	1	Kegiatan	4	Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi pemenuhan standar pelayanan pada rentang koordinasi dan rentang kendali Asisten Perekonomian dan Pembangunan dari aspek nilai IPP Rentang Kendali dan Rentang Koordinasi	1	Kegiatan
7	Meningkatnya indikator penilaian SPBE pada rentang koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Persentase tingkat kematangan indikator penilaian SPBE dengan kategori baik pada perangkat daerah pengampu rentang koordinasi dan rentang kendali Asisten Perekonomian dan Pembangunan	1	Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi indikator penilaian SPBE pada rentang koordinasi Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan	0	Kegiatan	1	Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi indikator penilaian SPBE pada rentang koordinasi Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan	1	Kegiatan	1	Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi indikator penilaian SPBE pada rentang koordinasi Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan	1	Kegiatan

Atasan Langsung  
  
 Agus Purnomo, SH, M.Si  
 NIP.19720710 199803 1 010

Jombang, 02 Januari 2023  
 Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
  
 Drs. WIGNYO HANDOKO, M.Si  
 NIP.19641211 199412 1 002

RENCANA AKSI PERCAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

- 1. NAMA : Dr. dg. SUBANDRIYAH, MKP
- 2. NIP : 195403101986032013
- 3. FUNKSI/TUGAS, RUANG : Pembina Utama Muda (PUM)
- 4. JABATAN : Asisten Administrasi Umum
- 5. UNIT KERJA : Sekastat Daerah

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TRIBUNAL 1		TRIBUNAL 2		TRIBUNAL 3		TRIBUNAL 4	
			RENCANA AKSI		RENCANA AKSI		RENCANA AKSI		RENCANA AKSI	
				TARGET		TARGET		TARGET		TARGET
1	Terlaksananya perumusan kebijakan dan monitoring pelaksanaan kebijakan di tingkat koordinasi Asisten Administrasi Umum	Persentase kebijakan bidang perencanaan dan keuangan yang disetujui tepat waktu	1 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi implementasi kebijakan bidang kelembagaan dan analisa jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi yang ditetapkan	1 Kegiatan	1 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi implementasi kebijakan bidang kelembagaan dan analisa jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi yang ditetapkan	0 Kegiatan	1 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi implementasi kebijakan bidang kelembagaan dan analisa jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi yang ditetapkan	0 Kegiatan	1 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi implementasi kebijakan bidang kelembagaan dan analisa jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi yang ditetapkan	1 Kegiatan
		Persentase kebijakan bidang keorganisasian yang disetujui tepat waktu	2 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi implementasi dokumen monitoring dan evaluasi kebijakan bidang kelembagaan dan analisa jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi	1 Kegiatan	2 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi implementasi dokumen monitoring dan evaluasi kebijakan bidang kelembagaan dan analisa jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi	1 Kegiatan	2 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi implementasi dokumen monitoring dan evaluasi kebijakan bidang kelembagaan dan analisa jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi	1 Kegiatan	2 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi implementasi dokumen monitoring dan evaluasi kebijakan bidang kelembagaan dan analisa jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi	1 Kegiatan
2	Meningkatnya Implementasi SAKIP di Perangkat Daerah	Persentase OPD dengan Nilai SAKIP Minimal 80	1 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi implementasi SAKIP	1 Kegiatan	1 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi implementasi SAKIP	1 Kegiatan	1 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi implementasi SAKIP	1 Kegiatan	1 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi implementasi SAKIP	1 Kegiatan
3	Meningkatnya Implementasi SAKIP di Perangkat Daerah rentang koordinasi Asisten Administrasi Umum	Persentase OPD rentang koordinasi Asisten Administrasi Umum dengan Nilai SAKIP Minimal 80	1 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi implementasi SAKIP di Perangkat Daerah rentang koordinasi Asisten Administrasi Umum	1 Kegiatan	1 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi implementasi SAKIP di Perangkat Daerah rentang koordinasi Asisten Administrasi Umum	1 Kegiatan	1 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi implementasi SAKIP di Perangkat Daerah rentang koordinasi Asisten Administrasi Umum	1 Kegiatan	1 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi implementasi SAKIP di Perangkat Daerah rentang koordinasi Asisten Administrasi Umum	1 Kegiatan
4	Meningkatnya Implementasi SAKIP di Setda	Persentase peningkatan nilai SAKIP Setda	1 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi implementasi SAKIP di lingkup Setda	1 Kegiatan	1 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi implementasi SAKIP di lingkup Setda	1 Kegiatan	1 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi implementasi SAKIP di lingkup Setda	1 Kegiatan	1 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi implementasi SAKIP di lingkup Setda	1 Kegiatan
5	Meningkatnya capaian kinerja aparatur pada Bagian Umum, Prokopen, Renklu, Organisasi	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Aparatur	1 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi implementasi capaian kinerja aparatur pada Bagian Umum, Prokopen, Renklu, Organisasi	1 Kegiatan	1 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi implementasi capaian kinerja aparatur pada Bagian Umum, Prokopen, Renklu, Organisasi	1 Kegiatan	1 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi implementasi capaian kinerja aparatur pada Bagian Umum, Prokopen, Renklu, Organisasi	1 Kegiatan	1 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi implementasi capaian kinerja aparatur pada Bagian Umum, Prokopen, Renklu, Organisasi	1 Kegiatan
6	Meningkatnya Implementasi RB di Kabupaten Jombang	Nilai PMPRB Penda	1 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi implementasi RB di lingkup Setda	1 Kegiatan	1 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi implementasi RB di lingkup Setda	1 Kegiatan	1 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi implementasi RB di lingkup Setda	1 Kegiatan	1 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi implementasi RB di lingkup Setda	1 Kegiatan
		Jumlah unit kerja yang mendapatkan predikat WSK/WBBM	2 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi pembangunan ZI menuju WSK/WBBM	0 Kegiatan	2 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi pembangunan ZI menuju WSK/WBBM	2 Kegiatan	2 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi pembangunan ZI menuju WSK/WBBM	1 Kegiatan	2 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi pembangunan ZI menuju WSK/WBBM	1 Kegiatan
		Persentase OPD dengan Nilai Indeks Efektivitas dan Efisiensi OPD dengan kategori minimal Baik	3 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi pelaksanaan pengukuran efektivitas dan efisiensi OPD	0 Kegiatan	3 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi pelaksanaan pengukuran efektivitas dan efisiensi OPD	1 Kegiatan	3 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi pelaksanaan pengukuran efektivitas dan efisiensi OPD	0 Kegiatan	3 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi pelaksanaan pengukuran efektivitas dan efisiensi OPD	0 Kegiatan
		Persentase OPD dengan Tingkat Kematangan Tinggi	4 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi penataan kelembagaan PD	0 Kegiatan	4 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi penataan kelembagaan PD	1 Kegiatan	4 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi penataan kelembagaan PD	0 Kegiatan	4 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi penataan kelembagaan PD	0 Kegiatan
7	Terlaksananya Implementasi RB di Sekastat Daerah	Nilai PMPRB Setda	1 mengkoordinasikan sosialisasi, penyusunan, dan verifikasi dokumen PMPRB	0 Kegiatan	1 mengkoordinasikan sosialisasi, penyusunan, dan verifikasi dokumen PMPRB	1 Kegiatan	1 mengkoordinasikan sosialisasi, penyusunan, dan verifikasi dokumen PMPRB	1 Kegiatan	1 mengkoordinasikan sosialisasi, penyusunan, dan verifikasi dokumen PMPRB	1 Kegiatan
8	Meningkatnya Implementasi RB di rentang koordinasi Asisten Administrasi Umum	Persentase OPD rentang koordinasi Asisten Administrasi Umum dengan nilai RB minimal 50	1 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi implementasi RB di rentang koordinasi Asisten Administrasi Umum	1 Kegiatan	1 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi implementasi RB di rentang koordinasi Asisten Administrasi Umum	1 Kegiatan	1 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi implementasi RB di rentang koordinasi Asisten Administrasi Umum	1 Kegiatan	1 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi implementasi RB di rentang koordinasi Asisten Administrasi Umum	1 Kegiatan
9	Meningkatnya kepuasan pengguna layanan lingkup Penda	Nilai IKM Penda	1 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi pelaksanaan pelayanan publik dari aspek penerima layanan	1 Kegiatan	1 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi pelaksanaan pelayanan publik dari aspek penerima layanan	1 Kegiatan	1 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi pelaksanaan pelayanan publik dari aspek penerima layanan	1 Kegiatan	1 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi pelaksanaan pelayanan publik dari aspek penerima layanan	1 Kegiatan
10	Meningkatnya kepuasan pengguna layanan pada rentang koordinasi dan rentang kendali Asisten Administrasi Umum	Nilai IKM Setda	1 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi kepuasan pengguna layanan pada rentang koordinasi dan rentang kendali Asisten Administrasi Umum	1 Kegiatan	1 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi kepuasan pengguna layanan pada rentang koordinasi dan rentang kendali Asisten Administrasi Umum	1 Kegiatan	1 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi kepuasan pengguna layanan pada rentang koordinasi dan rentang kendali Asisten Administrasi Umum	1 Kegiatan	1 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi kepuasan pengguna layanan pada rentang koordinasi dan rentang kendali Asisten Administrasi Umum	2 Kegiatan
		Indeks Kepuasan Layanan Keprrotokolan dan Komunikasi Pimpinan	2 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi pelayanan publik pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1 Kegiatan	2 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi pelayanan publik pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1 Kegiatan	2 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi pelayanan publik pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1 Kegiatan	2 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi pelayanan publik pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1 Kegiatan

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TRIBUNAL 1		TRIBUNAL 2		TRIBUNAL 3		TRIBUNAL 4					
			RENCANA AKSI	TARGET	RENCANA AKSI	TARGET	RENCANA AKSI	TARGET	RENCANA AKSI	TARGET				
		Pemertama pelayanan keprotokolan dan komunikasi kepala daerah/wakil kepala daerah	3	Mengkoordinasikan, menyetujui, dan supervisi pelayanan publik pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1	Kegiatan	3	Mengkoordinasikan, menyetujui, dan supervisi pelayanan publik pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1	Kegiatan	3	Mengkoordinasikan, menyetujui, dan supervisi pelayanan publik pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1	Kegiatan
		Indeks Kepuasan Layahan Umum	4	Mengkoordinasikan, menyetujui, dan supervisi pelayanan publik pada Bagian Umum	1	Kegiatan	4	Mengkoordinasikan, menyetujui, dan supervisi pelayanan publik pada Bagian Umum	1	Kegiatan	4	Mengkoordinasikan, menyetujui, dan supervisi pelayanan publik pada Bagian Umum	1	Kegiatan
		Indeks Kepuasan Layanan Perencanaan dan Keuangan	5	Mengkoordinasikan, menyetujui, dan supervisi pelayanan publik pada Bagian Perencanaan dan Keuangan	1	Kegiatan	5	Mengkoordinasikan, menyetujui, dan supervisi pelayanan publik pada Bagian Perencanaan dan Keuangan	2	Kegiatan	5	Mengkoordinasikan, menyetujui, dan supervisi pelayanan publik pada Bagian Perencanaan dan Keuangan	1	Kegiatan
		Indeks Kepuasan Layanan Organisasi	6	Mengkoordinasikan, menyetujui, dan supervisi pelayanan publik pada Bagian Organisasi	1	Kegiatan	6	Mengkoordinasikan, menyetujui, dan supervisi pelayanan publik pada Bagian Organisasi	1	Kegiatan	6	Mengkoordinasikan, menyetujui, dan supervisi pelayanan publik pada Bagian Organisasi	1	Kegiatan
11	Meningkatnya pemenuhan standar pelayanan lingkup Pemda	Nilai IPP Pemda	1	Mengkoordinasikan, menyetujui, dan supervisi pelaksanaan pelayanan publik dari aspek pemberi layanan	0	Kegiatan	1	Mengkoordinasikan, menyetujui, dan supervisi pelaksanaan pelayanan publik dari aspek pemberi layanan	1	Kegiatan	1	Mengkoordinasikan, menyetujui, dan supervisi pelaksanaan pelayanan publik dari aspek pemberi layanan	0	Kegiatan
		Persentase peningkatan pemenuhan kegiatan layanan lingkup Setda	1	Mengkoordinasikan, menyetujui, dan supervisi pelaksanaan pemenuhan pengadaan layanan lingkup setda	0	Kegiatan	1	Mengkoordinasikan, menyetujui, dan supervisi pelaksanaan pemenuhan pengadaan layanan lingkup setda	1	Kegiatan	1	Mengkoordinasikan, menyetujui, dan supervisi pelaksanaan pemenuhan pengadaan layanan lingkup setda	0	Kegiatan
12	Meningkatnya pemenuhan standar pelayanan pada rentang koordinasi dan rentang kendali Asisten Administrasi Umum	Nilai IPP Setda	1	Mengkoordinasikan, menyetujui, dan supervisi pemenuhan standar pelayanan pada rentang koordinasi dan rentang kendali Asisten Administrasi Umum	0	Kegiatan	1	Mengkoordinasikan, menyetujui, dan supervisi pemenuhan standar pelayanan pada rentang koordinasi dan rentang kendali Asisten Administrasi Umum	1	Kegiatan	1	Mengkoordinasikan, menyetujui, dan supervisi pemenuhan standar pelayanan pada rentang koordinasi dan rentang kendali Asisten Administrasi Umum	1	Kegiatan
		Rata-rata nilai IPP Rentang Kendali dan Rentang Koordinasi Asisten Administrasi Umum	2	Mengkoordinasikan, menyetujui, dan supervisi pemenuhan standar pelayanan pada rentang koordinasi dan rentang kendali Asisten Administrasi Umum dan aspek nilai IPP Rentang Kendali dan Rentang Koordinasi	0	Kegiatan	2	Mengkoordinasikan, menyetujui, dan supervisi pemenuhan standar pelayanan pada rentang koordinasi dan rentang kendali Asisten Administrasi Umum dan aspek nilai IPP Rentang Kendali dan Rentang Koordinasi	1	Kegiatan	2	Mengkoordinasikan, menyetujui, dan supervisi pemenuhan standar pelayanan pada rentang koordinasi dan rentang kendali Asisten Administrasi Umum dan aspek nilai IPP Rentang Kendali dan Rentang Koordinasi	1	Kegiatan
13	Meningkatnya implementasi SPBE di Kabupaten Jombang	Nilai Penilaian Mandiri SPBE	1	Mengkoordinasikan, menyetujui, dan supervisi pembangunan SPBE	1	Kegiatan	1	Mengkoordinasikan, menyetujui, dan supervisi pembangunan SPBE	1	Kegiatan	1	Mengkoordinasikan, menyetujui, dan supervisi pembangunan SPBE	1	Kegiatan
14	Meningkatnya indikator penilaian SPBE pada rentang koordinasi Asisten Administrasi Umum	Persentase tingkat kematangan indikator penilaian SPBE dengan kategori baik pada peringkat daerah pengampu rentang koordinasi dan rentang kendali Asisten	1	Mengkoordinasikan, menyetujui, dan supervisi indikator penilaian SPBE pada rentang koordinasi Asisten Administrasi Umum	1	Kegiatan	1	Mengkoordinasikan, menyetujui, dan supervisi indikator penilaian SPBE pada rentang koordinasi Asisten Administrasi Umum	1	Kegiatan	1	Mengkoordinasikan, menyetujui, dan supervisi indikator penilaian SPBE pada rentang koordinasi Asisten Administrasi Umum	1	Kegiatan

Atasan Langsung



**Atasan Langsung**  
NIP. 19730710 196603 1 010

Jombang, 02 Januari 2023  
Asisten Administrasi Umum



**Atasan Langsung**  
NIP. 19840316198403011

**MONEV RENCANA AKSI DAN PENCAPAIAN KINERJA  
TRIBUNAL IV TAHUN 2023**

- 1 NAMA : Drs. PURWANTO, M.KP  
 2 NIP : 196612061989021002  
 3 PANGKAT/GOL. RUANG : Pembina Utama Muda (IV/c)  
 4 JABATAN : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat  
 5 UNIT KERJA : Sekretariat Daerah

NO	KINERJA/RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI PENDUKUNG
1	Terpenuhinya dokumen LPPD dan RLPPD	Persentase penyampaian dokumen LPPD dan RLPPD tepat waktu	1 Memberikan fasilitasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mengkoordinasikan penyusunan pemenuhan dokumen laporan LPPD dan RLPPD serta Melakukan evaluasi dokumen laporan LPPD dan RLPPD	0 kegiatan	0	0%	dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	Hasil evaluasi dari timda Provinsi sudah ditindak lanjuti	<a href="https://cloud.jombangkab.go.id/upload/berkasbk/d/EbXitOuuIs3kO4MeoK86.pdf">https://cloud.jombangkab.go.id/upload/berkasbk/d/EbXitOuuIs3kO4MeoK86.pdf</a>
			2 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi nilai LPPD	0 kegiatan	0	0%			
2	Terlaksananya perumusan kebijakan dan monev pelaksanaan kebijakan di rentang koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	1 Mengkoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan kecamatan	0 kegiatan	0	0%	dilaksanakan sesuai dengan perencanaan		<a href="https://cloud.jombangkab.go.id/upload/berkasbk/d/oIW8O44kYsiYQwWfZiU.pdf">https://cloud.jombangkab.go.id/upload/berkasbk/d/oIW8O44kYsiYQwWfZiU.pdf</a>
			2 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi nilai sinergitas kinerja kecamatan	0 kegiatan	0	0%			
		Persentase kebijakan bidang tata pemerintahan yang ditetapkan	1 Mengkoordinasikan perumusan kebijakan yang diusulkan	0 kegiatan	0	0%	dilaksanakan sesuai dengan perencanaan		<a href="https://cloud.jombangkab.go.id/upload/berkasbk/d/LhittQRHV3fNTsEvdB8L.pdf">https://cloud.jombangkab.go.id/upload/berkasbk/d/LhittQRHV3fNTsEvdB8L.pdf</a>
			2 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi nilai indeks kepuasan layanan tata pemerintahan	1 kegiatan	1	100%	dilaksanakan sesuai dengan perencanaan		<a href="https://cloud.jombangkab.go.id/upload/berkasbk/d/fRTKhEck74wFcybW8r3W.pdf">https://cloud.jombangkab.go.id/upload/berkasbk/d/fRTKhEck74wFcybW8r3W.pdf</a>
		Persentase kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditetapkan tepat waktu	3 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi kebijakan yang ditetapkan dalam bidang kesejahteraan rakyat	1 kegiatan	1	100%	dilaksanakan sesuai dengan perencanaan		<a href="https://cloud.jombangkab.go.id/upload/berkasbk/d/m450vcmOTbeRWnLCckfx.pdf">https://cloud.jombangkab.go.id/upload/berkasbk/d/m450vcmOTbeRWnLCckfx.pdf</a>
		Persentase produk hukum yang ditetapkan tepat waktu	4 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi implementasi Persentase produk hukum yang ditetapkan tepat waktu	1 kegiatan	1	100%	Telah Dilaksanakan sesuai target	Semua kegiatan dilaksanakan sesuai indikator kinerja dan target di Tribunalan	<a href="https://cloud.jombangkab.go.id/upload/berkasbk/d/BldzEX9usRWobXrA48nm.pdf">https://cloud.jombangkab.go.id/upload/berkasbk/d/BldzEX9usRWobXrA48nm.pdf</a>
		Jumlah kebijakan di rentang koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra yang ditetapkan	5 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi kebijakan di rentang koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra yang ditetapkan	1 kegiatan	1	100%	dilaksanakan sesuai dengan pentahapan		<a href="https://cloud.jombangkab.go.id/upload/berkasbk/d/h2rhqIQ8eutxoedyta6.pdf">https://cloud.jombangkab.go.id/upload/berkasbk/d/h2rhqIQ8eutxoedyta6.pdf</a>
Jumlah monev kebijakan di rentang koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra	6 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi monev kebijakan di rentang koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra	1 kegiatan	1	100%	dilaksanakan sesuai dengan pentahapan		<a href="https://cloud.jombangkab.go.id/upload/berkasbk/d/h2rhqIQ8eutxoedyta6.pdf">https://cloud.jombangkab.go.id/upload/berkasbk/d/h2rhqIQ8eutxoedyta6.pdf</a>		
3	Meningkatnya Implementasi SAKIP di Perangkat Daerah rentang koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra	Persentase OPD rentang koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra dengan Nilai SAKIP Minimal 80	1 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi Implementasi SAKIP di Perangkat Daerah rentang koordinasi Asisten Pemerintah dan Kesra	1 kegiatan	1	100%	dilaksanakan sesuai dengan pentahapan		<a href="https://cloud.jombangkab.go.id/upload/berkasbk/d/a3vt8VbD47mVhO2nsAa.pdf">https://cloud.jombangkab.go.id/upload/berkasbk/d/a3vt8VbD47mVhO2nsAa.pdf</a>
4	Meningkatnya capaian kinerja aparatur pada Bagian Tapem, Kesra, Hukum	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Aparatur	1 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi capaian kinerja aparatur pada Bagian Tapem, Kesra, Hukum	1 kegiatan	1	100%	telah terlaksana sesuai pentahapan		<a href="https://cloud.jombangkab.go.id/upload/berkasbk/d/3dkFibseI6Wta1sqo8DA.pdf">https://cloud.jombangkab.go.id/upload/berkasbk/d/3dkFibseI6Wta1sqo8DA.pdf</a>
5	Meningkatnya Implementasi RB di rentang koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra	Persentase OPD rentang koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra dengan nilai RB minimal 50	1 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi Implementasi RB di rentang koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra	1 kegiatan	1	100%	dilaksanakan sesuai dengan perencanaan		<a href="https://cloud.jombangkab.go.id/upload/berkasbk/d/OprVJugFXcyxQzVaOE7x.pdf">https://cloud.jombangkab.go.id/upload/berkasbk/d/OprVJugFXcyxQzVaOE7x.pdf</a>
6	Meningkatnya kepuasan pengguna layanan pada rentang koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra	Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum dan Penyusunan Perundang - undangan	2 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi implementasi Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum dan Penyusunan Perundang - undangan	1 kegiatan	1	100%	dilaksanakan sesuai dengan perencanaan		<a href="https://cloud.jombangkab.go.id/upload/berkasbk/d/SMS1MYYHAYczuLYEDcV1.pdf">https://cloud.jombangkab.go.id/upload/berkasbk/d/SMS1MYYHAYczuLYEDcV1.pdf</a>
			3 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi implementasi Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat	1 kegiatan	1	100%	dilaksanakan sesuai dengan perencanaan		<a href="https://cloud.jombangkab.go.id/upload/berkasbk/d/V6jDIFPOAC3jczhcuNE.pdf">https://cloud.jombangkab.go.id/upload/berkasbk/d/V6jDIFPOAC3jczhcuNE.pdf</a>

		Indeks Kepuasan Layanan Tata Pemerintahan	4	Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi implementasi Indeks Kepuasan Layanan Tata Pemerintahan	1 kegiatan	1	100%	dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	<a href="https://cloud.jombangkab.go.id/upload/berkasbk/d/cpefqSuFfkxRo0kz2jiQ.pdf">https://cloud.jombangkab.go.id/upload/berkasbk/d/cpefqSuFfkxRo0kz2jiQ.pdf</a>	
7	Meningkatnya pemenuhan standar pelayanan pada	Rata-rata nilai IPP Rentang Kendali dan Rentang Koordinasi	1	Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi pemenuhan standar pelayanan pada rentang koordinasi dan rentang kendali Asisten Pemerintahan dan Kesra	1 kegiatan	1	100%	dilaksanakan sesuai dengan pentahapan	<a href="https://cloud.jombangkab.go.id/upload/berkasbk/d/Fei4jc7P8gf10D4A6bvx.pdf">https://cloud.jombangkab.go.id/upload/berkasbk/d/Fei4jc7P8gf10D4A6bvx.pdf</a>	
			2	Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi pemenuhan standar pelayanan pada rentang koordinasi dan rentang kendali Asisten Pemerintahan dan Kesra dari aspek nilai IPP Rentang Kendali dan Rentang Koordinasi	1 kegiatan	1	100%	dilaksanakan sesuai dengan pentahapan	<a href="https://cloud.jombangkab.go.id/upload/berkasbk/d/uRou2k4lGWZbEeFqreCE.pdf">https://cloud.jombangkab.go.id/upload/berkasbk/d/uRou2k4lGWZbEeFqreCE.pdf</a>	
8	Meningkatnya tingkat kematangan indikator SPBE pada rentang koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra	Persentase tingkat kematangan indikator penilaian SPBE dengan kategori baik pada perangkat daerah pengampu rentang koordinasi dan rentang kendali Asisten Pemerintahan dan Kesra	1	Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi indikator penilaian SPBE pada rentang koordinasi Asisten Pemerintah dan Kesra	1 kegiatan	1	100%	dilaksanakan sesuai dengan pentahapan	<a href="https://cloud.jombangkab.go.id/upload/berkasbk/d/5XurFszlYHSuDKSQR0.pdf">https://cloud.jombangkab.go.id/upload/berkasbk/d/5XurFszlYHSuDKSQR0.pdf</a>	
<b>RATA-RATA CAPAIAN</b>							<b>100%</b>			

Atasan Langsung



AGUS PURNOMO, SH, M.Si  
NIP. 197007101998031000

Jombang, 02 Januari 2024

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat



Drs. PURWANTO, M.KP  
NIP. 196612061989021002

**MONEV RENCANA AKSI DAN PENCAPAIAN KINERJA  
TRIBUNAL IV TAHUN 2023**

- 1 NAMA : Drs. WIGNYO HANDOKO, M.Si  
 2 NIP : 19641211 199412 1 002  
 3 PANGKAT/GOL. RUANG : Pembina Utama Muda (IV/c)  
 4 JABATAN : Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
 5 UNIT KERJA : Sekretariat Daerah

NO	KINERJA/RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI PENDUKUNG
1	Terlaksananya perumusan kebijakan dan monev pelaksanaan kebijakan di rentang koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Persentase kebijakan bidang administrasi pembangunan yang ditetapkan tepat waktu	1 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi kebijakan bidang administrasi pembangunan	1 Kegiatan	1	100%	Telah dilaksanakan pembahasan bersama Tim Penyusun SBU, sehingga dapat digunakan OPD untuk menyusun kegiatan pelaksanaan pembangunan di SIPD RI	Koordinasi dengan OPD untuk menyusun perubahan pada perumusan kebijakan dalam penyusunan SBU dan Pedum APBD	<a href="https://cloud.jombangkab.go.id/upload/berkasbkd/uvZHWNcN5J0zFd14KmOw.pdf">https://cloud.jombangkab.go.id/upload/berkasbkd/uvZHWNcN5J0zFd14KmOw.pdf</a>
		Persentase kebijakan bidang perekonomian yang ditetapkan tepat waktu	2 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi kebijakan bidang perekonomian yang ditetapkan tepat waktu	1 Kegiatan	1	100%	- Rumusan kebijakan terkait Draf SE perbitan surat rekomendasi belanja BBM bersubsidi. - Rumusan kebijakan terkait draf Perbup Kurda 2023 dan draft SE pengguna minuman TIBER dari Perumda Air Minum Tirta Kencana.	sebagai bahan evaluasi	<a href="https://cloud.jombangkab.go.id/upload/berkasbkd/5WotGx12yZytmM1iP1z.pdf">https://cloud.jombangkab.go.id/upload/berkasbkd/5WotGx12yZytmM1iP1z.pdf</a>
		Persentase Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik Hingga Selesai Ada Pemenangnya	3 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Hingga Selesai Ada Pemenangnya	1 Kegiatan	1	100%	Telah dilaksanakan sesuai target	Semua kegiatan dilaksanakan sesuai indikator kinerja dan target	<a href="https://cloud.jombangkab.go.id/upload/berkasbkd/11qKW1aRbmS0JaSUzn17.pdf">https://cloud.jombangkab.go.id/upload/berkasbkd/11qKW1aRbmS0JaSUzn17.pdf</a>
2	Meningkatnya Implementasi SAKIP di Perangkat Daerah rentang koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Persentase OPD rentang koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan dengan Nilai SAKIP Minimal 80	1 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi Implementasi SAKIP di Perangkat Daerah rentang koordinasi Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan	2 Kegiatan	2	100%	Dilaksanakan evaluasi dan pengumpulan data	Koordinasi dengan OPD untuk melengkapi dokumen yang harus dibuat.	<a href="https://cloud.jombangkab.go.id/upload/berkasbkd/b04gZqhzOmwHYMDeFke.pdf">https://cloud.jombangkab.go.id/upload/berkasbkd/b04gZqhzOmwHYMDeFke.pdf</a>
3	Meningkatnya capaian kinerja aparatur pada Bagian Perekonomian, AP, PBJ	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Aparatur	1 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi implementasi capaian kinerja aparatur pada Bagian Perekonomian, Bagian Administrasi Pembangunan dan Bagian PBJ	1 Kegiatan	1	100%	telah terlaksana sesuai pentahapan		<a href="https://cloud.jombangkab.go.id/upload/berkasbkd/MyMSnocNjxlKYYMn5ZMe.pdf">https://cloud.jombangkab.go.id/upload/berkasbkd/MyMSnocNjxlKYYMn5ZMe.pdf</a>
4	Meningkatnya Implementasi RB di rentang koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Persentase OPD rentang koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan dengan nilai RB minimal 50	1 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi Implementasi RB di rentang koordinasi Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan	1 Kegiatan	1	100%	Data hasil penilaian RB OPD rentang kendali Asisten II	Sebagai bahan evaluasi Tahun 2023	<a href="https://cloud.jombangkab.go.id/upload/berkasbkd/OHdRve0umYnsVH52TByQ.pdf">https://cloud.jombangkab.go.id/upload/berkasbkd/OHdRve0umYnsVH52TByQ.pdf</a>
5	Meningkatnya kepuasan pengguna layanan pada rentang koordinasi dan rentang kendali Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Pembangunan	1 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Pembangunan	1 Kegiatan	1	100%	dilaksanakan sesuai pentahapan	Berdasarkan hasil koordinasi dilaksanakan setiap bulan	<a href="https://cloud.jombangkab.go.id/upload/berkasbkd/d6n8zLoib0gdxCrjAcMI.pdf">https://cloud.jombangkab.go.id/upload/berkasbkd/d6n8zLoib0gdxCrjAcMI.pdf</a>
		Indeks Kepuasan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	2 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi Indeks Kepuasan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	1 Kegiatan	1	100%	Kegiatan survey Indeks Kepuasan Masyarakat masih dalam tahapan proses berjalan pada tribulan III dan	Indeks Kepuasan Masyarakat baru dapat terukur pada tribulan IV	<a href="https://cloud.jombangkab.go.id/upload/berkasbkd/tg1ZEKAviikPnGX90taL.pdf">https://cloud.jombangkab.go.id/upload/berkasbkd/tg1ZEKAviikPnGX90taL.pdf</a>
		Indeks Kepuasan Layanan Perekonomian	3 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi Indeks Kepuasan Layanan Perekonomian	1 Kegiatan	1	100%	Data survei kepuasan masyarakat Bagian Perekonomian	sebagai bahan evaluasi tahun 2023	<a href="https://drive.google.com/file/d/15df43aBukomdn0IRpaoHlpPg3mb2_uvR/view?usp=drive_link">https://drive.google.com/file/d/15df43aBukomdn0IRpaoHlpPg3mb2_uvR/view?usp=drive_link</a>

6	Meningkatnya pemenuhan standar pelayanan pada rentang koordinasi dan rentang kendali Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Rata-rata nilai IPP Rentang Kendali dan Rentang Koordinasi Asisten perekonomian dan Pembangunan	4	Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi pemenuhan standar pelayanan pada rentang koordinasi dan rentang kendali Asisten Perekonomian dan Pembangunan dari aspek nilai IPP Rentang Kendali dan Rentang Koordinasi	1 Kegiatan	1	100%	dilaksanakan sesuai pentahapan	Koordinasi dengan OPD Renkon Asisten II	<a href="https://cloud.jombangkab.go.id/upload/berkasbkd/kUEm6lechDayOPGJXCDI.pdf">https://cloud.jombangkab.go.id/upload/berkasbkd/kUEm6lechDayOPGJXCDI.pdf</a>	
7	Meningkatnya indikator penilaian SPBE pada rentang koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Persentase tingkat kematangan indikator penilaian SPBE dengan kategori baik pada perangkat daerah pengampu rentang koordinasi dan rentang kendali Asisten Perekonomian dan Pembangunan	1	Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi indikator penilaian SPBE pada rentang koordinasi Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan	1 Kegiatan	1	100%	dilaksanakan sesuai pentahapan		<a href="https://cloud.jombangkab.go.id/upload/berkasbkd/aYVbmK11c5KDyVvFD4zQ.pdf">https://cloud.jombangkab.go.id/upload/berkasbkd/aYVbmK11c5KDyVvFD4zQ.pdf</a>	
<b>RATA-RATA CAPAIAN</b>							<b>100%</b>				

Atasan Langsung

AGUS PURNOMO, SH, M.Si.  
NIP. 197007101998031000

Jombang, 02 Januari 2024  
Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Drs. WIGNYO HANDOKO, M.Si  
NIP.196412111994121002

**MONEV RENCANA AKSI DAN PENCAPAIAN KINERJA  
TRIBUNAL IV TAHUN 2023**

- 1 NAMA : Dr. drg. SUBANDRIYAH, MKP  
 2 NIP : 196403161989032013  
 3 PANGKAT/GOL. RUANG : Pembina Utama Muda (IV/c)  
 4 JABATAN : Asisten Administrasi Umum  
 5 UNIT KERJA : Sekretariat Daerah

NO	KINERJA/RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	RENCANA AKSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	CATATAN MONEV	TINDAK LANJUT	BUKTI PENDUKUNG
1	Terlaksananya perumusan kebijakan dan monev pelaksanaan kebijakan di rentang koordinasi Asisten Administrasi Umum	Persentase kebijakan bidang perencanaan dan keuangan yang disusun tepat waktu	1 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi implementasi kebijakan bidang kelembagaan dan analisa jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi yang ditetapkan	1 Kegiatan	1	100%	kegiatan dilaksanakan sesuai dengan pentahapan dan perencanaan	akan dilakukan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan	<a href="https://cloud.jombangkab.go.id/upload/be_rkasbkd/qgfd0sO2TheekwrioJNQ.pdf">https://cloud.jombangkab.go.id/upload/be_rkasbkd/qgfd0sO2TheekwrioJNQ.pdf</a>
		Persentase kebijakan bidang keorganisasian yang disusun tepat waktu	2 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi implementasi dokumen monitoring dan evaluasi kebijakan bidang kelembagaan dan analisa jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta kinerja dan reformasi birokrasi	1 Kegiatan	1	100%	dilakukan evaluasi supervisi implementasi dokumen monitoring, kebijakan bidang kelembagaan dan analisa jabatan, pelayanan publik dan tata laksana dan reformasi birokrasi		<a href="https://cloud.jombangkab.go.id/upload/be_rkasbkd/kCEpnT9Uf8Z4xiM5cru.pdf">https://cloud.jombangkab.go.id/upload/be_rkasbkd/kCEpnT9Uf8Z4xiM5cru.pdf</a>
2	Meningkatnya Implementasi SAKIP di Perangkat Daerah	Persentase OPD dengan Nilai SAKIP Minimal 80	1 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi implementasi SAKIP	1 Kegiatan	1	100%	dilakukan evaluasi perkembangan SAKIP, pengusulan ZI dan reformasi birokrasi	dilakukan evaluasi untuk penyusunan dokumen SAKIP	<a href="https://cloud.jombangkab.go.id/upload/be_rkasbkd/JLwxMhgw06JV6YAA5Surc.pdf">https://cloud.jombangkab.go.id/upload/be_rkasbkd/JLwxMhgw06JV6YAA5Surc.pdf</a>
3	Meningkatnya Implementasi SAKIP di Perangkat Daerah rentang koordinasi Asisten Administrasi Umum	Persentase OPD rentang koordinasi Asisten Administrasi Umum dengan Nilai SAKIP Minimal 80	1 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi Implementasi SAKIP di Perangkat Daerah rentang koordinasi Asisten Administrasi Umum	1 Kegiatan	1	100%	telah dilaksanakan sesuai rencana		<a href="https://cloud.jombangkab.go.id/upload/be_rkasbkd/eXixxbgxulyk87TYIGYL.pdf">https://cloud.jombangkab.go.id/upload/be_rkasbkd/eXixxbgxulyk87TYIGYL.pdf</a>
4	Meningkatnya implementasi SAKIP di Setda	Persentase peningkatan nilai SAKIP Setda	1 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi implementasi SAKIP di lingkup Setda	1 Kegiatan	1	100%	telah dilaksanakan sesuai rencana		<a href="https://cloud.jombangkab.go.id/upload/be_rkasbkd/JLwxMhgw06JV6YAA5Surc.pdf">https://cloud.jombangkab.go.id/upload/be_rkasbkd/JLwxMhgw06JV6YAA5Surc.pdf</a>
5	Meningkatnya capaian kinerja aparatur pada Bagian Umum, Prokopim, Renkeu, Organisasi	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Aparatur	1 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi implementasi capaian kinerja aparatur pada Bagian Umum, Prokopim, Renkeu, Organisasi	1 Kegiatan	1	100%	telah dilaksanakan sesuai rencana		<a href="https://cloud.jombangkab.go.id/upload/be_rkasbkd/kEv2emXyгур2ZuMvPZ4g.pdf">https://cloud.jombangkab.go.id/upload/be_rkasbkd/kEv2emXyгур2ZuMvPZ4g.pdf</a>
6	Meningkatnya Implementasi RB di Kabupaten Jombang	Nilai PMPRB Pemda	1 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi implementasi RB di lingkup Setda	1 Kegiatan	1	100%	kegiatan dilaksanakan sesuai dengan pentahapan dan perencanaan	dilakukan evaluasi untuk penyusunan renja RB	<a href="https://cloud.jombangkab.go.id/upload/be_rkasbkd/wixWTKlUgAmpH2vVM0Mz.pdf">https://cloud.jombangkab.go.id/upload/be_rkasbkd/wixWTKlUgAmpH2vVM0Mz.pdf</a>
		Jumlah unit kerja yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	2 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	1 Kegiatan	1	100%	kegiatan dilaksanakan sesuai dengan pentahapan dan perencanaan		<a href="https://cloud.jombangkab.go.id/upload/be_rkasbkd/cb1pVgQaiiSk5gUjwxc.pdf">https://cloud.jombangkab.go.id/upload/be_rkasbkd/cb1pVgQaiiSk5gUjwxc.pdf</a>
		Persentase OPD dengan Nilai Indeks Efektivitas dan Efisiensi OPD dengan kategori minimal Baik	3 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi pelaksanaan pengukuran efektivitas dan efisiensi PD	0 Kegiatan	0	0%	kegiatan dilaksanakan sesuai dengan pentahapan dan perencanaan		<a href="https://cloud.jombangkab.go.id/upload/be_rkasbkd/PQZxh2tr2K6zEgDAFq6N.pdf">https://cloud.jombangkab.go.id/upload/be_rkasbkd/PQZxh2tr2K6zEgDAFq6N.pdf</a>
		Persentase OPD dengan Tingkat Kematangan Tinggi	4 Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi penataan kelembagaan PD	0 Kegiatan	0	0%	kegiatan dilaksanakan sesuai dengan pentahapan dan perencanaan		<a href="https://cloud.jombangkab.go.id/upload/be_rkasbkd/mqA3yKC5ThdfsB5Y2u0P.pdf">https://cloud.jombangkab.go.id/upload/be_rkasbkd/mqA3yKC5ThdfsB5Y2u0P.pdf</a>

7	Terlaksananya Implementasi RB di Sekretariat Daerah	Nilai PMPRB Setda	1	mengkoordinasikan sosialisasi, penyusunan, dan verifikasi dokumen PMPRB	1	Kegiatan	1	100%	kegiatan dilaksanakan sesuai dengan pentahapan dan perencanaan	dilakukan evaluasi untuk penyusunan dokumen PMPRB	<a href="https://cloud.jombangkab.go.id/upload/be_rkasbkd/yCr4t6owlfkUJUTxly.pdf">https://cloud.jombangkab.go.id/upload/be_rkasbkd/yCr4t6owlfkUJUTxly.pdf</a>
8	Meningkatnya Implementasi RB di rentang koordinasi Asisten Administrasi Umum	Persentase OPD rentang koordinasi Asisten Administrasi Umum dengan nilai RB minimal 50	1	Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi Implementasi RB di rentang koordinasi Asisten Administrasi Umum	1	Kegiatan	1	100%	kegiatan dilaksanakan sesuai dengan pentahapan dan perencanaan		<a href="https://cloud.jombangkab.go.id/upload/be_rkasbkd/wixWTklUgAmpH2vVMOMz.pdf">https://cloud.jombangkab.go.id/upload/be_rkasbkd/wixWTklUgAmpH2vVMOMz.pdf</a>
9	Meningkatnya kepuasan pengguna layanan lingkup Pemda	Nilai IKM Pemda	1	Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi pelaksanaan pelayanan publik dari aspek penerima layanan	1	Kegiatan	1	100%	kegiatan dilaksanakan sesuai dengan pentahapan dan perencanaan		<a href="https://cloud.jombangkab.go.id/upload/be_rkasbkd/9loVuznBIEN54fz3xL8q.pdf">https://cloud.jombangkab.go.id/upload/be_rkasbkd/9loVuznBIEN54fz3xL8q.pdf</a>
10	Meningkatnya kepuasan pengguna layanan pada rentang koordinasi dan rentang kendali Asisten Administrasi Umum	Nilai IKM Setda	1	Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi kepuasan pengguna layanan pada rentang koordinasi dan rentang kendali Asisten Administrasi Umum	2	Kegiatan	2	100%	kegiatan dilaksanakan sesuai dengan pentahapan dan perencanaan		<a href="https://cloud.jombangkab.go.id/upload/be_rkasbkd/Olq4E7Uu5eE2pO1FIknM.pdf">https://cloud.jombangkab.go.id/upload/be_rkasbkd/Olq4E7Uu5eE2pO1FIknM.pdf</a>
		Indeks Kepuasan Layanan Keprotokol dan Komunikasi Pimpinan	2	Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi pelayanan publik pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1	Kegiatan	1	100%	kegiatan dilaksanakan sesuai dengan pentahapan dan perencanaan	Semua kegiatan dilaksanakan sesuai indikator kinerja dan target	<a href="https://cloud.jombangkab.go.id/upload/be_rkasbkd/p70LHdygKsi9IHQJnnC.pdf">https://cloud.jombangkab.go.id/upload/be_rkasbkd/p70LHdygKsi9IHQJnnC.pdf</a>
		Persentase pelayanan keprotokol dan komunikasi kepala daerah/ wakil kepala daerah	3	Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi pelayanan publik pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1	Kegiatan	1	100%	kegiatan dilaksanakan sesuai dengan pentahapan dan perencanaan		<a href="https://cloud.jombangkab.go.id/upload/be_rkasbkd/v6j9M5HtV3Rlvr4oYtbU.pdf">https://cloud.jombangkab.go.id/upload/be_rkasbkd/v6j9M5HtV3Rlvr4oYtbU.pdf</a>
		Indeks Kepuasan Layanan Umum	4	Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi pelayanan publik pada Bagian Umum	1	Kegiatan	1	100%	Sesuai data pada survei kepuasan tribulan 1, hasil dari tribulan I masih 89,46 jauh dari hasil pada tahun 2022	Peningkatan pelayanan terus dilakukan dari aspek SDM dan sarana prasarana	<a href="https://cloud.jombangkab.go.id/upload/be_rkasbkd/hZysqbEnQJnJlmcLOM2V.pdf">https://cloud.jombangkab.go.id/upload/be_rkasbkd/hZysqbEnQJnJlmcLOM2V.pdf</a>
		Indeks Kepuasan Layanan Perencanaan dan Keuangan	5	Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi pelayanan publik pada Bagian Perencanaan dan Keuangan	1	Kegiatan	1	100%	kegiatan dilaksanakan sesuai dengan pentahapan dan perencanaan		<a href="https://cloud.jombangkab.go.id/upload/be_rkasbkd/wFXnY4VfnDWbNRsHEn1M.pdf">https://cloud.jombangkab.go.id/upload/be_rkasbkd/wFXnY4VfnDWbNRsHEn1M.pdf</a>
		Indeks Kepuasan Layanan Organisasi	6	Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi pelayanan publik pada Bagian Organisasi	1	Kegiatan	1	100%	kegiatan dilaksanakan sesuai dengan pentahapan dan perencanaan		<a href="https://cloud.jombangkab.go.id/upload/be_rkasbkd/xThYzUvTDdAHdX8ddrEp.pdf">https://cloud.jombangkab.go.id/upload/be_rkasbkd/xThYzUvTDdAHdX8ddrEp.pdf</a>
11	Meningkatnya pemenuhan standar pelayanan lingkup Pemda	Nilai IPP Pemda	1	Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi pelaksanaan pelayanan publik dari aspek pemberi layanan	1	Kegiatan	1	100%	kegiatan dilaksanakan sesuai dengan pentahapan dan perencanaan		<a href="https://cloud.jombangkab.go.id/upload/be_rkasbkd/s75DFPImhF3Y7ipCLV12.pdf">https://cloud.jombangkab.go.id/upload/be_rkasbkd/s75DFPImhF3Y7ipCLV12.pdf</a>
		Persentase peningkatan pemenuhan pengadaan sarpras lingkup Setda	1	Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi pelaksanaan pemenuhan pengadaan sarpras lingkup setda	1	Kegiatan	1	100%	Realisasi disesuaikan dengan kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana lingkup Setda	Menyesuaikan dengan kebutuhan	<a href="https://cloud.jombangkab.go.id/upload/be_rkasbkd/P6OTIIBSGXRjQ4RAgyJ.pdf">https://cloud.jombangkab.go.id/upload/be_rkasbkd/P6OTIIBSGXRjQ4RAgyJ.pdf</a>
12	Meningkatnya pemenuhan standar pelayanan pada rentang koordinasi dan rentang kendali Asisten Administrasi Umum	Nilai IPP Setda	1	Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi pemenuhan standar pelayanan pada rentang koordinasi dan rentang kendali Asisten Administrasi Umum	1	Kegiatan	1	100%	kegiatan dilaksanakan sesuai dengan pentahapan dan perencanaan		<a href="https://cloud.jombangkab.go.id/upload/be_rkasbkd/u5rA404gom8vpSym4tBn.pdf">https://cloud.jombangkab.go.id/upload/be_rkasbkd/u5rA404gom8vpSym4tBn.pdf</a>

		Rata-rata nilai IPP Rentang Kendali dan Rentang Koordinasi Asisten Administrasi Umum	2	Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi pemenuhan standar pelayanan pada rentang koordinasi dan rentang kendali Asisten Administrasi Umum dari aspek nilai IPP Rentang Kendali dan Rentang Koordinasi	1 Kegiatan	1	100%	kegiatan dilaksanakan sesuai dengan pentahapan dan perencanaan		<a href="https://cloud.jombangkab.go.id/upload/be_rkasbkd/H00ivKc1pciDiRmJcy3J.pdf">https://cloud.jombangkab.go.id/upload/be_rkasbkd/H00ivKc1pciDiRmJcy3J.pdf</a>
13	Meningkatnya Implementasi SPBE di Kabupaten Jombang	Nilai Penilaian Mandiri SPBE	1	Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi pembangunan SPBE	1 Kegiatan	1	100%	kegiatan dilaksanakan sesuai dengan pentahapan dan perencanaan		<a href="https://cloud.jombangkab.go.id/upload/be_rkasbkd/hhG0EZDQaNpynorWortO.pdf">https://cloud.jombangkab.go.id/upload/be_rkasbkd/hhG0EZDQaNpynorWortO.pdf</a>
14	Meningkatnya indikator penilaian SPBE pada rentang koordinasi Asisten Administrasi Umum	Persentase tingkat kematangan indikator penilaian SPBE dengan kategori baik pada perangkat daerah pengampu rentang koordinasi dan rentang kendali Asisten Administrasi Umum	1	Mengkoordinasikan, menyelia, dan supervisi indikator penilaian SPBE pada rentang koordinasi Asisten Administrasi Umum	1 Kegiatan	1	100%	kegiatan dilaksanakan sesuai dengan pentahapan dan perencanaan		<a href="https://cloud.jombangkab.go.id/upload/be_rkasbkd/WzzxWOpKM4nDydf2Wm0d.pdf">https://cloud.jombangkab.go.id/upload/be_rkasbkd/WzzxWOpKM4nDydf2Wm0d.pdf</a>
<b>RATA-RATA CAPAIAN</b>							100%			

Atasan Langsung

AGUS PURNOMO, SH, M.Si.  
NIP. 19720710 199803 1 010

Jombang, 02 Januari 2024  
Asisten Administrasi Umum

Dr. drg. SUBANDRIYAH, MKP  
NIP. 196403161989032013

**PENGUKURAN KINERJA  
TRIBUNAL IV TAHUN 2023**

1 NAMA : AGUS PURNOMO, SH, M.Si  
 2 NIP : 19720710 199803 1 010  
 3 PANGKAT/GOL. RUANG : Pembina Utama Muda (IV/c)  
 4 JABATAN : Sekretaris Daerah  
 5 UNIT KERJA : Sekretariat Daerah

NO	KINERJA/ RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	REALISASI s.d TRIBUNAL IV	CAPAIAN (%)	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN				PENJELASAN	ALTERNATIF/ UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN
						NO.	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)		
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai LPPD	3,44	2,78	80,81%					Nilai LPPD menurun karena adanya perubahan sistem penilaian	Melakukan Perubahan Indikator, karena Tahun 2024 sudah tidak menjadi indikator
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP Pemda	73,50	72,70	98,91%	Program Pemerintahan dan Kesta, Program Perencanaan dan Pembangunan, Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	97.938.953.960	92.432.292.802	94,38%	belum memenuhi target namun telah mengalami peningkatan dari realisasi tahun 2022	Dilakukan evaluasi untuk implementasi SAKIP Pemda di tahun berikutnya
		Nilai SAKIP Setda	81,00	82,10	101,36%					Nilai SAKIP Setda mengalami peningkatan berdasarkan LHE SAKIP oleh Tim APIP	
		Presentase Kesesuaian PMPRB dengan Indeks RB	90%	N/A	N/A					- Nilai RB : Menunggu LHE RB Menpan - Nilai PMPRB : perubahan Permenpan-RB yang menyatakan bahwa Pelaksanaan PMPRB sudah tidak dilaksanakan	
3	Meningkatnya kualitas layanan	Persentase peningkatan Nilai IKM Pemda	1,96%	1,93%	98,26%					Nilai IKM Pemda mengalami peningkatan namun tidak sebesar peningkatan ditahun sebelumnya Nilai IKM thn n-1 : 86,71 Nilai IKM thn n : 88,38	Dilakukan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan
		Persentase peningkatan Nilai IPP Pemda	2,87%	7,30%	120%					Mengalami Peningkatan Nilai IPP thn n-1 : 3,97 (Berdasarkan Penilaian Menpan-RB) Nilai IPP thn n : 4,26 (Berdasarkan Penilaian Menpan-RB)	
4	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik	Persentase Kesesuaian penilaian mandiri SPBE dengan Indeks SPBE	96%	73%	76,54%					sudah termasuk kategori baik secara nasional Nilai SPBE : 3,49 (berdasarkan LHE Menpan-RB) Nilai PMSPBE : 4,75	Dilakukan evaluasi untuk peningkatan Nilai SPBE Pemda

Atasan Langsung  
  
 SUGIAT, S.Sos., M.Psi.T.

Jombang, 02 Januari 2024  
 Sekretaris Daerah  
  
 AGUS PURNOMO, SH, M.Si  
 NIP. 19720710 199803 1 010

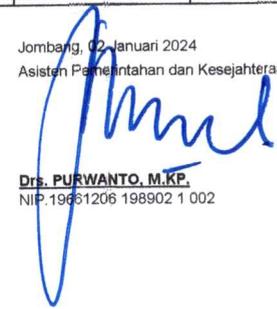
**PENGUKURAN KINERJA  
TRIBUNAL IV TAHUN 2023**

1 NAMA : Drs. PURWANTO, M.KP.  
 2 NIP : 19661206 198902 1 002  
 3 PANGKAT/GOL. RUANG : Pembina Utama Muda (IV/c)  
 4 JABATAN : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat  
 5 UNIT KERJA : Sekretariat Daerah

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	REALISASI s.d TRIBUNAL IV	CAPAIAN (%)	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN				PENJELASAN	ALTERNATIF/ UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN	
						NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)			% REALISASI
1	Terpenuhinya dokumen LPPD dan RLPPD	Persentase penyampaian dokumen LPPD dan RLPPD tepat waktu	100 %	100	100%	1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	41.943.998.165	39.726.106.590	94,71%	dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	Hasil evaluasi dari timda Provinsi sudah ditindak lanjuti
2	Terlaksananya perumusan kebijakan dan monev pelaksanaan kebijakan di rentang koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	70 Nilai	66,83	95%						dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	
		Persentase kebijakan bidang tata pemerintahan yang ditetapkan	100 %	100	100%						dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	
		Persentase kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditetapkan tepat waktu	100 %	100	100%						dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	
		Persentase produk hukum yang ditetapkan tepat waktu	100 %	100	100%						Telah Dilaksanakan sesuai target	Semua kegiatan dilaksanakan sesuai indikator kinerja dan target di Tribunalan
		Jumlah kebijakan di rentang koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra yang ditetapkan	11 Kebijakan	11	100%						dilaksanakan sesuai dengan pentahapan	
		Jumlah monev kebijakan di rentang koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra	11 Monev	11	100%						dilaksanakan sesuai dengan pentahapan	
3	Meningkatnya Implementasi SAKIP di Perangkat Daerah rentang koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra	Persentase OPD rentang koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra dengan Nilai SAKIP Minimal 80	14 %	25,71	120%						dilaksanakan sesuai dengan pentahapan	
4	Meningkatnya capaian kinerja aparatur pada Bagian Tapem, Kesra, Hukum	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Aparatur	100 %	100	100%						telah terlaksana sesuai pentahapan	
5	Meningkatnya Implementasi RB di rentang koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra	Persentase OPD rentang koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra dengan nilai RB minimal 50	50 %	100	120%						dilaksanakan an sesuai dengan perencanaan	
6	Meningkatnya kepuasan pengguna layanan pada rentang koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra	Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum dan Penyusunan Perundang - undangan	93,88 Angka	88,59	94%						dilaksanakan an sesuai dengan perencanaan	
		Indeks Kepuasan Layanan Kesejahteraan Rakyat	85,97 Angka	81,48	95%						dilaksanakan an sesuai dengan perencanaan	
		Indeks Kepuasan Layanan Tata Pemerintahan	80,03 Angka	88,59	111%	dilaksanakan an sesuai dengan perencanaan						
7	Meningkatnya pemenuhan standar pelayanan pada rentang koordinasi dan rentang koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra	Rata-rata nilai IPP Rentang Kendali dan Rentang Koordinasi	3,21 Angka	3,339	104%	dilaksanakan sesuai dengan pentahapan						
8	Meningkatnya tingkat kematangan indikator SPBE pada rentang koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesra	Persentase tingkat kematangan indikator penilaian SPBE dengan kategori baik pada perangkat daerah pengampu rentang koordinasi dan rentang kendali Asisten Pemerintahan dan Kesra	56 %	97,14	120%	dilaksanakan sesuai dengan pentahapan						

Atasan Langsung  
  
**AGUS PURWANTO, SH, M.Si**  
 NIP. 197007101989031000

Jombang, 02 Januari 2024  
 Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan rakyat

  
**Drs. PURWANTO, M.KP.**  
 NIP. 19661206 198902 1 002

**PENGUKURAN KINERJA  
TRIBUNAL IV TAHUN 2023**

1 NAMA : Drs. WIGNYO HANDOKO, M.Si  
 2 NIP : 19641211 199412 1 002  
 3 PANGKAT/GOL. RUANG : Pembina Utama Muda (IV/c)  
 4 JABATAN : Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
 5 UNIT KERJA : Sekretariat Daerah

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET		REALISASI s.d TRIBUNAL II	CAPAIAN (%)	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN				PENJELASAN	ALTERNATIF/ UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN	
							NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)			% REALISASI
1	Terlaksananya perumusan kebijakan dan monev pelaksanaan kebijakan di rentang koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Persentase kebijakan bidang administrasi pembangunan yang ditetapkan tepat waktu	100	%	100	100%	1	Program Perekonomian dan Pembangunan	4.368.877.859	4.239.175.805	97,03%	Telah dilaksanakan pembahasan bersama Tim Penyusun SBU, sehingga dapat digunakan OPD untuk menyusun kegiatan pelaksanaan pembangunan di SIPD RI	Koordinasi dengan OPD untuk menyusun perubahan pada perumusan kebijakan dalam penyusunan SBU dan Pedum APBD
		Persentase kebijakan bidang perekonomian yang ditetapkan tepat waktu	100	%	100	100%						- Rumusan kebijakan terkait Draf SE perbitan surat rekomendasi belanja BBM bersubsidi. - Rumusan kebijakan terkait draf Perbup Kurda 2023 dan draft SE pengguna minuman TIBER dari Perumda Air Minum Tirta Kencana.	sebagai bahan evaluasi
		Persentase Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik Hingga Selesai Ada Pemenangnya	100	%	93,06	93%						Telah dilaksanakan sesuai target	Semua kegiatan dilaksanakan sesuai indikator kinerja dan target
2	Meningkatnya Implementasi SAKIP di Perangkat Daerah rentang koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Persentase OPD rentang koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan dengan Nilai SAKIP Minimal 80	34	%	75	120%						Dilaksanakan evaluasi dan pengumpulan data	Koordinasi dengan OPD untuk melengkapi dokumen yang harus dibuat.
3	Meningkatnya capaian kinerja aparatur pada Bagian Perekonomian, AP, PBJ	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Aparatur	100	%	100	100%						telah terlaksana sesuai pentahapan	
4	Meningkatnya Implementasi RB di rentang koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Persentase OPD rentang koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan dengan nilai RB minimal 50	67	%	100	120%						Data hasil penilaian RB OPD rentang kendali Asisten II	Sebagai bahan evaluasi Tahun 2023
		Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Pembangunan	84,47	Angka	85,5	101%						dilaksanakan sesuai pentahapan	Berdasarkan hasil koordinasi dilaksanakan setiap bulan
		Indeks Kepuasan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	89,45	Angka	98,99	111%						Kegiatan survey Indeks Kepuasan Masyarakat masih dalam tahapan proses berjalan pada tribulan III dan IV	Indeks Kepuasan Masyarakat baru dapat terukur pada tribulan IV
5	Meningkatnya kepuasan pengguna layanan pada rentang koordinasi dan rentang kendali Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Indeks Kepuasan Layanan Perekonomian	86,88	Angka	82,46	95%						Data survei kepuasan masyarakat Bagian Perekonomian	sebagai bahan evaluasi tahun 2023
		Rata-rata nilai IPP Rentang Kendali dan Rentang Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan	3,33	Angka	3,784	114%						dilaksanakan sesuai pentahapan	Koordinasi dengan OPD Renkon Asisten II
6	Meningkatnya pemenuhan standar pelayanan pada rentang koordinasi dan rentang kendali Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Persentase tingkat kematangan indikator penilaian SPBE dengan kategori baik pada perangkat daerah pengampu rentang koordinasi dan rentang kendali Asisten Perekonomian dan Pembangunan	60	%	100	120%	dilaksanakan sesuai pentahapan						
7	Meningkatnya indikator penilaian SPBE pada rentang koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan												

Atasan Langsung  
  
**AGUS PURJOMO, SH, M.Si**  
 NIP. 197007101998031000

Jombang, 02 Januari 2024  
 Asisten Perekonomian dan Pembangunan

  
**Drs. WIGNYO HANDOKO, M.Si**  
 NIP.19641211 199412 1 002

**PENGUKURAN KINERJA  
TRIBUNAL IV TAHUN 2023**

1 NAMA : Dr. drg. SUBANDRIYAH, M.KP.  
 2 NIP : 196403161989032013  
 3 PANGKAT/GOL. RUANG : Pembina Utama Muda (IV/c)  
 4 JABATAN : Asisten Administrasi Umum  
 5 UNIT KERJA : Sekretariat Daerah

NO.	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET		REALISASI s.d TRIBUNAL IV	CAPAIAN (%)	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN				PENJELASAN	ALTERNATIF/ UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN		
							NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)			% REALISASI	
1	Terlaksananya perumusan kebijakan dan monev pelaksanaan kebijakan di rentang koordinasi Asisten Administrasi Umum	Persentase kebijakan bidang perencanaan dan keuangan yang disusun tepat waktu	100	%	100	100%	1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 51.626.077.936	Rp 48.467.010.407	93,88%	kegiatan dilaksanakan sesuai dengan pentahapan dan perencanaan	akan dilakukan evaluasi untuk pelaksanaan kegiatan	
		Persentase kebijakan bidang keorganisasian yang disusun tepat waktu	100	%	100	100%						dilakukan evaluasi supervisi implementasi dokumen monitoring, kebijakan bidang kelembagaan dan analisa jabatan, pelayanan publik dan tata laksana dan reformasi birokrasi		
2	Meningkatnya Implementasi SAKIP di Perangkat Daerah	Persentase OPD dengan Nilai SAKIP Minimal 80	47	%	45,28	96%						dilakukan evaluasi perkembangan SAKIP, pengusulan ZI dan reformasi birokrasi	dilakukan evaluasi untuk penyusunan dokumen SAKIP	
3	Meningkatnya Implementasi SAKIP di Perangkat Daerah rentang koordinasi Asisten Administrasi Umum	Persentase OPD rentang koordinasi Asisten Administrasi Umum dengan Nilai SAKIP Minimal 80	100	%	100	100%						telah dilaksanakan sesuai rencana		
4	Meningkatnya implementasi SAKIP di Setda	Persentase peningkatan nilai SAKIP Setda	0,70	%	2,5	120%						telah dilaksanakan sesuai rencana		
5	Meningkatnya capaian kinerja aparatur pada Bagian Umum, Prokopim, Renkeu, Organisasi	Persentase Rata-rata Capaian Kinerja Aparatur	100	%	100	100%						telah dilaksanakan sesuai rencana		
6	Meningkatnya Implementasi RB di Kabupaten Jombang	Nilai PMPRB Pemda	69,20	Nilai	N/A	N/A						Adanya Perubahan PermenPAN-RB, sudah tidak ada PMPRB Kabupaten	dilakukan evaluasi untuk RB tahun berikutnya	
		Jumlah unit kerja yang mendapatkan predikat WBK/WBBM	3	Unit Kerja	2	67%							kegiatan dilaksanakan sesuai dengan pentahapan dan perencanaan	
		Persentase OPD dengan Nilai Indeks Efektivitas dan Efisiensi OPD dengan kategori minimal Baik	100	%	100	100%							kegiatan dilaksanakan sesuai dengan pentahapan dan perencanaan	
		Persentase OPD dengan Tingkat Kematangan Tinggi	100	%	100	100%							kegiatan dilaksanakan sesuai dengan pentahapan dan perencanaan	
7	Terlaksananya Implementasi RB di Sekretariat Daerah	Nilai PMPRB Setda	70	Angka	82,5	118%						kegiatan dilaksanakan sesuai dengan pentahapan dan perencanaan	dilakukan evaluasi untuk penyusunan dokumen PMPRB	

NO.	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET		REALISASI s.d TRIBUNAL IV	CAPAIAN (%)	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN				PENJELASAN	ALTERNATIF/ UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN	
							NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)			% REALISASI
8	Meningkatnya Implementasi RB di rentang koordinasi Asisten Administrasi Umum	Persentase OPD rentang koordinasi Asisten Administrasi Umum dengan nilai RB minimal 50	80	%	100	120%					kegiatan dilaksanakan sesuai dengan pentahapan dan		
9	Meningkatnya kepuasan pengguna layanan lingkup Pemda	Nilai IKM Pemda	88,41	Angka	88,38	100%					kegiatan dilaksanakan sesuai dengan pentahapan dan perencanaan		
10	Meningkatnya kepuasan pengguna layanan pada rentang koordinasi dan rentang kendali Asisten Administrasi Umum	Nilai IKM Setda	87,35	Angka	88,72	102%					kegiatan dilaksanakan sesuai dengan pentahapan dan perencanaan		
		Indeks Kepuasan Layanan Keprotokol dan Komunikasi Pimpinan	85,83	Angka	89,55	104%					kegiatan dilaksanakan sesuai dengan pentahapan dan perencanaan	Semua kegiatan dilaksanakan sesuai indikator kinerja dan target	
		Persentase pelayanan keprotokol dan komunikasi kepala daerah/ wakil kepala daerah	100	%	100	100%						kegiatan dilaksanakan sesuai dengan pentahapan dan perencanaan	
		Indeks Kepuasan Layanan Umum	90,79	Angka	90,31	99%					Sesuai data pada survei kepuasan tribulan 1, hasil dari tribulan I masih 89,46 jauh dari hasil pada tahun 2022	Peningkatan pelayanan terus dilakukan dari aspek SDM dan sarana prasarana	
		Indeks Kepuasan Layanan Perencanaan dan Keuangan	90	Angka	89,43	99%					kegiatan dilaksanakan sesuai dengan pentahapan dan perencanaan		
		Indeks Kepuasan Layanan Organisasi	84,58	Angka	92,28	109%					kegiatan dilaksanakan sesuai dengan pentahapan dan perencanaan		
11	Meningkatnya pemenuhan standar pelayanan lingkup Pemda	Nilai IPP Pemda	3,734	Angka	4,26	114%					kegiatan dilaksanakan sesuai dengan pentahapan dan perencanaan		
		Persentase peningkatan pemenuhan pengadaan sarpras lingkup Setda	5	%	29,5	120%					Realisasi disesuaikan dengan kebutuhan dan pengadaan sarana dan prasarana lingkup Setda	Menyesuaikan dengan kebutuhan	

NO.	KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET		REALISASI s.d TRIBUNAL IV	CAPAIAN (%)	KETERKAITAN DENGAN KOMPONEN PERENCANAAN			PENJELASAN	ALTERNATIF/ UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN	
							NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)			REALISASI (Rp)
12	Meningkatnya pemenuhan standar pelayanan pada rentang koordinasi dan rentang kendali Asisten Administrasi Umum	Nilai IPP Setda	3,95	Angka	4,04	102%					kegiatan dilaksanakan sesuai dengan pentahapan dan perencanaan	
		Rata-rata nilai IPP Rentang Kendali dan Rentang Koordinasi Asisten Administrasi Umum	3,25	Angka	3,504	108%					kegiatan dilaksanakan sesuai dengan pentahapan dan perencanaan	
13	Meningkatnya Implementasi SPBE di Kabupaten Jombang	Nilai Penilaian Mandiri SPBE	4,35	Angka	4,75	109%					kegiatan dilaksanakan sesuai dengan pentahapan dan perencanaan	
14	Meningkatnya indikator penilaian SPBE pada rentang koordinasi Asisten Administrasi Umum	Persentase tingkat kematangan indikator penilaian SPBE dengan kategori baik pada perangkat daerah pengampu rentang koordinasi dan rentang kendali Asisten Administrasi Umum	48	%	100	120%					kegiatan dilaksanakan sesuai dengan pentahapan dan perencanaan	

Atasan Langsung



AGUS PURNOMO, SH, M.SI.  
NIP. 19720710 199803 1 010

Jombang, 02 Januari 2024  
Asisten Administrasi Umum



Dr. drg. SUBANDRIYAH, M.KP.  
NIP.19640316 198903 2 013

**DATA KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA  
SEKRETARIAT DAERAH TAHUN 2023**

NO	URAIAN	JUMLAH TERSEDIA	STANDAR KEBUTUHAN	SELISIH
1	AC Sentral	17	17	0
2	AC Split	145	147	-2
3	AC Window	24	24	0
4	Air Blower	6	6	0
5	Alat dapur lainnya	15	15	0
6	Alat Hiasan	22	22	0
7	Alat Kantor Lainnya	15	15	0
8	Alat Kedokteran umum lainnya	6	6	0
9	Alat Kesehatan olahraga lainnya	2	2	0
10	Alat Khusus Keamanan Lainnya	4	4	0
11	Alat Komunikasi Radio SSB	2	2	0
12	alat komunikasi radio ssb lainnya (dst)	2	2	0
13	alat komunikasi telephone lainnya (dst)	5	5	0
14	Alat Musik Modern/Band	2	2	0
15	Alat Musik Tradisional/Daerah	6	6	0
16	Alat pemadam kebakaran	46	46	0
17	Alat Pemanas Ruangan	3	3	0
18	Alat Pembersih lainnya	3	3	0
19	Alat Pemotong Kertas	2	2	0
20	Alat Pencetak Label	1	1	0
21	Alat Pendingin lainnya	5	5	0
22	Alat Penghancur Kertas	23	23	0
23	Alat Rumah Tangga lain lain	14	10	4
24	Alat Studio Video Lainnya	3	3	0
25	Alat ukur Universal Lainnya	1	2	-1
26	alat-alat sandi lainnya (dst)	1	1	0
27	Aquarium (Alat Rumah Tangga Lainnya ( Home Use )	6	6	0
28	Audio Amplifier	4	4	0
29	Audio Monitor Active	1	1	0
30	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	1	1	0
31	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	5	5	0
32	Bangunan Gedung Kantor Permanen	14	14	0
33	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	2	2	0
34	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	1	0
35	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	3	3	0
36	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	1	1	0
37	Bangunan Pembawa Air Bersih Lain-lain	1	1	0
38	Bangunan Pengamanan Air Kotor Lain-lain	4	4	0
39	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1	1	0
40	Bracket Standing Peralatan	4	4	0
41	Brankas	9	9	0
42	Buffet Kaca	2	2	0
43	Bus ( Penumpang 30 Orang Keatas )	1	1	0
44	Camera Conference	9	9	0

NO	URAIAN	JUMLAH TERSEDIA	STANDAR KEBUTUHAN	SELISIH
45	Camera Digital	5	5	0
46	Camera elektronik	27	27	0
47	Camera Film	6	6	0
48	Camera+Attachment	2	2	0
49	Coffee Maker	3	3	0
50	CPU	3	3	0
51	Dispenser	22	22	0
52	Elevator /Lift	1	1	0
53	Encoder/Decoder	1	1	0
54	Exercise Treadmil	1	1	0
55	Exhauster Fan	21	21	0
56	Facsimile	12	12	0
57	Filling Kabinet Besi	102	99	3
58	Gambar Presiden/Wakil Presiden	1	1	0
59	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	1	1	0
60	Gedung Garasi/Pool Permanen	6	6	0
61	Gedung Pos Jaga Permanen	4	4	0
62	Gordyin / kray	49	49	0
63	Guci	2	2	0
64	Handy Cam	3	2	1
65	Handy talky	39	39	0
66	Hard Disk	3	3	0
67	Hidran Kebakaran	1	1	0
68	Ils Calibration RX	1	4	-3
69	Instalasi Air Sumber / Mata Air Kapasitas Kecil	1	1	0
70	Instalasi Penangkal Petir Manual	1	1	0
71	Jalan Kabupaten Lain-lain	2	2	0
72	Jalan Khusus Lainnya	3	3	0
73	Jam Mekanis	2	2	0
74	Jaringan Distribusi Lain-lain	14	14	0
75	Jaringan Pembawa Lain-lain	1	1	0
76	Jeep	11	11	0
77	Kasur/Spring Bed	10	10	0
78	Kipas Angin	4	4	0
79	Kitchen Set	4	4	0
80	Kompur Gas (Alat Dapur)	14	14	0
81	Kursi Besi / Metal	15	15	0
82	Kursi biasa	236	222	14
83	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Menteri/ Gubernur/ Bupati/ Walikota	4	4	0
84	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	11	11	0
85	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon V	4	4	0
86	Kursi kayu	46	46	0
87	Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	7	7	0
88	Kursi kerja pegawai Non struktural	18	18	0
89	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	4	4	0
90	Kursi kerja pejabat eselon III	8	8	0

NO	URAIAN	JUMLAH TERSEDIA	STANDAR KEBUTUHAN	SELISIH
91	Kursi kerja pejabat eselon IV	36	36	0
92	Kursi Kerja Pejabat lainnya	51	51	0
93	Kursi Lipat	170	170	0
94	Kursi Putar	94	94	0
95	Kursi rapat	837	834	3
96	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	10	10	0
97	Kursi tamu	67	67	0
98	Kursi tamu di depan ajudan menteri/ gubernur/ bupati/ walikota	1	1	0
99	Lambang Garuda Pancasila	1	1	0
100	Lap Top	52	65	-13
101	Layar Film/Proyektor	48	48	0
102	Lemari besi	19	19	0
103	Lemari buku arsip untuk arsip dinamis	23	23	0
104	Lemari Es	12	12	0
105	Lemari kaca	10	10	0
106	Lemari kayu	63	62	1
107	Lemari Makan	2	2	0
108	Lemari Penyimpan	3	3	0
109	Lemari sorok	8	8	0
110	Lensa Kamera	4	4	0
111	Logam (Gong, Mandau)	1	1	0
112	Loudspeaker	12	12	0
113	Lukisan Cat Air	25	25	0
114	Lukisan Cat Minyak	10	10	0
115	Meja 1/2 biro	151	122	29
116	Meja Bundar	2	2	0
117	Meja Kerja Kayu	10	10	0
118	Meja Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	6	6	0
119	Meja kerja pegawai non struktural	40	40	0
120	Meja Kerja Pejabat Eselon II	6	6	0
121	Meja kerja pejabat Eselon III	11	11	0
122	Meja kerja pejabat Eselon IV	25	25	0
123	Meja kerja pejabat lainnya	19	19	0
124	Meja komputer	20	32	-12
125	Meja Makan Besi	7	7	0
126	Meja panjang	32	32	0
127	Meja Podium	1	1	0
128	Meja rapat	148	148	0
129	Meja Rapat Menteri/ Gubernur/ Bupati/ Walikota	1	1	0
130	Meja Resepsionis	4	4	0
131	Meja tambahan	19	19	0
132	Meja Tamu Biasa	42	42	0
133	Meja Telepon	3	3	0
134	Meja Tulis	19	19	0
135	Mesin Absensi	7	7	0
136	Mesin Cuci	5	5	0

NO	URAIAN	JUMLAH TERSEDIA	STANDAR KEBUTUHAN	SELISIH
137	Mesin Finger Print	1	1	0
138	Mesin Gergaji	1	1	0
139	Mesin ketik elektronik/selektrik	3	3	0
140	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	16	17	-1
141	Mesin Pemotong Rumput	11	11	0
142	Mesin Pengering Tangan	10	10	0
143	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	16	16	0
144	Meubelair lainnya	443	443	0
145	Mic Conference	2	2	0
146	Micro Bus ( Penumpang 15 S/D 29 Orang )	1	1	0
147	Microphone	56	56	0
148	Microphone Floor Stand	11	11	0
149	Microphone Table Stand	13	13	0
150	Microphone/Wireless MIC	26	26	0
151	Mimbar/Podium	7	7	0
152	Mini Bus ( Penumpang 14 Orang Kebawah )	4	4	0
153	Mini Komputer	2	2	0
154	Mobil Golfcar	1	1	0
155	Modem	2	2	0
156	Monitor	12	12	0
157	Morse Keyer	1	1	0
158	Nebulizer	2	2	0
159	Netware Interface External	113	113	0
160	Note Book	76	73	3
161	Orgen/Electrone	1	1	0
162	Oven Listrik	8	8	0
163	Pagar Permanen	1	1	0
164	Papan Nama Instansi	64	64	0
165	Papan pengumuman	3	3	0
166	Papan Tulis	1	1	0
167	Papan visual / papan nama / papan struktur	3	3	0
168	PC Unit	165	166	-1
169	PC Workstation	1	1	0
170	peralatan antena uhf lainnya (dst)	1	1	0
171	Peralatan Jaringan lainnya	3	3	0
172	Peralatan Komputer Lainnya	6	6	0
173	Peralatan Komputer lainnya	1	1	0
174	Peralatan Minikomputer lainnya	1	1	0
175	Peralatan Personal Komputer lainnya	12	12	0
176	Peralatan Studio Audio Lainnya	6	6	0
177	peralatan studio audio lainnya (dst)	43	43	0
178	Personal komputer lainnya	4	4	0
179	Pick Up	4	4	0
180	Pompa Air	69	69	0
181	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	5	5	0
182	Portable Water Pump	5	5	0

NO	URAIAN	JUMLAH TERSEDIA	STANDAR KEBUTUHAN	SELISIH
183	Printer ( peralatan personal komputer )	211	211	0
184	Printer Epson L5190 Ecotank	0	4	-4
185	Proyektor+Attachment	1	1	0
186	Rak besi	28	27	1
187	Rak Besi Buku 6 ruang	19	19	0
188	Rak Kayu	42	42	0
189	Rak kayu kaca	1	1	0
190	Repeater RX/TX	1	1	0
191	Rice Cooker (Alat Dapur)	3	3	0
192	Rice Warmer	2	2	0
193	Router	1	1	0
194	Rumah Negara Golongan I Tipe A Darurat	2	2	0
195	Rumah Negara Golongan I Tipe A Semi Permanen	1	1	0
196	Scaner (peralatan personal komputer)	16	16	0
197	Sedan	2	2	0
198	Sepeda	9	9	0
199	Sepeda Motor	96	96	0
200	Sepeda Statis	1	1	0
201	Server	6	6	0
202	Sice	4	8	-4
203	Sketsel	3	3	0
204	Sofa	38	37	1
205	Sound system	54	53	1
206	Sound system / Sonny Audio System MHC-V43	0	1	-1
207	Speaker Komputer	1	1	0
208	Stabilisator	2	2	0
209	Station Wagon	47	47	0
210	Stationary Generating Set	2	2	0
211	Submersible Pump	3	3	0
212	Sumersible Pump	16	16	0
213	Tablet PC	7	7	0
214	Tabung Gas	3	3	0
215	Taman Permanen	6	6	0
216	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	5	5	0
217	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	1	1	0
218	Tanah unt bangunan ibadah lainnya	1	1	0
219	Tanaman Hias	44	44	0
220	Tanaman Keras	1	1	0
221	Tangga	1	1	0
222	Tangga Aluminium	3	3	0
223	Telephone (PABX)	23	23	0
224	Telephone Hybrid	1	1	0
225	Televisi	76	76	0
226	Telex	5	5	0
227	Tempat Tidur Besi	4	4	0
228	Tempat Tidur Kayu	21	21	0

NO	URAIAN	JUMLAH TERSEDIA	STANDAR KEBUTUHAN	SELISIH
229	Tenda	1	1	0
230	Transportable Compressor	2	2	0
231	Transportable Generating Set	5	5	0
232	Tripod Kamera	3	3	0
233	Truck + Attachment	3	3	0
234	TV LCD 75 inch	0	1	-1
235	Ukiran Kayu dan sejenisnya	2	2	0
236	Unit Power Supply	24	24	0
237	Video Mixer	1	1	0
238	Video Patch Panel	1	1	0
239	Voice Recorder	3	3	0
240	Walkman Detector	5	5	0
241	Water Filter	3	3	0
242	Water Purification	1	1	0
243	Wayang Kulit	7	7	0
244	White board	6	6	0
245	Wireless	7	7	0
Jumlah		5442	5424	18

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM  
SEKRETARIAT DAERAH  
TAHUN 2023**

Uraian	Jumlah
<b>PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>	<b>38.929.698.042,00</b>
<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>639.663.966,00</b>
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	131.332.716,00
Penataan Administrasi Pemerintahan	207.493.200,00
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	300.838.050,00
<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>1.389.574.041,00</b>
Fasilitasi Bantuan Hukum	594.737.591,00
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	197.748.200,00
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	597.088.250,00
<b>Fasilitasi Kerja Sama Daerah</b>	<b>105.136.891,00</b>
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	105.136.891,00
<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>36.795.323.144,00</b>
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	36.231.259.444,00
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	548.854.700,00
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	15.209.000,00
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>49.734.412.550,00</b>
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>21.019.621,00</b>
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.887.000,00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	19.132.621,00
<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>1.289.006.563,00</b>
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	282.183.405,00
Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	540.000.000,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	131.815.158,00
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	335.008.000,00
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>19.917.617.469,00</b>
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.142.000,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	14.365.000,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	794.726.000,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.106.384.469,00

<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>7.685.398.407,00</b>
Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.433.391.120,00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	117.447.000,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.443.984.698,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	464.938.850,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	347.982.850,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	191.325.500,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	686.328.389,00
<b>Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>4.076.603.112,00</b>
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.826.282.380,00
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1.749.778.604,00
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	500.542.128,00
<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>2.360.111.220,00</b>
Fasilitasi Keprotokolan	2.097.356.020,00
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	258.515.200,00
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4.240.000,00
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>6.484.076.977,00</b>
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.821.529.020,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.638.510.900,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27.389.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	287.612.342,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	709.035.715,00
<b>Penataan Organisasi</b>	<b>560.806.874,00</b>
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	160.918.321,00
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	25.637.500,00
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	162.450.903,00
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	211.800.150,00
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>2.245.112.650,00</b>
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.245.112.650,00
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>4.883.016.670,00</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2.359.210.453,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.091.961.817,00
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	361.640.000,00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	70.204.400,00

<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>211.642.987,00</b>
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	164.158.365,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	47.484.622,00
<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>3.768.182.210,00</b>
<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>468.332.291,00</b>
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	236.142.238,00
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	132.258.682,00
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	99.931.371,00
<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>2.391.965.800,00</b>
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2.227.839.100,00
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	71.113.700,00
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	93.013.000,00
<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>474.493.695,00</b>
Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	474.493.695,00
<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>433.390.424,00</b>
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	213.246.248,00
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	78.789.181,00
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	141.354.995,00
<b>Grand Total</b>	<b>92.432.292.802,00</b>

Kab. Jombang, 31 Desember 2023

**Sekretaris Daerah**

**AGUS PURNOMO, SH., M.Si**

NIP. 197207101998031010



PEMERINTAHAN KAB. JOMBANG  
SEKRETARIAT DAERAH  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023  
01 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>97.938.953.960</b>	<b>92.432.292.802,00</b>	<b>94,38</b>	<b>89.213.869.221,00</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>95.989.669.697</b>	<b>90.510.493.082,00</b>	<b>94,29</b>	<b>82.465.079.158,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	22.737.689.498	20.700.025.627,00	91,04	21.159.356.750,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	42.605.235.899	41.020.502.155,00	96,28	34.455.330.725,00
5.1.04	Belanja Subsidi	2.000.000.000	1.999.880.000,00	99,99	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	28.646.744.300	26.790.085.300,00	93,52	26.850.391.683,00
	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>95.989.669.697</b>	<b>90.510.493.082,00</b>	<b>94,29</b>	<b>82.465.079.158,00</b>
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.949.284.263</b>	<b>1.921.799.720,00</b>	<b>98,59</b>	<b>6.748.790.063,00</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0	0,00	0,00	3.054.200.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	960.835.763	949.196.300,00	98,79	2.185.527.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	895.843.000	880.853.420,00	98,33	1.417.909.563,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	92.605.500	91.750.000,00	99,08	91.153.500,00
	<b>JUMLAH BELANJA MODAL</b>	<b>1.949.284.263</b>	<b>1.921.799.720,00</b>	<b>98,59</b>	<b>6.748.790.063,00</b>
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>97.938.953.960</b>	<b>92.432.292.802,00</b>	<b>94,38</b>	<b>89.213.869.221,00</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(97.938.953.960)</b>	<b>(92.432.292.802,00)</b>	<b>94,38</b>	<b>(89.213.869.221,00)</b>

Kab. Jombang, 31 Desember 2023  
Sekretaris Daerah

  
AGUS PURNOMO, SH., M.Si  
NIP. 197207101998031010



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
SURAT TANDA SETORAN (STS)**

STS No. : 0001/STS/415.10.1.2/2023

Bank : Bank Jatim

No. Rekening : 0111.000011

Harap diterima uang sebesar : Rp 45.000.000  
( dengan huruf ) ( Empat puluh lima juta rupiah )

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :

No.	Kode Rekening	Uraian Rincian Obyek	Jumlah (Rp.)
1.	3.1.05.05.01.0001	Pengembalian Dana Hibah Mushala Al Hikmah Des. Sumberdadi Ngampungan Banyuwangi - oby TA. 2023	Rp 45.000.000
<b>J u m l a h</b>			Rp 45.000.000

Uang tersebut diterima pada tanggal .....

Mengetahui,  
Pegawai Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

Bendahara Penerimaan /  
Bend. Penerimaan Pembantu



NIP. 19751003 198702 1007

NIP. 19800313 201415 1001

2/2023  
3

**LAPORAN KEBUTUHAN PEGAWAI**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

No	Kode Jabatan	Nama Jabatan	Atasan Jabatan	Tipe	Kelas	Jml Pegawai	Kebutuhan Pegawai	Selisih
1	1-000 001	SEKRETARIS DAERAH	BUPATI	STRUKTURAL	15	1 Orang	1 Orang	0 Orang
2	1-000 002	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	SEKRETARIS DAERAH	STRUKTURAL	14	1 Orang	1 Orang	0 Orang
3	1-000 003	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	SEKRETARIS DAERAH	STRUKTURAL	14	1 Orang	1 Orang	0 Orang
4	1-000 004	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	SEKRETARIS DAERAH	STRUKTURAL	14	1 Orang	1 Orang	0 Orang
5	1-000 151	Pengelola Data	SEKRETARIS DAERAH	PELAKSANA	6	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
6	1-000 174	Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasyarakatan	SEKRETARIS DAERAH	LAINNYA	13	1 Orang	1 Orang	0 Orang
7	1-000 176	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum, dan Politik	SEKRETARIS DAERAH	LAINNYA	13	1 Orang	1 Orang	0 Orang
8	1-000 177	Staf Ahli Bidang Keuangan, Ekonomi, dan Pembangunan	SEKRETARIS DAERAH	LAINNYA	13	1 Orang	1 Orang	0 Orang
9	1-000 340	Pranata Komputer Penyelia	SEKRETARIS DAERAH	FUNGSIONAL		0 Orang	1 Orang	-1 Orang
10	1-000 354	Analisis Kebijakan Muda	SEKRETARIS DAERAH	FUNGSIONAL		0 Orang	Belum Input Anjab	0 Orang
11	1-000 005	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	STRUKTURAL	12	1 Orang	1 Orang	0 Orang
12	1-000 006	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	STRUKTURAL	12	1 Orang	1 Orang	0 Orang

13	1-000 013	KEPALA BAGIAN HUKUM	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	STRUK TURAL	12	1 Orang	1 Orang	0 Orang
14	1-000 007	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	STRUK TURAL	12	1 Orang	1 Orang	0 Orang
15	1-000 008	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	STRUK TURAL	12	1 Orang	1 Orang	0 Orang
16	1-000 009	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	STRUK TURAL	12	1 Orang	1 Orang	0 Orang
17	1-000 010	KEPALA BAGIAN UMUM	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	STRUK TURAL	12	1 Orang	1 Orang	0 Orang
18	1-000 011	KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	STRUK TURAL	12	1 Orang	1 Orang	0 Orang
19	1-000 012	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	STRUK TURAL	12	1 Orang	1 Orang	0 Orang
20	1-000 203	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	STRUK TURAL	12	1 Orang	1 Orang	0 Orang
21	1-000 076	Pengelola Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	PELAKS ANA	6	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
22	1-000 130	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	PELAKS ANA	6	1 Orang	1 Orang	0 Orang
23	1-000 131	Analisis Pemerintahan Daerah	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	PELAKS ANA	7	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
24	1-000 132	Bendahara	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	PELAKS ANA	7	1 Orang	0 Orang	1 Orang
25	1-000 133	Analisis Kerjasama Lintas Sektor	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	PELAKS ANA	7	1 Orang	1 Orang	0 Orang
26	1-000 134	Analisis Pemerintahan Daerah	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	PELAKS ANA	7	1 Orang	1 Orang	0 Orang
27	1-000 135	Pengadministrasi Kepegawaian	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	PELAKS ANA	5	0 Orang	0 Orang	0 Orang

28	1-000 136	Analisis Toponimi dan Data Wilayah	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	PELAKSANA	7	0 Orang	0 Orang	0 Orang
29	1-000 137	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	PELAKSANA	7	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
30	1-000 190	Pengadministrasi Umum	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	PELAKSANA	5	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
31	1-000 191	Analisis Pemerintahan Daerah	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	PELAKSANA	7	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
32	1-000 196	Penyurvei Batas Wilayah Administrasi	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	PELAKSANA	7	0 Orang	0 Orang	0 Orang
33	1-000 299	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	PELAKSANA	7	0 Orang	0 Orang	0 Orang
34	1-000 326	Analisis Kebijakan Muda	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	FUNGSIONAL		0 Orang	Belum Input Anjab	0 Orang
35	1-000 344	Analisis Kebijakan Pertama	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	FUNGSIONAL		0 Orang	Belum Input Anjab	0 Orang
36	1-000 144	Bendahara	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PELAKSANA	7	1 Orang	2 Orang	-1 Orang
37	1-000 145	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PELAKSANA	6	1 Orang	1 Orang	0 Orang
38	1-000 160	Pengadministrasi Kepegawaian	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PELAKSANA	5	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
39	1-000 161	Analisis Kesejahteraan Rakyat	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PELAKSANA	7	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
40	1-000 165	Pengadministrasi Umum	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PELAKSANA	5	1 Orang	1 Orang	0 Orang
41	1-000 168	Pengelola Program dan Laporan	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PELAKSANA	6	1 Orang	2 Orang	-1 Orang
42	1-000 173	Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PELAKSANA	6	1 Orang	4 Orang	-3 Orang
43	1-000 189	Pengelola Kegiatan Hari Besar Keagamaan	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PELAKSANA	6	0 Orang	2 Orang	-2 Orang
44	1-000 200	Pengelola Bantuan Sosial dan Hibah	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PELAKSANA	6	0 Orang	4 Orang	-4 Orang

45	1-000 201	Pengadministrasi Persuratan	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PELAKS ANA	5	0 Orang	2 Orang	-2 Orang
46	1-000 270	Penyusun Bahan Pemberdayaan Amil Zakat	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PELAKS ANA	7	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
47	1-000 271	Penyusun Program Pengawasan Kesejahteraan Rakyat	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PELAKS ANA	7	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
48	1-000 272	Pengelola Pembinaan Bantuan	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PELAKS ANA	6	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
49	1-000 273	Pengelola Bantuan Organisasi Masyarakat Sosial	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PELAKS ANA	6	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
50	1-000 274	Penyusun Bahan Pembinaan Qori dan Hafidz	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PELAKS ANA	7	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
51	1-000 275	Analisis Hibah Daerah	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PELAKS ANA	7	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
52	1-000 291	Pengadministrasi Keuangan	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PELAKS ANA	5	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
53	1-000 293	Pengelola Keuangan	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PELAKS ANA		0 Orang	1 Orang	-1 Orang
54	1-000 295	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PELAKS ANA		0 Orang	1 Orang	-1 Orang
55	1-000 318	Analisis Kesejahteraan Rakyat	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PELAKS ANA	7	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
56	1-000 325	Pramu Bakti	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PELAKS ANA	1	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
57	1-000 058	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN	PELAKS ANA	7	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
58	1-000 074	Analisis Perekonomian	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN	PELAKS ANA	7	0 Orang	3 Orang	-3 Orang
59	1-000 075	Bendahara	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN	PELAKS ANA	7	1 Orang	1 Orang	0 Orang
60	1-000 142	Pengelola Data	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN	PELAKS ANA	6	0 Orang	3 Orang	-3 Orang
61	1-000 143	Pengadministrasi Kepegawaian	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN	PELAKS ANA	5	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
62	1-000 147	Pengelola Program dan Kegiatan	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN	PELAKS ANA	6	0 Orang	1 Orang	-1 Orang

63	1-000 150	Pengadministrasi Persuratan	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN	PELAKS ANA	5	1 Orang	1 Orang	0 Orang
64	1-000 153	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN	PELAKS ANA	6	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
65	1-000 154	Pengelola Barang Milik Negara	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN	PELAKS ANA	6	0 Orang	0 Orang	0 Orang
66	1-000 192	Analisis Perekonomian	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN	PELAKS ANA	7	0 Orang	0 Orang	0 Orang
67	1-000 193	Analisis Perekonomian	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN	PELAKS ANA	7	0 Orang	0 Orang	0 Orang
68	1-000 194	Pengelola Data	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN	PELAKS ANA	6	0 Orang	0 Orang	0 Orang
69	1-000 195	Pengadministrasi Umum	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN	PELAKS ANA	5	1 Orang	1 Orang	0 Orang
70	1-000 308	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN	PELAKS ANA		0 Orang	1 Orang	-1 Orang
71	1-000 309	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN	PELAKS ANA		0 Orang	0 Orang	0 Orang
72	1-000 310	Pengadministrasi Keuangan	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN	PELAKS ANA	5	0 Orang	0 Orang	0 Orang
73	1-000 311	Pengelola Keuangan	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN	PELAKS ANA		0 Orang	0 Orang	0 Orang
74	1-000 324	Pranata Komputer Terampil	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN	FUNGSI ONAL		0 Orang	1 Orang	-1 Orang
75	1-000 339	Pranata Komputer Mahir	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN	FUNGSI ONAL		0 Orang	1 Orang	-1 Orang
76	1-000 341	Analisis Kebijakan Pertama	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN	FUNGSI ONAL		0 Orang	1 Orang	-1 Orang
77	1-000 342	Analisis Kebijakan Muda	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN	FUNGSI ONAL		0 Orang	3 Orang	-3 Orang
78	1-000 111	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PELAKS ANA	6	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
79	1-000 112	Pengelola Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan APBD	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PELAKS ANA	6	0 Orang	3 Orang	-3 Orang
80	1-000 118	Analisis Standard Harga	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PELAKS ANA	7	1 Orang	1 Orang	0 Orang
81	1-000 119	Penyusun Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PELAKS ANA	7	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
82	1-000 120	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PELAKS ANA	7	0 Orang	1 Orang	-1 Orang

83	1-000 169	Analisis Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PELAKSANA	7	0 Orang	2 Orang	-2 Orang
84	1-000 170	Pengadministrasi Umum	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PELAKSANA	5	2 Orang	2 Orang	0 Orang
85	1-000 171	Analisis Standar Biaya	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PELAKSANA	7	0 Orang	2 Orang	-2 Orang
86	1-000 172	Pengelola Data Pelaksanaan Program dan Anggaran	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PELAKSANA	6	0 Orang	2 Orang	-2 Orang
87	1-000 276	Pramu Kebersihan	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PELAKSANA	1	1 Orang	1 Orang	0 Orang
88	1-000 277	Analisis Pembangunan	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PELAKSANA	7	1 Orang	1 Orang	0 Orang
89	1-000 278	Analisis Program Pembangunan	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PELAKSANA	7	1 Orang	1 Orang	0 Orang
90	1-000 279	Penyusun Bahan Kebijakan	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PELAKSANA	7	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
91	1-000 280	Penyusun Bahan Kebijakan	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PELAKSANA	7	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
92	1-000 281	Penyusun Bahan Kebijakan	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PELAKSANA	7	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
93	1-000 343	Analisis Kebijakan Muda	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	FUNGSIONAL		0 Orang	3 Orang	-3 Orang
94	1-000 348	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PELAKSANA	5	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
95	1-000 053	Bendahara	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	PELAKSANA	7	1 Orang	0 Orang	1 Orang
96	1-000 060	Pengelola Keuangan	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	PELAKSANA	6	1 Orang	0 Orang	1 Orang
97	1-000 061	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	PELAKSANA	6	1 Orang	1 Orang	0 Orang
98	1-000 062	Penyusun Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	PELAKSANA	7	1 Orang	1 Orang	0 Orang

99	1-000 063	Penyusun Bahan Bimbingan Teknis	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	PELAKSANA	7	1 Orang	0 Orang	1 Orang
100	1-000 064	Notulis Rapat	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	PELAKSANA	6	1 Orang	0 Orang	1 Orang
101	1-000 065	Pengadministrasi Kepegawaian	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	PELAKSANA	5	0 Orang	0 Orang	0 Orang
102	1-000 066	Pengadministrasi Persuratan	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	PELAKSANA	5	1 Orang	0 Orang	1 Orang
103	1-000 067	Pengelola Barang Milik Negara	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	PELAKSANA	6	1 Orang	1 Orang	0 Orang
104	1-000 068	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	PELAKSANA	7	2 Orang	1 Orang	1 Orang
105	1-000 078	Pranata Barang dan Jasa	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	PELAKSANA	6	1 Orang	1 Orang	0 Orang
106	1-000 079	Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	PELAKSANA	7	0 Orang	2 Orang	-2 Orang
107	1-000 080	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	PELAKSANA	7	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
108	1-000 089	Pengelola Keuangan	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	PELAKSANA	6	0 Orang	0 Orang	0 Orang
109	1-000 178	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	FUNGSIONAL	10	1 Orang	7 Orang	-6 Orang
110	1-000 179	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	FUNGSIONAL	8	6 Orang	23 Orang	-17 Orang
111	1-000 183	Pranata Barang dan Jasa	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	PELAKSANA	6	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
112	1-000 184	Pranata Barang dan Jasa	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	PELAKSANA	6	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
113	1-000 185	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	PELAKSANA	7	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
114	1-000 186	Pengelola Unit Layanan Pengadaan	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	PELAKSANA	6	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
115	1-000 187	Pengelola Surat	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	PELAKSANA	6	0 Orang	0 Orang	0 Orang

116	1-000 188	Pengelola Kepegawaian	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	PELAKSANA	6	0 Orang	0 Orang	0 Orang
117	1-000 249	Analisis Manajemen Risiko	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	PELAKSANA	7	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
118	1-000 250	Analisis Fasilitas Peningkatan Kompetensi	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	PELAKSANA	7	0 Orang	Belum Input Anjab	0 Orang
119	1-000 251	Pranata Teknologi Informasi Komputer	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	PELAKSANA	5	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
120	1-000 252	Analisis Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	PELAKSANA	7	1 Orang	1 Orang	0 Orang
121	1-000 253	Analisis Sistem Informasi	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	PELAKSANA	7	1 Orang	1 Orang	0 Orang
122	1-000 254	Pengadministrasian Layanan Pengadaan Secara Elektronik	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	PELAKSANA	5	1 Orang	1 Orang	0 Orang
123	1-000 255	Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	PELAKSANA	6	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
124	1-000 256	Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	PELAKSANA	7	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
125	1-000 269	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	FUNGSIONAL	12	0 Orang	2 Orang	-2 Orang
126	1-000 283	Pranata Komputer Pertama	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	FUNGSIONAL		0 Orang	2 Orang	-2 Orang
127	1-000 288	Pranata Komputer Pertama	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	FUNGSIONAL		0 Orang	Belum Input Anjab	0 Orang
128	1-000 294	Pengadministrasian Keuangan	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	PELAKSANA	5	0 Orang	0 Orang	0 Orang
129	1-000 296	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	PELAKSANA		0 Orang	0 Orang	0 Orang
130	1-000 301	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	PELAKSANA		0 Orang	0 Orang	0 Orang
131	1-000 303	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	PELAKSANA		0 Orang	1 Orang	-1 Orang

132	1-000 313	Analisis Bahan Regulasi Sertifikasi Advokasi dan Sertifikasi Kompetensi	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	PELAKS ANA		0 Orang	1 Orang	-1 Orang
133	1-000 314	Penyusun Bahan Bimbingan Teknis	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	PELAKS ANA		0 Orang	0 Orang	0 Orang
134	1-000 315	Pengelola Unit Layanan Pengadaan	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	PELAKS ANA		0 Orang	2 Orang	-2 Orang
135	1-000 316	Notulis Rapat	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	PELAKS ANA		0 Orang	Belum Input Anjab	0 Orang
136	1-000 317	Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	PELAKS ANA		0 Orang	0 Orang	0 Orang
137	1-000 345	Pengadministrasi Umum	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	PELAKS ANA	5	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
138	1-000 346	Pranata Komputer Muda	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	FUNGSI ONAL		0 Orang	2 Orang	-2 Orang
139	1-000 347	Pranata Komputer Madya	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	FUNGSI ONAL		0 Orang	2 Orang	-2 Orang
140	1-000 029	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	KEPALA BAGIAN UMUM	STRUK TURAL	9	1 Orang	1 Orang	0 Orang
141	1-000 030	Kepala Sub Bagian Perlengkapan	KEPALA BAGIAN UMUM	STRUK TURAL	9	1 Orang	1 Orang	0 Orang
142	1-000 031	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga	KEPALA BAGIAN UMUM	STRUK TURAL	9	1 Orang	1 Orang	0 Orang
143	1-000 033	Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan	KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	STRUK TURAL	9	1 Orang	1 Orang	0 Orang
144	1-000 040	Kepala Sub Bagian Protokol	KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	STRUK TURAL	9	1 Orang	1 Orang	0 Orang
145	1-000 124	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	PELAKS ANA	6	0 Orang	0 Orang	0 Orang
146	1-000 140	Penata Liputan	KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	PELAKS ANA	6	3 Orang	4 Orang	-1 Orang

147	1-000 197	Penerjemah Pertama	KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	FUNGSI ONAL	8	0 Orang	0 Orang	0 Orang
148	1-000 198	Pengelola Dokumentasi	KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	PELAKS ANA	6	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
149	1-000 210	Pranata Fotografi	KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	PELAKS ANA	6	0 Orang	0 Orang	0 Orang
150	1-000 211	Notulis Rapat	KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	PELAKS ANA	6	0 Orang	0 Orang	0 Orang
151	1-000 212	Penyusun Naskah Rapat Pimpinan	KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	PELAKS ANA	7	1 Orang	3 Orang	-2 Orang
152	1-000 259	Pengadministrasi Keuangan	KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	PELAKS ANA	5	0 Orang	0 Orang	0 Orang
153	1-000 335	Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	FUNGSI ONAL		0 Orang	5 Orang	-5 Orang
154	1-000 336	Pranata Hubungan Masyarakat Muda	KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	FUNGSI ONAL		0 Orang	2 Orang	-2 Orang
155	1-000 338	Pengadministrasi Umum	KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	PELAKS ANA	5	0 Orang	2 Orang	-2 Orang
156	1-000 044	Pengelola Kepegawaian	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	PELAKS ANA	6	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
157	1-000 045	Analisis Jabatan	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	PELAKS ANA	7	2 Orang	3 Orang	-1 Orang
158	1-000 046	Pengolah Data Kelembagaan	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	PELAKS ANA	6	2 Orang	2 Orang	0 Orang
159	1-000 049	Penyusun Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	PELAKS ANA	7	0 Orang	2 Orang	-2 Orang
160	1-000 051	Pengadministrasi Umum	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	PELAKS ANA	5	2 Orang	2 Orang	0 Orang
161	1-000 052	Analisis Kinerja	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	PELAKS ANA	7	1 Orang	1 Orang	0 Orang
162	1-000 090	Analisis Pelayanan Publik	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	PELAKS ANA	7	1 Orang	1 Orang	0 Orang

163	1-000 202	Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	PELAKSANA	7	1 Orang	2 Orang	-1 Orang
164	1-000 319	Pengadministrasian Umum	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	PELAKSANA	5	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
165	1-000 320	Pengelola Akuntabilitas	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	PELAKSANA		0 Orang	Belum Input Anjab	0 Orang
166	1-000 360	Pengolah Data	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	PELAKSANA		0 Orang	Belum Input Anjab	0 Orang
167	1-000 361	Analisis Kebijakan Muda	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	FUNGSIONAL		0 Orang	Belum Input Anjab	0 Orang
168	1-000 362	Analisis Kebijakan Pertama	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	FUNGSIONAL		0 Orang	Belum Input Anjab	0 Orang
169	1-000 054	Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan	KEPALA BAGIAN HUKUM	PELAKSANA	7	0 Orang	3 Orang	-3 Orang
170	1-000 057	Pengelola Informasi Produk Hukum	KEPALA BAGIAN HUKUM	PELAKSANA	6	0 Orang	2 Orang	-2 Orang
171	1-000 059	Pengadministrasian Hukum	KEPALA BAGIAN HUKUM	PELAKSANA	5	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
172	1-000 072	Analisis Permasalahan Hukum	KEPALA BAGIAN HUKUM	PELAKSANA	7	1 Orang	2 Orang	-1 Orang
173	1-000 127	Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama	KEPALA BAGIAN HUKUM	FUNGSIONAL	8	3 Orang	6 Orang	-3 Orang
174	1-000 128	Penyuluh Hukum Pertama	KEPALA BAGIAN HUKUM	FUNGSIONAL	8	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
175	1-000 162	Pengelola Fasilitas Bantuan Hukum	KEPALA BAGIAN HUKUM	PELAKSANA	6	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
176	1-000 181	Penelaah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	KEPALA BAGIAN HUKUM	PELAKSANA	7	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
177	1-000 182	Penyusun Bahan Bantuan Hukum	KEPALA BAGIAN HUKUM	PELAKSANA	7	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
178	1-000 208	Pengelola Peraturan Perundang-undangan	KEPALA BAGIAN HUKUM	PELAKSANA	6	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
179	1-000 327	Perancang Peraturan Perundang-undangan Muda	KEPALA BAGIAN HUKUM	FUNGSIONAL		1 Orang	4 Orang	-3 Orang
180	1-000 328	Perancang Peraturan Perundang-undangan Madya	KEPALA BAGIAN HUKUM	FUNGSIONAL		0 Orang	2 Orang	-2 Orang
181	1-000 329	Penyuluh Hukum Muda	KEPALA BAGIAN HUKUM	FUNGSIONAL		0 Orang	2 Orang	-2 Orang
182	1-000 330	Penyuluh Hukum Madya	KEPALA BAGIAN HUKUM	FUNGSIONAL		0 Orang	Belum Input Anjab	0 Orang

183	1-000 331	Analisis Hukum Ahli Pertama	KEPALA BAGIAN HUKUM	FUNGSIONAL		0 Orang	7 Orang	-7 Orang
184	1-000 332	Analisis Hukum Ahli Muda	KEPALA BAGIAN HUKUM	FUNGSIONAL		2 Orang	4 Orang	-2 Orang
185	1-000 333	Analisis Hukum Ahli Madya	KEPALA BAGIAN HUKUM	FUNGSIONAL		0 Orang	3 Orang	-3 Orang
186	1-000 334	Pengadministrasian Umum	KEPALA BAGIAN HUKUM	PELAKSANA	5	0 Orang	Belum Input Anjab	0 Orang
187	1-000 102	Pengelola Data	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	PELAKSANA	6	0 Orang	2 Orang	-2 Orang
188	1-000 107	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	PELAKSANA	6	7 Orang	12 Orang	-5 Orang
189	1-000 109	Pengadministrasian Umum	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	PELAKSANA	5	5 Orang	15 Orang	-10 Orang
190	1-000 126	Pengadministrasian Persuratan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	PELAKSANA	5	1 Orang	3 Orang	-2 Orang
191	1-000 214	Pengadministrasian Keuangan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	PELAKSANA	5	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
192	1-000 215	Pengelola Kepegawaian	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	PELAKSANA	6	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
193	1-000 216	Pengelola Barang Milik Negara	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	PELAKSANA	6	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
194	1-000 217	Bendahara	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	PELAKSANA	7	0 Orang	2 Orang	-2 Orang
195	1-000 218	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	PELAKSANA	7	2 Orang	2 Orang	0 Orang
196	1-000 262	Analisis Keuangan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	PELAKSANA	7	0 Orang	3 Orang	-3 Orang
197	1-000 263	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	PELAKSANA	6	2 Orang	3 Orang	-1 Orang

198	1-000 264	Verifikator Keuangan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	PELAKS ANA	6	1 Orang	2 Orang	-1 Orang
199	1-000 266	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	PELAKS ANA	7	0 Orang	2 Orang	-2 Orang
200	1-000 289	Pengelola Keuangan	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	PELAKS ANA		0 Orang	1 Orang	-1 Orang
201	1-000 297	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	PELAKS ANA		0 Orang	Belum Input Anjab	0 Orang
202	1-000 298	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	PELAKS ANA		0 Orang	Belum Input Anjab	0 Orang
203	1-000 302	Pengelola Kegiatan dan Anggaran	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	PELAKS ANA		0 Orang	1 Orang	-1 Orang
204	1-000 305	Arsiparis Terampil	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	FUNGSI ONAL		0 Orang	1 Orang	-1 Orang
205	1-000 307	Pranata Komputer Terampil	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	FUNGSI ONAL		0 Orang	1 Orang	-1 Orang
206	1-000 322	Arsiparis Pertama	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian	FUNGSI ONAL		0 Orang	2 Orang	-2 Orang
207	1-000 232	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	Kepala Sub Bagian Perlengkapan	PELAKS ANA	5	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
208	1-000 237	Pramu Kebersihan	Kepala Sub Bagian Perlengkapan	PELAKS ANA	1	5 Orang	29 Orang	-24 Orang
209	1-000 238	Pengemudi	Kepala Sub Bagian Perlengkapan	PELAKS ANA	3	2 Orang	13 Orang	-11 Orang
210	1-000 239	Pengadministrasi Umum	Kepala Sub Bagian Perlengkapan	PELAKS ANA	5	1 Orang	1 Orang	0 Orang
211	1-000 240	Teknisi Listrik dan Jaringan	Kepala Sub Bagian Perlengkapan	PELAKS ANA	5	2 Orang	2 Orang	0 Orang
212	1-000 241	Teknisi Sarana dan Prasarana	Kepala Sub Bagian Perlengkapan	PELAKS ANA	5	0 Orang	4 Orang	-4 Orang
213	1-000 242	Pengawas Bangunan dan Taman	Kepala Sub Bagian Perlengkapan	PELAKS ANA	6	0 Orang	Belum Input Anjab	0 Orang

214	1-000 243	Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kepala Sub Bagian Perlengkapan	PELAKS ANA	6	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
215	1-000 244	Pengelola Kendaraan	Kepala Sub Bagian Perlengkapan	PELAKS ANA	6	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
216	1-000 245	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	Kepala Sub Bagian Perlengkapan	PELAKS ANA	6	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
217	1-000 246	Pengelola Gudang	Kepala Sub Bagian Perlengkapan	PELAKS ANA	6	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
218	1-000 247	Penata Kendaraan Dinas	Kepala Sub Bagian Perlengkapan	PELAKS ANA	7	0 Orang	2 Orang	-2 Orang
219	1-000 248	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	Kepala Sub Bagian Perlengkapan	PELAKS ANA	7	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
220	1-000 260	Pranata Taman	Kepala Sub Bagian Perlengkapan	PELAKS ANA	5	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
221	1-000 261	Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana	Kepala Sub Bagian Perlengkapan	PELAKS ANA	7	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
222	1-000 265	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	Kepala Sub Bagian Perlengkapan	PELAKS ANA	7	1 Orang	1 Orang	0 Orang
223	1-000 306	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Pertama	Kepala Sub Bagian Perlengkapan	FUNGSI ONAL		0 Orang	1 Orang	-1 Orang
224	1-000 321	Pranata Komputer Pertama	Kepala Sub Bagian Perlengkapan	FUNGSI ONAL		0 Orang	1 Orang	-1 Orang
225	1-000 358	Pengelola Bangunan Gedung	Kepala Sub Bagian Perlengkapan	PELAKS ANA		0 Orang	1 Orang	-1 Orang
226	1-000 359	Pranata Komputer Terampil	Kepala Sub Bagian Perlengkapan	FUNGSI ONAL		0 Orang	Belum Input Anjab	0 Orang
227	1-000 231	Pengadministrasi Umum	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga	PELAKS ANA	5	1 Orang	1 Orang	0 Orang
228	1-000 233	Pranata Jamuan	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga	PELAKS ANA	5	0 Orang	6 Orang	-6 Orang
229	1-000 234	Pengelola Rumah Tangga	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga	PELAKS ANA	6	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
230	1-000 235	Ajudan	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga	PELAKS ANA	6	4 Orang	6 Orang	-2 Orang
231	1-000 236	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga	PELAKS ANA	7	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
232	1-000 267	Penilai Perbekalan	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga	PELAKS ANA	7	0 Orang	Belum Input Anjab	0 Orang
233	1-000 123	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan	PELAKS ANA	7	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
234	1-000 139	Pengadministrasi Umum	Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan	PELAKS ANA	5	1 Orang	3 Orang	-2 Orang

235	1-000 180	Pengelola Kepegawaian	Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan	PELAKSANA	6	0 Orang	0 Orang	0 Orang
236	1-000 213	Analisis Konten Media Sosial	Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan	PELAKSANA	7	0 Orang	0 Orang	0 Orang
237	1-000 323	Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan	FUNGSIONAL	8	0 Orang	5 Orang	-5 Orang
238	1-000 337	Penyusun Naskah Rapat Pimpinan	Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan	PELAKSANA		0 Orang	2 Orang	-2 Orang
239	1-000 083	Analisis Protokol	Kepala Sub Bagian Protokol	PELAKSANA	7	3 Orang	4 Orang	-1 Orang
240	1-000 084	Bendahara	Kepala Sub Bagian Protokol	PELAKSANA	7	1 Orang	0 Orang	1 Orang
241	1-000 086	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Kepala Sub Bagian Protokol	PELAKSANA	7	1 Orang	0 Orang	1 Orang
242	1-000 087	Pranata Acara	Kepala Sub Bagian Protokol	PELAKSANA	6	1 Orang	2 Orang	-1 Orang
243	1-000 164	Petugas Protokol	Kepala Sub Bagian Protokol	PELAKSANA	5	0 Orang	3 Orang	-3 Orang
244	1-000 209	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana	Kepala Sub Bagian Protokol	PELAKSANA	6	0 Orang	0 Orang	0 Orang
245	1-000 257	Ajudan	Kepala Sub Bagian Protokol	PELAKSANA	6	0 Orang	0 Orang	0 Orang
246	1-000 258	Pengadministrasian Sarana dan Prasarana	Kepala Sub Bagian Protokol	PELAKSANA	5	0 Orang	0 Orang	0 Orang
247	1-000 282	Pranata Hubungan Masyarakat Pertama	Kepala Sub Bagian Protokol	FUNGSIONAL	8	0 Orang	0 Orang	0 Orang
248	1-000 284	Pengelola Keuangan	Kepala Sub Bagian Protokol	PELAKSANA		0 Orang	0 Orang	0 Orang
249	1-000 286	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Kepala Sub Bagian Protokol	PELAKSANA		0 Orang	0 Orang	0 Orang
250	1-000 287	Pengadministrasian Keuangan	Kepala Sub Bagian Protokol	PELAKSANA	5	0 Orang	0 Orang	0 Orang
251	1-000 219	Bendahara	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	PELAKSANA	7	0 Orang	0 Orang	0 Orang
252	1-000 220	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	PELAKSANA	6	0 Orang	0 Orang	0 Orang
253	1-000 221	Pengadministrasian Keuangan	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	PELAKSANA	5	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
254	1-000 222	Verifikator Keuangan	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	PELAKSANA	7	0 Orang	1 Orang	-1 Orang

255	1-000 223	Analisis Keuangan	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	PELAKSANA	7	1 Orang	1 Orang	0 Orang
256	1-000 224	Analisis Perencanaan	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	PELAKSANA	7	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
257	1-000 225	Pengadministrasian Perencanaan dan Program	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	PELAKSANA	5	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
258	1-000 226	Pengelola Bahan Perencanaan	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	PELAKSANA	6	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
259	1-000 227	Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	PELAKSANA	7	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
260	1-000 228	Pengadministrasian Umum	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	PELAKSANA	5	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
261	1-000 229	Pengelola Data	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	PELAKSANA	6	1 Orang	1 Orang	0 Orang
262	1-000 230	Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	PELAKSANA	7	0 Orang	1 Orang	-1 Orang
263	1-000 312	Analisis Aset Daerah	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	PELAKSANA		0 Orang	1 Orang	-1 Orang
264	1-000 349	Analisis Kebijakan Muda	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	FUNGSIONAL		0 Orang	1 Orang	-1 Orang
265	1-000 350	Analisis Kebijakan Pertama	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	FUNGSIONAL		0 Orang	1 Orang	-1 Orang
266	1-000 351	Perencanaan Muda	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	FUNGSIONAL		0 Orang	1 Orang	-1 Orang
267	1-000 352	Perencanaan Pertama	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	FUNGSIONAL		0 Orang	1 Orang	-1 Orang
268	1-000 353	Analisis Data dan Informasi	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	PELAKSANA		0 Orang	1 Orang	-1 Orang
269	1-000 355	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	FUNGSIONAL		0 Orang	1 Orang	-1 Orang
270	1-000 356	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Pertama	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	FUNGSIONAL		0 Orang	1 Orang	-1 Orang
271	1-000 357	Analisis Laporan Keuangan	KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	PELAKSANA		0 Orang	2 Orang	-2 Orang

Jumlah	124	416	-292	
--------	-----	-----	------	--

## DATA HONORER PER DESEMBER 2023

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	JABATAN	PENEMPATAN	BAGIAN
1	ANDRIAN FAJAR PRADIKTA, S.Pd.	LAKI-LAKI	S1	TENAGA ADMINISTRASI	BAGIAN UMUM	BAGIAN UMUM
2	DENNY KUSUMA DANI S.Kom.	LAKI-LAKI	S1	TENAGA ADMINISTRASI	BAGIAN UMUM	BAGIAN UMUM
3	LAILATUL FAJRIYAH, SE	PEREMPUAN	S1	TENAGA ADMINISTRASI	BAGIAN UMUM	BAGIAN UMUM
4	ARI SETYONING ATIK, SE	PEREMPUAN	S1	TENAGA ADMINISTRASI PPK	PKK	BAGIAN UMUM
5	HAMZAH SETIYAWAN, S.Pd.	LAKI-LAKI	S1	TENAGA ADMINISTRASI	SEKPRI STAF AHLI	BAGIAN UMUM
6	NURLAILISA KUKUH PURNAWATI, S.H.	PEREMPUAN	S1	TENAGA ADMINISTRASI	SEKPRI BUPATI	BAGIAN UMUM
7	PUJI LESTARI, S.Sos.	PEREMPUAN	S1	TENAGA ADMINISTRASI	BAGIAN UMUM	BAGIAN UMUM
8	RIFQI HERMAN ZULKARNAIN M., S.H.	LAKI-LAKI	S1	TENAGA ADMINISTRASI	BAGIAN UMUM	BAGIAN UMUM
9	SYAFIUL NOVNIANIA KARINA, S.Pd	PEREMPUAN	S1	TENAGA ADMINISTRASI	BAGIAN UMUM	BAGIAN UMUM
10	THERESIA CITRA NINGTIAS, S.E.	PEREMPUAN	S1	TENAGA ADMINISTRASI	SEKPRI SEKDA	BAGIAN UMUM
11	MAT YULIONO, ST	LAKI-LAKI	S1	TENAGA KELISTRIKAN	BAGIAN UMUM	BAGIAN UMUM
12	BAGUS ALIH HARI WIBOWO, SE	LAKI-LAKI	S1	TENAGA ADMINISTRASI	BAGIAN UMUM	BAGIAN UMUM
13	MOCH. ISWAHYUDI, S.Sos	LAKI-LAKI	S1	TENAGA ADMINISTRASI PPK	PKK	BAGIAN UMUM
14	NURUL HUDA, A.Md.	LAKI-LAKI	D3	TENAGA ADMINISTRASI	SEKPRI WABUP	BAGIAN UMUM
15	M. JOKO ISNAINI M.Z	LAKI-LAKI	SMA	TENAGA ADMINISTRASI	SEKPRI BUPATI	BAGIAN UMUM
16	SUHARTININGSIH	PEREMPUAN	SMA	TENAGA ADMINISTRASI DWP	DWP	BAGIAN UMUM
17	DIAN SRI AMBARWATI	PEREMPUAN	SMA	TENAGA ADM. KOPERASI PERTIWI	DWP	BAGIAN UMUM
18	E R N A W A T I	PEREMPUAN	SMA	TENAGA ADMINISTRASI PPK	DWP	BAGIAN UMUM
19	DITHA DWI NUGRAHENI	PEREMPUAN	SMA	TENAGA ADMINISTRASI	BAGIAN UMUM	BAGIAN UMUM
20	AYOK AMIRUDIN	LAKI-LAKI	SMA	TENAGA KEBERSIHAN	PKK	BAGIAN UMUM
21	TRI HANDOKO	LAKI-LAKI	SMA	TENAGA KEBERSIHAN	BAGIAN PBJ	BAGIAN UMUM
22	RUDI SISWANTO	LAKI-LAKI	SMA	TENAGA SOUND SYSTEM	BAGIAN UMUM	BAGIAN UMUM
23	KRISTIAN DWI CAHYONO	LAKI-LAKI	SMA	TENAGA SOUND SYSTEM	BAGIAN UMUM	BAGIAN UMUM
24	MUHAMAD ISHAQ	LAKI-LAKI	SMA	TENAGA KELISTRIKAN	BAGIAN UMUM	BAGIAN UMUM
25	DEDIK SISWANTO	LAKI-LAKI	SMA	SOPIR	BAGIAN UMUM	BAGIAN UMUM
26	ENDRO WITJAKSONO	LAKI-LAKI	SMA	SOPIR	BAGIAN UMUM	BAGIAN UMUM
27	HERU WIDYANTO	LAKI-LAKI	SMA	SOPIR	BAGIAN UMUM	BAGIAN UMUM
28	MUCHAMAD YUSUF BACHTIAR	LAKI-LAKI	SMA	TENAGA ADMINISTRASI	BAGIAN UMUM	BAGIAN UMUM
29	RUDI Satria SANTOSA	LAKI-LAKI	SMA	SOPIR	BAGIAN UMUM	BAGIAN UMUM
30	YUSA IRWAN	LAKI-LAKI	SMA	SOPIR	BAGIAN UMUM	BAGIAN UMUM
31	IMAM ZAINURI	LAKI-LAKI	SMA	SOPIR	BAGIAN UMUM	BAGIAN UMUM
32	SETIONO	LAKI-LAKI	SMA	SOPIR	RUMAH DINAS SEKDA	BAGIAN UMUM
33	GEMPUR BUDIMAN	LAKI-LAKI	SMA	TENAGA ADMINISTRASI	BAGIAN UMUM	BAGIAN UMUM
34	RHONDA	PEREMPUAN	S1	TENAGA ADMINISTRASI	BAGIAN UMUM	BAGIAN UMUM
35	ABDUL MUNIF	LAKI-LAKI	SMA	TENAGA KEBERSIHAN	PENDOPO	BAGIAN UMUM
36	ADIB ARIFUDIN	LAKI-LAKI	SMA	TENAGA KEBERSIHAN	PENDOPO	BAGIAN UMUM
37	APRIYA DWI PAMUNGKAS	LAKI-LAKI	SMA	TENAGA KEBERSIHAN	RUMAH DINAS SEKDA	BAGIAN UMUM
38	ARIS CAHYONO	LAKI-LAKI	SMA	TENAGA KEBERSIHAN	BAGIAN UMUM	BAGIAN UMUM
39	CHOIRUL FATIKIN	LAKI-LAKI	SMA	TENAGA KEBERSIHAN	BAGIAN UMUM	BAGIAN UMUM
40	EDDY SUMARSONO	LAKI-LAKI	SMA	TENAGA KEBERSIHAN	PENDOPO	BAGIAN UMUM
41	GATOT KURNIAWAN	LAKI-LAKI	SMA	TENAGA KEBERSIHAN	BAGIAN UMUM	BAGIAN UMUM
42	HARIYANTO	LAKI-LAKI	SMA	TENAGA KEBERSIHAN	PENDOPO	BAGIAN UMUM
43	KARISMA ADI S.	LAKI-LAKI	SMA	TENAGA KEBERSIHAN	PENDOPO	BAGIAN UMUM
44	LAILUL GHOFUR	LAKI-LAKI	SMA	TENAGA KEBERSIHAN	PENDOPO	BAGIAN UMUM
45	M. ARIF FATHONI	LAKI-LAKI	SMA	TENAGA KEBERSIHAN	BAGIAN UMUM	BAGIAN UMUM

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	JABATAN	PENEMPATAN	BAGIAN
46	M. RUDI FIRMANSYAH	LAKI-LAKI	SMA	TENAGA KEBERSIHAN	PENDOPO	BAGIAN UMUM
47	MOHAMMAD SAMSUDIN	LAKI-LAKI	SMA	TENAGA KEBERSIHAN	PENDOPO	BAGIAN UMUM
48	M. YUSROH	LAKI-LAKI	SMA	TENAGA KEBERSIHAN	BAGIAN UMUM	BAGIAN UMUM
49	MUDI KUSDianto	LAKI-LAKI	SMA	TENAGA KEBERSIHAN	RUMAH DINAS WABUP	BAGIAN UMUM
50	SANTOSO	LAKI-LAKI	SMA	TENAGA KEBERSIHAN	BAGIAN UMUM	BAGIAN UMUM
51	SAPUAN	LAKI-LAKI	SMP	TENAGA KEBERSIHAN	BAGIAN UMUM	BAGIAN UMUM
52	SLAMET WIDODO	LAKI-LAKI	SMP	TENAGA KEBERSIHAN	BAGIAN UMUM	BAGIAN UMUM
53	SUGIANTO	LAKI-LAKI	SMP	TENAGA KEBERSIHAN	PENDOPO	BAGIAN UMUM
54	TEJO SUWOYO	LAKI-LAKI	SMP	TENAGA KEBERSIHAN	PKK	BAGIAN UMUM
55	SAMIRAN	LAKI-LAKI	SMP	TENAGA KEBERSIHAN	BAGIAN UMUM	BAGIAN UMUM
56	MADENAN	LAKI-LAKI	SD	TENAGA KEBERSIHAN	BAGIAN UMUM	BAGIAN UMUM
57	ZEMI ADI MEIFENTA	LAKI-LAKI	SMA	TENAGA KEBERSIHAN	BAGIAN UMUM	BAGIAN UMUM
58	IKA DIAN SAFITRI	PEREMPUAN	SMA	TENAGA KEBERSIHAN	PENDOPO	BAGIAN UMUM
59	CHRISTIYANTO TRIPILU	LAKI-LAKI	SMA	HONORER BUPATI	BAGIAN UMUM	BAGIAN UMUM
60	YATMO	LAKI-LAKI	SD	HONORER BUPATI	RUMAH DINAS WABUP	BAGIAN UMUM
61	PUJIAN TO	LAKI-LAKI	SMP	HONORER BUPATI	BAGIAN UMUM	BAGIAN UMUM
62	ELOK ROSYIDA, SE	PEREMPUAN	S1	HONORER BUPATI	DWP	BAGIAN UMUM
63	HALIM MARZUQI, A.Md	LAKI-LAKI	D3	HONORER BUPATI	SEKPRI STAF AHLI	BAGIAN UMUM
64	IMAM KUSINI	LAKI-LAKI	SMA	HONORER BUPATI	BAGIAN UMUM	BAGIAN UMUM
65	ARIANTO	LAKI-LAKI	SMA	HONORER BUPATI	BAGIAN UMUM	BAGIAN UMUM
66	DEWI ADI RAHMA, Amd	PEREMPUAN	D3	HONORER BUPATI	BAGIAN PEREKONOMIAN	BAGIAN PEREKONOMIAN
67	MAEMUL HUDA, Spt	LAKI-LAKI	S1	HONORER BUPATI	BAGIAN PEREKONOMIAN	BAGIAN PEREKONOMIAN
68	LILIK ROSYIDAH, SH	PEREMPUAN	S1	HONORER BUPATI	BAGIAN HUKUM	BAGIAN HUKUM
69	PUTUT PUJIAN TOKO, SH	LAKI-LAKI	S1		BAGIAN HUKUM	BAGIAN HUKUM
70	PRIMA CAHYA NINGSIH, S.Pd.	PEREMPUAN	S1	PENGELOLA INFORMASI PRODUK HUKUM	BAGIAN HUKUM	BAGIAN HUKUM
71	BAMBANG IRAWAN	LAKI-LAKI	SMA	HONORER BUPATI	BAGIAN PEMERINTAHAN	BAGIAN PEMERINTAHAN
72	NORMA FITRIATI, SE	PEREMPUAN	S1	HONORER BUPATI	BAGIAN PEMBANGUNAN	BAGIAN PEMBANGUNAN
73	MOH. AUNUR ROFIQ, SE	LAKI-LAKI	S1	HONORER BUPATI/ TENAGA ADMINISTRASI	BAGIAN PROKOPIM	BAGIAN PROKOPIM
74	TINO HARIADI SETIANEGARA, SE	LAKI-LAKI	S1	HONORER BUPATI/ TENAGA ADMINISTRASI	BAGIAN PROKOPIM	BAGIAN PROKOPIM
75	AGENG AMINATUS SHOLIHAH, SE	PEREMPUAN	S1	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	BAGIAN PROKOPIM	BAGIAN PROKOPIM
76	ANITA, S.ST	PEREMPUAN	S1	TENAGA PENGADMINISTRASI UMUM	BAGIAN PROKOPIM	BAGIAN PROKOPIM
77	TRISMA KUSUMA RIZEKI, SH	LAKI-LAKI	S1	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	BAGIAN PROKOPIM	BAGIAN PROKOPIM
78	DEWA PRADHANA, S.Pd	LAKI-LAKI	S1	PENATA PENYUSUN PROGRAM KEGIATAN DAN LAPORAN	BAGIAN PROKOPIM	BAGIAN PROKOPIM
79	PRIYO SUHERIYONO	LAKI-LAKI	SMA	PENATA PELAKSANA DOKUMENTASI	BAGIAN PROKOPIM	BAGIAN PROKOPIM
80	HARIYONO	LAKI-LAKI	SMA	TENAGA PENGADMINISTRASI UMUM	BAGIAN PROKOPIM	BAGIAN PROKOPIM
81	LELYTHA ZIADHA A'YUNINA , S.AP	PEREMPUAN	S1	TENAGA PENGADMINISTRASI UMUM	BAGIAN PROKOPIM	BAGIAN PROKOPIM
82	INDANA ZAHROTUL FIRDAUS	PEREMPUAN	SMA	TENAGA ADMINISTRASI	BAGIAN ORGANISASI	BAGIAN ORGANISASI
83	AHMAD SYAMSUN FARIDI, S.Thi	LAKI-LAKI	S1	HONORER BUPATI	BAGIAN KESRA	BAGIAN KESRA
84	M. SYAIFUDDIN ZUHRI, S.Th.I	LAKI-LAKI	S1	HONORER BUPATI	BAGIAN KESRA	BAGIAN KESRA
85	MOH. NUR CHOLISON	LAKI-LAKI	SMA	PENGADMINISTRASI PERSURATAN	BAGIAN KESRA	BAGIAN KESRA
86	MARIYAH ULFA	PEREMPUAN	SMA	PENGADMINISTRASI RAPAT	BAGIAN KESRA	BAGIAN KESRA
87	FEBRIA EKA RAHMAWATI, S.Kom	PEREMPUAN	S1	PENGELOLA DATA	BAGIAN KESRA	BAGIAN KESRA
88	MOH. ABDUL HARIS, S.Pd.I	LAKI-LAKI	S1	ANALIS SARANA PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT	BAGIAN KESRA	BAGIAN KESRA

PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
DATA PEKAWAI NEGERI SIPIL  
PER DESEMBER 2023

No.	NIP	NIP Baru	Nama	JENIS KELAMIN	Gol CPNS	TMT CPNS	MKT CPNS	MKB CPNS	Gol PNS	TMT PNS	MKT PNS	MKB PNS	Gol Ruang	TMT Pangkat	Tipe Pegawai	Eselon	Jabatan	TMT Jabatan	Satuan Kerja	Satuan Kerja Detail	Pendidikan	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status
1	050068457	19720710 1980031 010	AGUS PURNOMO, S.H., M.Si.	LAKILAKI	IIa	01-03-1998	0	0	IIa	01-08-1999	1	5	I/c	01-10-2022	Pejabat	Ia	Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang	24-12-2021	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	S-2 - S-2 LLMU EKONOMI	LAMONGAN	10-07-1972	PNS
2		19760501 2001121 002	Sudiro Setono, S.Sos., M.Si.	LAKILAKI									I/b		Pejabat		Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Kemasayektakan		Sekretariat Daerah	Staf Ahli - Sekretariat Daerah			01-05-1976	PNS
3		19670917 1964031 009	Drs. MOCHAMAD SALEH, M.Si.	LAKILAKI									I/c		Pejabat				Sekretariat Daerah	Staf Ahli - Sekretariat Daerah			17-09-1967	PNS
4		19700113 1997032 003	Sri Surjati, S.Si., M.Si.	PEREMPUAN									I/b		Pejabat		Staf Ahli Bidang Keuangan, Ekonomi, & Pembangunan		Sekretariat Daerah	Staf Ahli - Sekretariat Daerah			13-01-1970	PNS
5	140240142	19640316 1980032 013	Dr. dig. SUBANDRIYAH, MKP	PEREMPUAN	IIa	01-03-1989	0	0	IIa	01-09-1991	2	6	I/c	01-04-2015	Pejabat	IIb	Asisten Administrasi Umum	13-08-2021	Sekretariat Daerah	Asisten Administrasi Umum - Sekretariat Daerah	S-3/Diploma S-3 PENGEKMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	JOMBANG	16-03-1964	PNS
6	010225026	19661206 1989021 002	Drs. PURWANTO, MKP.	LAKILAKI	IIa	01-02-1989	0	0	IIa	01-09-1990	1	7	I/c	01-04-2019	Pejabat	IIb	Asisten Pemerintahan dan Kesra	13-08-2021	Sekretariat Daerah	Asisten Pemerintahan dan Kesra - Sekretariat Daerah	S-2 - S-2 MAGISTER KEBUAKAAN PUBLIK	Madun	06-12-1966	PNS
7	132106597	19641211 1984121 002	Drs. WIGNYO HANDOKO, M.Si	LAKILAKI	IIa	01-12-1994	0	0	IIa	01-01-1996	1	1	I/c	01-10-2022	Pejabat	IIb	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	17-03-2022	Sekretariat Daerah	Asisten Perekonomian dan Pembangunan - Sekretariat Daerah	S-2 - S-2 MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK	JOMBANG	11-12-1964	PNS
8	510125521	19700714 1997031 013	ADI PRASETYO, S.P., M.Si.	LAKILAKI	IIa	01-03-1997	0	0	IIa	01-07-1998	1	4	I/b	01-04-2017	Pejabat	IIa	Kepala Bagian Organisasi	08-01-2021	Sekretariat Daerah	Bagian Organisasi - Asisten Administrasi Umum - Sekretariat Daerah	S-2 - S-2 MAGISTER EKONOMI PEMBANGUNAN	JOMBANG	14-07-1970	PNS
9	510116286	19670717 1992022 003	AMNATUR ROKHYAH, S.E., MKP.	PEREMPUAN	IIa	01-02-1992	0	0	IIa	01-08-1993	1	6	I/b	01-04-2019	Pejabat	IIa	Kepala Bagian Perekonomian Setda	12-10-2021	Sekretariat Daerah	Bagian Perekonomian - Asisten Perekonomian dan Pembangunan - Sekretariat Daerah	S-2 - S-2 MAGISTER KEBUAKAAN PUBLIK	PASURUAN	17-07-1967	PNS
10	510114829	19661206 1990111 002	MOCHAMAD HASAN, S.Sos., M.Si	LAKILAKI	IIa	01-11-1990	0	0	IIa	01-03-1992	1	4	I/b	01-10-2020	Pejabat	IIa	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah	01-07-2022	Sekretariat Daerah	Bagian Umum - Asisten Administrasi Umum - Sekretariat Daerah	S-2 - S-2 MAGISTER ILMU EKONOMI	Jombang	05-12-1966	PNS
11	510112769	19661012 1990031 008	MRON, S.P., M.Si	LAKILAKI	IIa	01-03-1990	0	0	IIa	01-10-1991	0	7	I/b	01-04-2021	Pejabat	IIa	Kepala Bagian Perencanaan Dan Keuangan Sekretariat Daerah	01-07-2022	Sekretariat Daerah	Bagian Perencanaan dan Keuangan - Asisten Administrasi Umum - Sekretariat Daerah	S-2 - S-2 ADMINISTRASI PUBLIK	GRESIK	12-10-1966	PNS
12	510130837	19690904 2001121 005	SUPRADIGDO, ST., M.Si	LAKILAKI	IIa	01-12-2001	0	0	IIa	01-12-2003	2	0	I/b	01-10-2021	Pejabat	IIa	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	08-01-2021	Sekretariat Daerah	Bagian Administrasi Pembangunan - Asisten Perekonomian dan Pembangunan - Sekretariat Daerah	S-2 - S-2 MAGISTER ILMU EKONOMI	MADUN	04-09-1969	PNS
13	510116481	19690309 1992021 001	JOKO MURCOYO, ST., M.Si.	LAKILAKI	IIa	01-02-1992	0	0	IIa	01-11-1993	1	9	I/b	01-10-2021	Pejabat	IIa	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa	08-01-2021	Sekretariat Daerah	Bagian Pengadaan Barang/Jasa - Asisten Perekonomian dan Pembangunan - Sekretariat Daerah	S-2 - S-2 MAGISTER ILMU EKONOMI	JOMBANG	09-03-1969	PNS
14	510134981	19690306 2003122 009	YALMASSYFA, M.Si	PEREMPUAN	IIa	18-12-2003	0	0	IIa	29-07-2005	1	8	I/a	01-04-2020	Pejabat	IIa	Kepala Bagian Hukum	02-11-2022	Sekretariat Daerah	Bagian Hukum - Asisten Pemerintahan dan Kesra - Sekretariat Daerah	S-2 - S-2 LLMU EKONOMI	JOMBANG	06-06-1969	PNS
15	010244316	19740414 1993021 001	SUGANTO, S.Sos	LAKILAKI	IIa	01-02-1993	0	0	IIa	01-09-1994	1	7	I/a	01-04-2022	Pejabat	IIa	Kepala Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan	09-03-2023	Sekretariat Daerah	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan - Asisten Administrasi Umum - Sekretariat Daerah	S-1/Sarjana - S-1 LLMU ADMINISTRASI NEGARA	MADUN	14-04-1974	PNS
16		19810910 2011012 005	ERKA SOPHIA DARMOKO, SE	PEREMPUAN	IIa	01-01-2011	0	0	IIa	01-04-2012	1	3	III	01-04-2023	Pejabat	I/a	Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan	17-03-2022	Sekretariat Daerah	Sub Bagian Komunikasi Pimpinan - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan - Asisten Administrasi Umum - Sekretariat Daerah	S-1/Sarjana - S-1 LLMU EKONOMI PEMBANGUNAN	SIDOARJO	10-09-1981	PNS
17		19860308 2011012 007	KE ALDILA WIMAWARDHAN, S.E., MM	PEREMPUAN	IIa	01-01-2011	0	0	IIa	01-04-2012	1	3	III	01-04-2023	Pejabat	I/a	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli Dan Kepegawaian	08-01-2021	Sekretariat Daerah	Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian - Bagian Umum - Asisten Administrasi Umum - Sekretariat Daerah	S-2 - S-2 MAGISTER MANAJEMEN	NGANJUK	08-03-1986	PNS
18		19790823 2011011 005	YUDHA DEWANDRIANTO, S.T., MKP.	LAKILAKI	IIa	01-01-2011	0	0	IIa	01-04-2012	1	3	III	01-04-2023	Pejabat	I/a	Kepala Sub Bagian Perengkapan	08-01-2021	Sekretariat Daerah	Sub Bagian Perengkapan - Bagian Umum - Asisten Administrasi Umum - Sekretariat Daerah	S-2 - S-2 KEBUAKAAN PUBLIK	KEDIRI	23-08-1979	PNS
19		19891117 2010061 002	RADEN MUHAMMAD JUWARKATU AREF WIJAYA, S.STP	LAKILAKI	IIa	01-06-2012	0	0	IIa	01-06-2013	1	0	III	01-10-2023	Pejabat	I/a	Kepala Sub Bagian Protokol	12-10-2021	Sekretariat Daerah	Sub Bagian Protokol - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan - Asisten Administrasi Umum - Sekretariat Daerah	Diploma IV - D-IV MANAJEMEN PEMERINTAHAN	JOMBANG	17-11-1989	PNS
20	510141170	19821228 2005012 009	RATH RATNAWATI, S.AP	PEREMPUAN	IIa	01-01-2005	0	0	IIa	05-09-2006	1	8	III	01-04-2020	Pejabat	I/a	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga	08-01-2021	Sekretariat Daerah	Sub Bagian Rumah Tangga - Bagian Umum - Asisten Administrasi Umum - Sekretariat Daerah	S-1/Sarjana - S-1 MANAJEMEN PEMBANGUNAN DAERAH	JOMBANG	29-12-1982	PNS
21	380056471	19690325 1984031 007	Drs. SUPRIADI	LAKILAKI	IIa	01-03-1994	0	0	IIa	01-08-1995	1	5	I/a	01-10-2013	Lain-lain		Analisis Kebijakan Ahli Muda	03-01-2022	Sekretariat Daerah	Bagian Kesejahteraan Rakyat - Asisten Pemerintahan dan Kesra - Sekretariat Daerah	S-1/Sarjana - S-1 AGAMA TARBIYAH	MOJOKERTO	25-03-1969	PNS
22	380054866	19680217 1993122 002	Dra. NITA HERYANI WIDYASTUTI, M.Si	PEREMPUAN	IIa	01-12-1993	0	0	IIa	01-08-1995	1	8	I/a	01-04-2014	Lain-lain		Analisis Kebijakan Ahli Muda	03-01-2022	Sekretariat Daerah	Bagian Organisasi - Asisten Administrasi Umum - Sekretariat Daerah	S-2 - S-2 LLMU EKONOMI	MOJOKERTO	17-02-1968	PNS
23	010266457	19830717 2001121 002	YULIANTO HIDAYANA, S.STP, M.PSP	LAKILAKI	IIa	01-12-2001	0	0	IIa	01-08-2003	1	8	I/a	01-10-2021	Lain-lain		Analisis Kebijakan Ahli Muda	03-01-2022	Sekretariat Daerah	Bagian Organisasi - Asisten Administrasi Umum - Sekretariat Daerah	S-2 - S-2 MAGISTER HUKUM SOSIAL SPESIALIS	BLITAR	17-07-1983	PNS
24	510123820	19730921 1985022 001	LLLLU SETYOHAHYUN, S. Kom., M.Si	PEREMPUAN	IIa	01-02-1996	0	0	IIa	01-10-1997	1	8	I/a	01-04-2022	Lain-lain		Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda	03-01-2022	Sekretariat Daerah	Bagian Perencanaan dan Keuangan - Asisten Administrasi Umum - Sekretariat Daerah	S-2 - S-2 MAGISTER ILMU EKONOMI	JOMBANG	21-09-1973	PNS
25	510125093	19751215 1987032 004	ERNA ZURODDA, SE., ME.	PEREMPUAN	IIa	01-03-1997	0	0	IIa	01-03-1999	2	0	I/a	01-04-2023	Lain-lain		Analisis Kebijakan Ahli Muda	03-01-2022	Sekretariat Daerah	Bagian Perekonomian - Asisten Perekonomian dan Pembangunan - Sekretariat Daerah	S-2 - S-2 MAGISTER EKONOMI	JOMBANG	15-12-1975	PNS
26	010251950	19690123 1994032 008	Dra. SETYO ELOK WINDAYAN	PEREMPUAN	IIa	03-01-1994	0	0	IIa	09-01-1995	1	2	III	01-04-2006	Lain-lain		Analisis Kebijakan Ahli Muda	01-03-2022	Sekretariat Daerah	Bagian Perekonomian - Asisten Perekonomian dan Pembangunan - Sekretariat Daerah	S-1/Sarjana - S-1 EKONOMI MANAJEMEN KEUANGAN	JOMBANG	23-01-1969	PNS
27	510116477	19690624 1992021 002	LUGMANUDDIN, SH	LAKILAKI	IIa	01-02-1992	0	0	IIa	01-10-1993	1	8	III	01-04-2014	Lain-lain		Analisis Kebijakan Ahli Muda	03-01-2022	Sekretariat Daerah	Bagian Kesejahteraan Rakyat - Asisten Pemerintahan dan Kesra - Sekretariat Daerah	S-1/Sarjana - S-1 LLMU HUKUM	JOMBANG	24-06-1969	PNS
28	510138900	19781210 2003121 007	DODK AGUS HARIYANTO, ST.	LAKILAKI	IIa	01-12-2003	0	0	IIa	01-05-2006	2	4	III	01-04-2016	Lain-lain		Analisis Kebijakan Ahli Muda	03-01-2022	Sekretariat Daerah	Bagian Administrasi Pembangunan - Asisten Perekonomian dan Pembangunan - Sekretariat Daerah	S-1/Sarjana - S-1 TEKNIK SIPIL PENGARUAN	JOMBANG	10-12-1978	PNS
29	010265957	19811111 2000121 001	IMAM MANSUR, S.STP	LAKILAKI	IIa	01-12-2000	0	0	IIa	01-10-2002	1	10	III	01-10-2016	Lain-lain		Analisis Kebijakan Ahli Muda	03-01-2022	Sekretariat Daerah	Bagian Tata Pemerintahan dan Kesra - Sekretariat Daerah	Diploma IV - D-IV STPDN	JOMBANG	11-11-1981	PNS
30	380058185	19690228 1997031 011	UMAR, S.Ag	LAKILAKI	IIa	01-03-1997	0	0	IIa	01-06-1999	2	3	III	01-04-2019	Lain-lain		Analisis Kebijakan Ahli Muda	03-01-2022	Sekretariat Daerah	Bagian Kesejahteraan Rakyat - Asisten Pemerintahan dan Kesra - Sekretariat Daerah	S-1/Sarjana - S-1 TARBIYAH PAI	JOMBANG	28-02-1969	PNS
31	010260181	19770515 1997032 002	JARIYAH, S.IP	PEREMPUAN	IIa	01-03-1997	0	0	IIa	01-11-1998	1	8	III	01-04-2020	Lain-lain		Analisis Kebijakan Ahli Muda	03-01-2022	Sekretariat Daerah	Bagian Organisasi - Asisten Administrasi Umum - Sekretariat Daerah	S-1/Sarjana - S-1 LLMU PEMERINTAHAN	TEMANGGUNG	15-05-1977	PNS
32	510207228	19690909 2008012 023	Dra. ANI ROHMAH	PEREMPUAN	IIa	01-01-2008	4	8	IIa	01-03-2010	6	10	III	01-04-2020	Lain-lain		Analisis Kebijakan Ahli Muda	03-01-2022	Sekretariat Daerah	Bagian Perekonomian - Asisten Perekonomian dan Pembangunan - Sekretariat Daerah	S-1/Sarjana - LLMU PENDIDIKAN	MALANG	09-09-1969	PNS
33	510128493	19781124 1998011 001	NOVI AGUNG KURNAWAN, SE., MT	LAKILAKI	IIa	01-01-1999	0	0	IIa	01-11-2000	1	10	III	01-04-2021	Lain-lain		Analisis Kebijakan Ahli Muda	03-01-2022	Sekretariat Daerah	Bagian Administrasi Pembangunan - Asisten Perekonomian dan Pembangunan - Sekretariat Daerah	S-2 - ENK SIPIL DAN MANAJEMEN ASET	KEBUMEN	24-11-1978	PNS
34	010272781	19870729 2007012 001	WINA ARYUNTA, S.IP	PEREMPUAN	IIa	01-01-2007	0	0	IIa	01-05-2008	1	4	III	01-10-2021	Lain-lain		Analisis Kebijakan Ahli Muda	03-01-2022	Sekretariat Daerah	Bagian Tata Pemerintahan - Asisten Pemerintahan dan Kesra - Sekretariat Daerah	S-1/Sarjana - LLMU PEMERINTAHAN	CLACAP	29-07-1987	PNS
35		19810727 2010012 013	VINI MAWARNI, S.AP., M.Si	PEREMPUAN	IIa	01-01-2010	0	0	IIa	01-03-2011	1	2	III	01-04-2022	Lain-lain		Analisis Kebijakan Ahli Muda	03-01-2022	Sekretariat Daerah	Bagian Administrasi Pembangunan - Asisten Perekonomian dan Pembangunan - Sekretariat Daerah	S-2 - S-2 MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK	JOMBANG	27-07-1981	PNS

No.	NIP	NIP Baru	Nama	JENIS KELAMIN	Gol CPNS	TMT CPNS	MKT CPNS	MKB CPNS	Gol PNS	TMT PNS	MKT PNS	MKB PNS	Gol Ruang	TMT Pengkat	Tipe Pegawai	Eselon	Jabatan	TMT Jabatan	Satuan Kerja	Satuan Kerja Detail	Pendidikan	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status
36	1983082201012014		LINDA ANUGERAHINI, SH	PEREMPUAN	Ia	01-01-2010	0	0	Ia	01-03-2011	1	2	III	01-04-2022	Lain-lain		Analisis Kebijakan Muda	03-01-2022	Sekretariat Daerah	Bagian Tata Pemerintahan dan Kesra - Sekretariat Daerah	S-1/Sarjana - S-1 ILMU HUKUM	SURABAYA	22-08-1983	PNS
37	198206172010011019		INDRA PRASETYA NUGRAHA, SH	LAKI LAKI	Ia	01-01-2010	2	0	Ia	24-02-2011	2	11	III	01-04-2022	Lain-lain		Analisis Hukum Ahli Muda	03-01-2022	Sekretariat Daerah	Bagian Hukum - Asisten Pemerintahan dan Kesra - Sekretariat Daerah	S-1/Sarjana - S-1 ILMU HUKUM	JOMBANG	17-05-1982	PNS
38	1986072920110110505		HANGGA BUDI PURWANTO P., SE	LAKI LAKI	Ia	01-01-2011	0	0	Ia	01-04-2012	1	3	III	01-04-2023	Staf		Analisis Sistem Informasi	01-03-2021	Sekretariat Daerah	Bagian Pengadaan Barang/Jasa - Asisten Perekonomian dan Pembangunan - Sekretariat Daerah	S-1/Sarjana - S-1 EKONOMI MANAJEMEN	MOJOKERTO	29-07-1986	PNS
39	198507072011012011		YULI TRANINGSIH, ST	PEREMPUAN	Ia	01-01-2011	0	0	Ia	01-04-2012	1	3	III	01-04-2023	Lain-lain		Pengelola Pengadaan Barang/jasa Muda	03-01-2022	Sekretariat Daerah	Bagian Pengadaan Barang/Jasa - Asisten Perekonomian dan Pembangunan - Sekretariat Daerah	S-1/Sarjana - S-1 TEKNIK SIPIL	JOMBANG	07-07-1985	PNS
40	198509132011011004		M. ARIF CAHYO SAPUTRO, S.FIL, MM	LAKI LAKI	Ia	01-03-2011	0	0	Ia	01-04-2012	1	3	III	01-04-2023	Lain-lain		Pengelola Pengadaan Barang/jasa Muda	03-01-2022	Sekretariat Daerah	Bagian Pengadaan Barang/Jasa - Asisten Perekonomian dan Pembangunan - Sekretariat Daerah	S-2 - MAGISTER MANAJEMEN	JOMBANG	13-09-1985	PNS
41	198302042011012007		FEBRIANTI INDRANA, MM	PEREMPUAN	Ia	01-01-2011	0	0	Ia	01-04-2012	1	3	III	01-04-2023	Lain-lain		Analisis Kebijakan Ahli Muda	03-01-2022	Sekretariat Daerah	Bagian Perencanaan dan Keuangan - Asisten Administrasi Umum - Sekretariat Daerah	S-2 - S-2 MAGISTER MANAJEMEN	JOMBANG	04-02-1983	PNS
42	510141164	197912212005011005	BAGUS SURYA LAKSANA, SP	LAKI LAKI	Ic	01-01-2005	3	0	Ic	01-09-2006	4	8	Ic	01-04-2019	Lain-lain		Pengelola Pengadaan Barang/jasa Muda	01-12-2020	Sekretariat Daerah	Bagian Pengadaan Barang/Jasa - Asisten Perekonomian dan Pembangunan - Sekretariat Daerah	S-1/Sarjana - S-1 PERTANIAN AGRONOMI	PEKALONGAN	21-12-1979	PNS
43	198807122014022003		IKA SAGITA, S.E.	PEREMPUAN	Ia	01-02-2014	0	0	Ia	01-02-2015	1	0	Ic	01-04-2022	Staf		Analisis Akurabilitas Kinerja Aparatur	01-08-2023	Sekretariat Daerah	Bagian Organisasi - Asisten Administrasi Umum - Sekretariat Daerah	S-1/Sarjana - S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	JOMBANG	12-07-1988	PNS
44	510121354	197512221994021001	SUWANDI, SE	LAKI LAKI	Ib	12-07-1994	0	0	Ib	01-08-1995	1	0	Ic	01-10-2022	Lain-lain		Analisis Kebijakan Ahli Muda	01-01-2023	Sekretariat Daerah	Bagian Hukum - Asisten Pemerintahan dan Kesra - Sekretariat Daerah	S-1/Sarjana - S-1 EKONOMI AKUNTANSI	KEDIRI	22-12-1975	PNS
45	197909182005012008		NUR FITRIYAH, SE	PEREMPUAN	Ia	01-01-2005	0	0	Ia	01-07-2006	1	6	Ic	01-04-2023	Staf		Penyusunan Rencana Kegiatan Dan Anggaran	01-03-2021	Sekretariat Daerah	Bagian Perencanaan dan Keuangan - Asisten Administrasi Umum - Sekretariat Daerah	S-1/Sarjana - ILMU EKONOMI & STUDI PEMBANGUNAN	MOJOKERTO	18-09-1979	PNS
46	198612112015051001		AHMAD AZWAR ANAS, S. Kom	LAKI LAKI	Ia	01-05-2015	0	0	Ia	01-02-2017	1	9	Ic	01-10-2023	Staf		Penyusunan Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria	27-01-2022	Sekretariat Daerah	Bagian Organisasi - Asisten Administrasi Umum - Sekretariat Daerah	S-1/Sarjana - S-1 ILMU KOMPUTER	JOMBANG	11-12-1986	PNS
47	198603112015052001		URILUSANTI, SE	PEREMPUAN	Ia	01-05-2015	0	0	Ia	01-06-2016	1	1	Ic	01-10-2023	Staf		Penyusunan Program Anggaran Dan Pelaporan	11-01-2021	Sekretariat Daerah	Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian - Bagian Umum - Asisten Administrasi Umum - Sekretariat Daerah	S-2 - S-2 EKONOMI PEMBANGUNAN	JOMBANG	11-03-1986	PNS
48	198709182015051001		SEPTYANA ADI PRAMONO, S.IAN	LAKI LAKI	Ia	01-05-2015	0	0	Ia	01-06-2016	2	0	Ic	01-10-2023	Staf		Analisis Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	11-01-2021	Sekretariat Daerah	Bagian Pengadaan Barang/Jasa - Asisten Perekonomian dan Pembangunan - Sekretariat Daerah	S-1/Sarjana - S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA	JOMBANG	18-09-1987	PNS
49	198203042015051001		ANDRI DWI PRYO UTOMO, ST	LAKI LAKI	Ia	01-05-2015	0	0	Ia	01-07-2016	1	2	Ic	01-10-2023	Staf		Analisis Manajemen Risiko	01-03-2023	Sekretariat Daerah	Bagian Pengadaan Barang/Jasa - Asisten Perekonomian dan Pembangunan - Sekretariat Daerah	S-1/Sarjana - S-1 TEKNIK INDUSTRI	KEDIRI	04-03-1982	PNS
50	198701052015051001		RSAM DIAN BACHTIAR, SH	LAKI LAKI	Ia	01-08-2015	0	0	Ia	01-02-2017	1	6	Ic	01-10-2023	Staf		Analisis Kerjasama Lintas Sektor	11-01-2021	Sekretariat Daerah	Bagian Tata Pemerintahan - Asisten Pemerintahan dan Kesra - Sekretariat Daerah	S-1/Sarjana - S-1 ILMU HUKUM	SRAGEN	05-01-1987	PNS
51	510135140	197303012003122002	D. DA MARIANA, S.P., M.E.	PEREMPUAN	Ia	01-12-2003	0	0	Ia	01-04-2005	1	4	Ic	01-10-2023	Staf		Analisis Program Pembangunan	11-01-2021	Sekretariat Daerah	Bagian Administrasi Pembangunan - Asisten Perekonomian dan Pembangunan - Sekretariat Daerah	S-2 - S-2 MAGISTER ILMU EKONOMI	JOMBANG	01-03-1973	PNS
52	510110268	198902261989032004	SADAH	PEREMPUAN	Ia	01-04-1989	0	0	Ia	30-07-1990	2	0	Ib	01-04-2009	Staf		Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	11-01-2021	Sekretariat Daerah	Bagian Tata Pemerintahan - Asisten Pemerintahan dan Kesra - Sekretariat Daerah	SLTA - SMEA TATA NGA	JOMBANG	26-02-1969	PNS
53	510116899	198907081992022003	UMATI	PEREMPUAN	Ia	01-02-1992	0	0	Ia	01-10-1993	1	8	Ib	01-04-2012	Staf		Pengolah Data Kelengkapan	11-01-2021	Sekretariat Daerah	Bagian Organisasi - Asisten Administrasi Umum - Sekretariat Daerah	SLTA Kejuaran - SMK ADMINISTRASI PERKANTORAN	NGANJUK	08-07-1969	PNS
54	198611202015052001		DIAN RAKSI PADMASARI, SH	PEREMPUAN	Ia	01-05-2015	0	0	Ia	01-06-2016	1	1	Ib	01-10-2019	Lain-lain		Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama	01-12-2021	Sekretariat Daerah	Bagian Hukum - Asisten Pemerintahan dan Kesra - Sekretariat Daerah	S-1/Sarjana - S-1 ILMU HUKUM	SURAKARTA	20-11-1986	PNS
55	198410072015051001		ARFANDY PURBAWAN, SH	LAKI LAKI	Ia	01-05-2015	0	0	Ia	01-06-2016	1	1	Ib	01-10-2019	Lain-lain		Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama	01-12-2021	Sekretariat Daerah	Bagian Hukum - Asisten Pemerintahan dan Kesra - Sekretariat Daerah	S-1/Sarjana - S-1 ILMU HUKUM	JOMBANG	07-10-1984	PNS
56	198908022015052001		IMAS AYU EMLIA, SH	PEREMPUAN	Ia	01-05-2015	0	0	Ia	01-06-2016	1	1	Ib	01-10-2019	Staf		Analisis Permasalahan Hukum	11-01-2021	Sekretariat Daerah	Bagian Hukum - Asisten Pemerintahan dan Kesra - Sekretariat Daerah	S-1/Sarjana - S-1 ILMU HUKUM	JOMBANG	02-09-1989	PNS
57	198312242015051001		IMAM KURNAWAN, S.H.	LAKI LAKI	Ia	01-05-2015	0	0	Ia	01-06-2016	1	1	Ib	01-10-2019	Lain-lain		Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama	01-12-2021	Sekretariat Daerah	Bagian Hukum - Asisten Pemerintahan dan Kesra - Sekretariat Daerah	S-1/Sarjana - S-1 ILMU HUKUM	JOMBANG	24-12-1983	PNS
58	510145772	198609152005012002	DEVI RESTA PRAMITASARI, S.H.	PEREMPUAN	Ia	01-01-2005	0	0	Ia	01-12-2006	1	11	Ib	01-04-2020	Staf		Analisis Jabatan	11-01-2021	Sekretariat Daerah	Bagian Organisasi - Asisten Administrasi Umum - Sekretariat Daerah	S-1/Sarjana - S-1 ILMU HUKUM	MADRID	15-09-1986	PNS
59	510141184	198403162005012006	IVA KURNIAWATI, S.P	PEREMPUAN	Ia	01-04-2005	0	0	Ia	05-09-2006	1	8	Ib	01-04-2020	Staf		Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/jasa	01-03-2023	Sekretariat Daerah	Bagian Pengadaan Barang/Jasa - Asisten Perekonomian dan Pembangunan - Sekretariat Daerah	S-1/Sarjana - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	JOMBANG	16-03-1984	PNS
60	197070782010012003		PURI INDAH BINTARI, S.P.	PEREMPUAN	Ic	01-01-2010	8	8	Ic	01-02-2010	8	8	Ib	01-04-2020	Staf		Pengadministrasi Umum	11-01-2021	Sekretariat Daerah	Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian - Bagian Umum - Asisten Administrasi Umum - Sekretariat Daerah	S-1/Sarjana - ILMU PEMERINTAHAN	JOMBANG	09-07-1977	PNS
61	198401012010011034		SYAHRIR PRIBADI, ST	LAKI LAKI	Ic	01-01-2010	3	0	Ic	01-03-2011	4	2	Ib	01-04-2020	Lain-lain		Pengelola Pengadaan Barang/jasa Pertama	01-12-2020	Sekretariat Daerah	Bagian Pengadaan Barang/Jasa - Asisten Perekonomian dan Pembangunan - Sekretariat Daerah	S-1/Sarjana - S-1 TEKNIK ELEKTRO	SITUBONDO	01-01-1984	PNS
62	510141178	197705152005012015	RINA ASTARI, S.P	PEREMPUAN	Ia	01-01-2005	0	0	Ia	01-09-2006	1	8	Ib	01-04-2020	Lain-lain		Pengelola Pengadaan Barang/jasa Pertama	01-02-2023	Sekretariat Daerah	Bagian Pengadaan Barang/Jasa - Asisten Perekonomian dan Pembangunan - Sekretariat Daerah	S-1/Sarjana - ILMU PEMERINTAHAN	MOJOKERTO	15-05-1977	PNS
63	510141172	198101182005012011	UNI ZAMROH, SE	PEREMPUAN	Ia	01-01-2005	0	0	Ia	01-09-2006	1	8	Ib	01-04-2020	Lain-lain		Pengelola Pengadaan Barang/jasa Pertama	01-12-2020	Sekretariat Daerah	Bagian Pengadaan Barang/Jasa - Asisten Perekonomian dan Pembangunan - Sekretariat Daerah	S-1/Sarjana - S-1 EKONOMI AKUNTANSI	JOMBANG	18-01-1981	PNS
64	510141173	197911012005011008	KOESBIANTORO, S.A.P	LAKI LAKI	Ia	01-01-2005	0	0	Ia	01-09-2006	1	8	Ib	01-04-2020	Staf		Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik	16-09-2022	Sekretariat Daerah	Bagian Pengadaan Barang/Jasa - Asisten Perekonomian dan Pembangunan - Sekretariat Daerah	S-1/Sarjana - S-1 ADMINISTRASI PUBLIK	JOMBANG	01-11-1979	PNS
65	510141196	197811182005012011	ARYANTI NURWAHYUNI, S.P., M.E.	PEREMPUAN	Ia	01-01-2005	0	0	Ia	01-09-2006	1	8	Ib	01-04-2020	Staf		Pengelola Data	22-09-2023	Sekretariat Daerah	Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian - Bagian Umum - Asisten Administrasi Umum - Sekretariat Daerah	S-2 - S-2 ILMU EKONOMI	KEDIRI	18-11-1978	PNS
66	510141191	198407282005011002	ADISURYANDANA, S.P	LAKI LAKI	Ia	01-01-2005	0	0	Ia	01-09-2006	1	8	Ib	01-04-2020	Staf		Penyusunan Rencana Kegiatan Dan Anggaran	26-04-2022	Sekretariat Daerah	Bagian Tata Pemerintahan - Asisten Pemerintahan dan Kesra - Sekretariat Daerah	S-1/Sarjana - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	JOMBANG	26-07-1984	PNS
67	132230810	197010251999031004	HARIONO	LAKI LAKI	Ib	01-03-1999	3	0	Ib	01-05-2000	4	2	Ib	01-04-2022	Staf		Pengadministrasi Keuangan	09-03-2023	Sekretariat Daerah	Bagian Perekonomian - Asisten Perekonomian dan Pembangunan - Sekretariat Daerah	SLTA - SMA IPA	JOMBANG	25-10-1970	PNS
68	510150446	198403312006041009	AROHMAN, SE	LAKI LAKI	Ia	01-04-2006	0	0	Ia	01-01-2008	1	9	Ib	01-04-2022	Lain-lain		Pengelola Pengadaan Barang/jasa Pertama	01-09-2022	Sekretariat Daerah	Bagian Pengadaan Barang/Jasa - Asisten Perekonomian dan Pembangunan - Sekretariat Daerah	S-1/Sarjana - S-1 EKONOMI MANAJEMEN	JOMBANG	31-03-1984	PNS
69	640047918	197905032007012022	EVI ULISTIANA, SE	PEREMPUAN	Ia	01-01-2007	5	0	Ia	01-12-2008	6	11	Ib	01-04-2022	Staf		Analisis Kesejahteraan Rakyat	14-04-2021	Sekretariat Daerah	Bagian Kesjahteraan Rakyat - Asisten Pemerintahan dan Kesra - Sekretariat Daerah	S-1/Sarjana - EKONOMI MANAJEMEN	JOMBANG	03-05-1979	PNS
70	510150452	197912102006042049	NUR RAHMAWATI, SE	PEREMPUAN	Ia	01-04-2006	0	0	Ia	01-01-2008	1	9	Ib	01-04-2022	Staf		Sekretaris	11-01-2021	Sekretariat Daerah	Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian - Bagian Umum - Asisten Administrasi Umum - Sekretariat Daerah	S-1/Sarjana - S-1 MANAJEMEN	KEDIRI	10-12-1979	PNS

No.	NIP	NIP Baru	Nama	JENIS KELAMIN	Gol CPNS	TMT CPNS	MKT CPNS	MKB CPNS	Gol PNS	TMT PNS	MKT PNS	MKB PNS	Gol Ruang	TMT Pangkat	Tipe Pegawai	Eselon	Jabatan	TMT Jabatan	Satuan Kerja	Satuan Kerja Detail	Pendidikan	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status
71	510150447	19820708 200604 1 011	SYAFLUDDIN, SE	LAKILAKI	IIa	01-04-2006	0	0	IIa	01-01-2008	1	9	IIb	01-04-2022	Staf		Perencanaan Rencanan Kegiatan Dan Anggaran	07-12-2022	Sekretariat Daerah	Bagian Perencanaan-Asisten Perencanaan dan Pembangunan - Sekretariat Daerah	S-1/Sarjana - S-1 EKONOMI MANAJEMEN	JOMBANG	08-07-1982	PNS
72	510135138	19840620 200312 2 003	ATK SUPRHANDINI, S.P.	PEREMPUAN	IIa	01-12-2003	0	0	IIa	01-04-2005	1	4	IIb	01-04-2022	Staf		Analisis Petyanan Publik	11-01-2021	Sekretariat Daerah	Bagian Organisasi - Asisten Administrasi Umum - Sekretariat Daerah	S-1/Sarjana - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	JOMBANG	20-06-1984	PNS
73	510125101	19781023 199703 1 007	DWIAGUS PRHANDOKO	LAKILAKI	IIa	01-03-1997	0	0	IIa	01-03-1999	2	0	IIa	01-10-2022	Staf		Perencanaan Kebutuhan Barang Inventaris	11-02-2021	Sekretariat Daerah	Sub Bagian Penyalangan - Bagian Umum - Asisten Administrasi Umum - Sekretariat Daerah	SLTA - SMA A.2.BCLOGI	PASIR	23-10-1976	PNS
74	19840708 201806 2 001		KUSUMAWARDANI, S.STP	PEREMPUAN	IIa	01-08-2018	0	0	IIa	01-08-2019	1	0	IIb	01-10-2022	Staf		Analisis Pemerintahan Daerah	09-05-2022	Sekretariat Daerah	Bagian Tata Pemerintahan - Asisten Pemerintahan dan Kesra - Sekretariat Daerah	S-1/Sarjana - S-1 ILMU KEUANGAN DAERAH	NGANJUK	05-07-1994	PNS
75	510150448	19810808 200604 1 018	ASHRUL HIDAYAT, SE	LAKILAKI	IIa	01-04-2006	0	0	IIa	01-01-2008	1	9	IIb	01-10-2023	Lain-lain		Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	01-03-2021	Sekretariat Daerah	Bagian Pengadaan Barang/Jasa - Asisten Perencanaan dan Pembangunan - Sekretariat Daerah	S-1/Sarjana - S-1 AKUTANSI	JOMBANG	08-08-1981	PNS
76	19951004 201808 1 002		FAIQU MUSTAFID, S.STP	LAKILAKI	IIa	01-08-2018	0	0	IIa	01-08-2019	1	0	IIb	01-10-2023	Staf		Analisis Kinerja	01-04-2023	Sekretariat Daerah	Bagian Organisasi - Asisten Administrasi Umum - Sekretariat Daerah	Diploma IV - D-IV KEUANGAN DAERAH	SITUBONDO	04-10-1995	PNS
77	510207179	19701027 200801 2 010	SUCIWILANDARI, SE	PEREMPUAN	IIa	01-01-2008	8	6	IIa	01-03-2010	10	11	IIa	01-04-2020	Staf		Pengelola Pemasokan Barang Milik Daerah	01-03-2021	Sekretariat Daerah	Bagian Perencanaan dan Keuangan - Asisten Administrasi Umum - Sekretariat Daerah	S-1/Sarjana - S-1 EKONOMI MANAJEMEN	MALANG	27-10-1970	PNS
78	510198457	19721118 200701 2 005	NENI SUNARMI DWI NURYATIN, SE	PEREMPUAN	IIa	01-01-2007	14	5	IIa	01-01-2009	16	5	IIa	01-04-2020	Staf		Perencanaan Program Anggaran Dan Peleporan	08-08-2022	Sekretariat Daerah	Bagian Umum - Asisten Administrasi Umum - Sekretariat Daerah	S-1/Sarjana - S-1 EKONOMI MANAJEMEN	JOMBANG	16-11-1972	PNS
79	510206856	19780929 200801 1 013	ARIS WAHYUDIONO, S.Sos.	LAKILAKI	IIa	01-01-2008	9	9	IIa	01-03-2010	11	11	IIa	01-04-2020	Staf		Pranata Acara	11-01-2021	Sekretariat Daerah	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan - Asisten Administrasi Umum - Sekretariat Daerah	S-1/Sarjana - S-1 SOSIOLOGI (ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL)	JOMBANG	29-09-1978	PNS
80	19740417 200901 2 003		EMMY SUSILO HANDANI, S.Sos	PEREMPUAN	IIa	01-01-2009	10	9	IIa	01-11-2010	12	7	IIa	01-04-2020	Staf		Sekretaris	07-10-2022	Sekretariat Daerah	Bagian Umum - Asisten Administrasi Umum - Sekretariat Daerah	S-1/Sarjana - S-1 ILMU SOSIATRI	JOMBANG	17-04-1974	PNS
81	510179522	19730206 200701 1 009	AND JURUR RICHMAD, S.Sos	LAKILAKI	IIa	01-01-2007	5	3	IIa	01-12-2008	7	2	IIa	01-04-2020	Lain-lain		Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	01-12-2020	Sekretariat Daerah	Bagian Pengadaan Barang/Jasa - Asisten Perencanaan dan Pembangunan - Sekretariat Daerah	S-1/Sarjana - S-1 ILMU SOSIATRI	JOMBANG	06-02-1973	PNS
82	510141185	19840512 200501 2 005	YUSNITA FITRIATI, S.P.	PEREMPUAN	IIa	01-01-2005	0	0	IIa	01-09-2006	1	8	IIa	01-04-2020	Staf		Bendahara	01-03-2021	Sekretariat Daerah	Bagian Perencanaan dan Keuangan - Asisten Administrasi Umum - Sekretariat Daerah	S-1/Sarjana - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	JOMBANG	12-05-1984	PNS
83	510207286	19780702 200801 2 014	RATNA DWI YULIA NAVITA TAURISA, SE.	PEREMPUAN	IIa	01-01-2008	5	0	IIa	01-03-2010	7	2	IIa	01-04-2020	Staf		Sekretaris	11-01-2021	Sekretariat Daerah	Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian - Bagian Umum - Asisten Administrasi Umum - Sekretariat Daerah	S-1/Sarjana - S-1 EKONOMI MANAJEMEN	JOMBANG	02-07-1978	PNS
84	19850926 201001 2 002		MAYA SEPTIAN, S.Sos.	PEREMPUAN	IIa	01-02-2010	5	6	IIa	01-03-2011	6	8	IIa	01-04-2020	Staf		Sekretaris	11-01-2021	Sekretariat Daerah	Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian - Bagian Umum - Asisten Administrasi Umum - Sekretariat Daerah	S-1/Sarjana - S-1 ILMU SOSIATRI	JOMBANG	26-09-1985	PNS
85	19790117 200901 2 001		LINA ANDAYANI, S.Sos	PEREMPUAN	IIa	01-01-2009	9	4	IIa	01-11-2010	11	2	IIa	01-04-2020	Lain-lain		Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	11-01-2021	Sekretariat Daerah	Bagian Pengadaan Barang/Jasa - Asisten Perencanaan dan Pembangunan - Sekretariat Daerah	S-1/Sarjana - S-1 ILMU SOSIAL	JOMBANG	17-01-1979	PNS
86	19810319 200801 1 014		ARES SETAWAN, SH	LAKILAKI	IIa	01-01-2008	7	5	IIa	01-03-2010	9	7	IIa	01-04-2020	Lain-lain		Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	01-04-2021	Sekretariat Daerah	Bagian Pengadaan Barang/Jasa - Asisten Perencanaan dan Pembangunan - Sekretariat Daerah	S-1/Sarjana - S-1 ILMU HUKUM	JOMBANG	19-03-1981	PNS
87	19811108 201001 1 002		MALK BRAHMAN, SH	LAKILAKI	IIa	01-01-2010	7	6	IIa	01-03-2011	8	8	IIa	01-04-2020	Staf		Analisis Standar Harga	11-01-2021	Sekretariat Daerah	Bagian Administrasi Pembangunan - Asisten Perencanaan dan Pembangunan - Sekretariat Daerah	S-1/Sarjana - S-1 ILMU HUKUM	SAMARINDA	08-11-1981	PNS
88	19811212 201001 2 002		NURUL HIDAYAH, S.Sos.	PEREMPUAN	IIa	01-01-2010	7	5	IIa	01-03-2011	8	7	IIa	01-04-2020	Staf		Pengelola Data	22-10-2021	Sekretariat Daerah	Bagian Perencanaan dan Keuangan - Asisten Administrasi Umum - Sekretariat Daerah	S-1/Sarjana - S-1 SOSIAL DAN POLITIK	JOMBANG	12-12-1981	PNS
89	510141195	19830413 200501 1 003	BAHTIAR ARIF EFFENDI	LAKILAKI	IIa	01-01-2005	0	0	IIa	01-09-2006	1	8	IIa	01-04-2021	Staf		Pengadministrasi Umum	24-02-2022	Sekretariat Daerah	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan - Asisten Administrasi Umum - Sekretariat Daerah	SLTA - SMA IPA	JOMBANG	13-04-1983	PNS
90	19960605 202008 2 001		ELLI DWI ANJELITA, S.P.	PEREMPUAN	IIa	01-08-2020	0	0	IIa	01-08-2021	1	0	IIa	01-08-2021	Staf		Pengelola Data	22-09-2023	Sekretariat Daerah	Bagian Umum - Asisten Administrasi Umum - Sekretariat Daerah	Diploma IV - D-IV/PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN	JOMBANG	05-06-1996	PNS
91	510110057	19670518 198903 2 011	SUNARSH	PEREMPUAN	IIa	01-03-1969	0	0	IIa	01-12-1990	1	9	IIa	01-10-2021	Staf		Pengadministrasi Umum	07-10-2022	Sekretariat Daerah	Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian - Bagian Umum - Asisten Administrasi Umum - Sekretariat Daerah	SLTA - PAKET C (IPA DAN IPS)	JOMBANG	18-05-1967	PNS
92	19820327 201001 2 002		TATK HASTININGRUM, S.Sos	PEREMPUAN	IIa	01-01-2010	9	1	IIa	01-03-2011	10	3	IIa	01-04-2022	Staf		Perencanaan Program Anggaran Dan Laporan	16-09-2022	Sekretariat Daerah	Bagian Pengadaan Barang/Jasa - Asisten Perencanaan dan Pembangunan - Sekretariat Daerah	S-1/Sarjana - S-1 SOSIOLOGI	JOMBANG	27-03-1982	PNS
93	510150450	19740522 200604 1 015	ANDRIYANTO NJGROHO	LAKILAKI	IIa	01-04-2006	0	0	IIa	01-01-2008	1	9	IIa	01-04-2022	Staf		Pengadministrasi Lapse	14-04-2021	Sekretariat Daerah	Bagian Pengadaan Barang/Jasa - Asisten Perencanaan dan Pembangunan - Sekretariat Daerah	SLTA - SMA IPS	FURBALINGGA	22-05-1974	PNS
94	19760328 201001 1 001		AGUS KURNAWAN, S.P	LAKILAKI	IIa	01-01-2010	5	0	IIa	01-03-2011	6	2	IIa	01-04-2022	Staf		Pengelola Bantuan Sosial Dan Hibah	11-01-2021	Sekretariat Daerah	Bagian Kesejahteraan Rakyat - Asisten Pemerintahan dan Kesra - Sekretariat Daerah	S-1/Sarjana - S-1 ILMU POLITIK DAN PEMERINTAHAN	JOMBANG	28-03-1976	PNS
95	510150453	19820315 200604 1 021	ABDUL ROHIM	LAKILAKI	IIa	01-04-2006	0	0	IIa	01-01-2008	1	9	IIa	01-04-2022	Staf		Pengelola Bantuan Sosial Dan Hibah	11-01-2021	Sekretariat Daerah	Bagian Kesejahteraan Rakyat - Asisten Pemerintahan dan Kesra - Sekretariat Daerah	SLTA - SMA IPA	LAMPUNG	15-03-1982	PNS
96	510150458	19841129 200604 1 005	ACHMAD CHOLLI, S.P.	LAKILAKI	IIa	01-04-2006	0	0	IIa	01-01-2008	1	0	IIa	01-04-2022	Staf		Sekretaris	11-01-2021	Sekretariat Daerah	Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian - Bagian Umum - Asisten Administrasi Umum - Sekretariat Daerah	S-1/Sarjana - S-1 ILMU PEMERINTAHAN	KEDIRI	29-11-1984	PNS
97	19800115 200901 2 002		KUSMIYATI, S.Sos.	PEREMPUAN	IIa	01-01-2009	9	0	IIa	01-11-2010	10	10	IIa	01-04-2022	Staf		Pengelola Keuangan	09-03-2023	Sekretariat Daerah	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan - Asisten Administrasi Umum - Sekretariat Daerah	S-1/Sarjana - S-1 SOSIOLOGI	JOMBANG	15-01-1980	PNS
98	19890409 202108 1 001		ROBBY FIRMIANYAH A.JI	LAKILAKI	IIa	01-08-2021	0	0	IIa	01-08-2022	1	0	IIa	01-08-2022	Staf		Ajudan	08-11-2022	Sekretariat Daerah	Bagian Umum - Asisten Administrasi Umum - Sekretariat Daerah	Diploma IV - D-IV/ MANAJEMEN PEMERINTAHAN	SIDOARJO	09-04-1999	PNS
99	19990224 202108 2 001		KARINA PUTRI RAHMANAH, S.T.P.	PEREMPUAN	IIa	01-08-2021	0	0	IIa	01-08-2022	1	0	IIa	01-08-2022	Staf		Sekretaris	22-09-2023	Sekretariat Daerah	Bagian Umum - Asisten Administrasi Umum - Sekretariat Daerah	Diploma IV - D-IV/ KEUANGAN DAERAH	SIDOARJO	24-02-1999	PNS
100	510163686	19671029 200604 1 003	CHUSNUL CHULLIQ	LAKILAKI	IIa	01-04-2006	12	3	IIa	01-01-2008	14	0	IIa	01-10-2022	Staf		Pramu Kebersihan	11-01-2021	Sekretariat Daerah	Sub Bagian Penyalangan - Bagian Umum - Asisten Administrasi Umum - Sekretariat Daerah	SLTA - MA IPS	JOMBANG	29-10-1967	PNS
101	19821103 201001 1 017		NOVAN SATRAWAN, Amd	LAKILAKI	IIc	01-01-2010	3	0	IIc	01-11-2011	4	10	IIa	01-10-2022	Staf		Pranata Barang Dan Jasa	11-01-2021	Sekretariat Daerah	Bagian Pengadaan Barang/Jasa - Asisten Perencanaan dan Pembangunan - Sekretariat Daerah	Diploma III/Sarjana Muda - D-III TEKNIK SIPIL	JOMBANG	03-11-1982	PNS
102	19970518 202203 1 001		MI TANZULA RUSDAUL HAQ, S.T.	LAKILAKI	IIa	01-03-2022	0	0	IIa	01-03-2023	1	0	IIa	01-03-2023	Lain-lain		Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	01-05-2023	Sekretariat Daerah	Bagian Pengadaan Barang/Jasa - Asisten Perencanaan dan Pembangunan - Sekretariat Daerah	S-1/Sarjana - S-1 TEKNIK KIMA	KEDIRI	18-05-1997	PNS
103	19890803 202203 2 003		ANN KHUSNATUN KASABAH, S.Si.	PEREMPUAN	IIa	01-03-2022	0	0	IIa	01-03-2023	1	0	IIa	01-03-2023	Lain-lain		Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	01-05-2023	Sekretariat Daerah	Bagian Pengadaan Barang/Jasa - Asisten Perencanaan dan Pembangunan - Sekretariat Daerah	S-1/Sarjana - S-1 MATEMATIKA	JOMBANG	30-08-1989	PNS
104	19951007 202203 2 004		ADDNAL FKRIYAH, S.Si.	PEREMPUAN	IIa	01-03-2022	0	0	IIa	01-03-2023	1	0	IIa	01-03-2023	Lain-lain		Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	01-05-2023	Sekretariat Daerah	Bagian Pengadaan Barang/Jasa - Asisten Perencanaan dan Pembangunan - Sekretariat Daerah	S-1/Sarjana - S-1 FISKA	JOMBANG	07-10-1995	PNS
105	510206831	19711122 200801 1 004	ABDUL AZIS WUJARJONO	LAKILAKI	IIa	01-01-2008	11	9	IIa	01-03-2010	13	11	IIb	01-04-2020	Staf		Pengadministrasi Umum	11-01-2021	Sekretariat Daerah	Sub Bagian Penyalangan - Bagian Umum - Asisten Administrasi Umum - Sekretariat Daerah	SLTA - SMA A.2.BCLOGI	JOMBANG	22-11-1971	PNS

No.	NIP	NIP Baru	Nama	JENIS KELAMIN	Gol CPNS	TMT CPNS	MKT CPNS	MKB CPNS	Gol PNS	TMT PNS	MKT PNS	MKB PNS	Gol Ruang	TMT Pangkat	Tipe Pegawai	Eselon	Jabatan	TMT Jabatan	Satuan Kerja	Satuan Kerja Detail	Pendidikan	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status
106	51020685	19740919 200801 1 007	HERU PRASETYO	LAKILAKI	IIa	01-01-2008	11	9	IIa	01-03-2010	13	11	IIb	01-04-2020	Staf		Pengadministrasi Perusatan	09-07-2021	Sekretariat Daerah	Bagian Perencanaan- Asisten Perencanaan dan Pembangunan - Sekretariat Daerah	SLTA - SMA LUMU LMU SOSIAL	SURABAYA	19-09-1974	PNS
107	510207325	19750204 200801 1 007	NONOK AGUNG JOKO PURNOMO	LAKILAKI	IIa	01-01-2008	8	5	IIa	01-03-2010	10	7	IIb	01-04-2020	Staf		Pengadministrasi Umum	01-03-2021	Sekretariat Daerah	Sub Bagian Rumah Tangga - Bagian Umum - Asisten Administrasi Umum - Sekretariat Daerah	SLTA - STM LISTRK	KEDIRI	04-02-1975	PNS
108	19770409 200901 1 001	19770409 200901 1 001	MISBAHUL MULNR	LAKILAKI	IIa	01-01-2009	7	5	IIa	01-11-2010	9	3	IIb	01-04-2021	Staf		Pengadministrasi Umum	11-01-2021	Sekretariat Daerah	Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf AHI dan Kepegawaian- Bagian Umum - Asisten Administrasi Umum - Sekretariat Daerah	SLTA - SMA IPS	JOMBANG	09-04-1977	PNS
109	19790605 200901 1 007	19790605 200901 1 007	SUSANTO	LAKILAKI	IIa	01-01-2009	7	0	IIa	01-11-2010	8	10	IIb	01-04-2021	Staf		Pengadministrasi Umum	11-01-2021	Sekretariat Daerah	Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf AHI dan Kepegawaian- Bagian Umum - Asisten Administrasi Umum - Sekretariat Daerah	SLTA - SMU IPA	JOMBANG	05-06-1979	PNS
110	19790205 200901 1 005	19790205 200901 1 005	ANANG YUDIANTO	LAKILAKI	IIa	01-01-2009	8	0	IIa	01-11-2010	9	10	IIb	01-04-2021	Staf		Pengemudi	11-01-2021	Sekretariat Daerah	Sub Bagian Perengkapan - Bagian Umum - Asisten Administrasi Umum - Sekretariat Daerah	SLTA Kejuaran - STM MESIN	JOMBANG	05-02-1976	PNS
111	19850304 201001 1 004	19850304 201001 1 004	SONA SYAMSUDIN	LAKILAKI	IIa	01-01-2010	5	8	IIa	01-03-2011	6	10	IIb	01-04-2022	Staf		Pengelola Barang Milk Negara	11-01-2021	Sekretariat Daerah	Bagian Pengadaan Barang/Jasa - Asisten Perencanaan dan Pembangunan - Sekretariat Daerah	SLTA - SMA A.4.BAHASA	JOMBANG	04-03-1985	PNS
112	19791008 201001 1 001	19791008 201001 1 001	HARI PURNOMO	LAKILAKI	IIa	01-01-2010	5	5	IIa	01-03-2011	6	7	IIb	01-04-2022	Staf		Pramu Kebersihan	11-01-2021	Sekretariat Daerah	Sub Bagian Perengkapan - Bagian Umum - Asisten Administrasi Umum - Sekretariat Daerah	SLTA - SMU IPS	JOMBANG	06-10-1979	PNS
113	19801119 201001 2 001	19801119 201001 2 001	EKO SEMATI	PEREMPUAN	IIa	01-01-2010	6	5	IIa	01-03-2011	7	7	IIb	01-04-2022	Staf		Pengadministrasi Umum	11-01-2021	Sekretariat Daerah	Bagian Administrasi Pembangunan - Asisten Perencanaan dan Pembangunan - Sekretariat Daerah	SLTA - SMU IPS	JOMBANG	19-11-1980	PNS
114	19740312 201001 1 003	19740312 201001 1 003	ENDRA KARNO	LAKILAKI	IIa	01-01-2010	5	7	IIa	01-03-2011	6	9	IIb	01-04-2022	Staf		Pengadministrasi Perusatan	11-01-2021	Sekretariat Daerah	Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf AHI dan Kepegawaian- Bagian Umum - Asisten Administrasi Umum - Sekretariat Daerah	SLTA - SMA LUMU LMU SOSIAL	JOMBANG	12-03-1974	PNS
115	19820715 201212 2 001	19820715 201212 2 001	SAPTY RAYADANI, S.P.	PEREMPUAN	IIa	01-12-2012	7	11	IIa	26-02-2014	9	2	IIc	01-04-2021	Staf		Pengelola Monitoring Dan Evaluasi	11-01-2021	Sekretariat Daerah	Bagian Pengadaan Barang/Jasa - Asisten Perencanaan dan Pembangunan - Sekretariat Daerah	S-1/Sarjana - S-1 LMU PEMERINTAHAN	MADJIN	15-07-1982	PNS
116	19821014 201001 1 002	19821014 201001 1 002	DEDK DWIPURYANTO	LAKILAKI	IIa	01-01-2010	6	4	IIa	01-03-2011	7	6	IIc	01-04-2021	Staf		Pengadministrasi Umum	14-04-2021	Sekretariat Daerah	Bagian Perencanaan- Asisten Perencanaan dan Pembangunan - Sekretariat Daerah	SLTA - SMA A.3.IPS	JOMBANG	14-10-1982	PNS
117	19940428 202012 1 004	19940428 202012 1 004	MUHAMMAD AREF FIRDHAUS, A.MJ	LAKILAKI	IIc	01-12-2020	3	0	IIc	01-12-2021	4	0	IIc	01-12-2021	Staf		Pengolah Data Kelembagaan	11-01-2021	Sekretariat Daerah	Bagian Organisasi - Asisten Administrasi Umum - Sekretariat Daerah	Diploma II/Sarjana Muda - D-III TEKNIK INFORMATIKA	KEDIRI	28-04-1994	PNS
118	19960228 202012 1 003	19960228 202012 1 003	MUHAMMAD HAMM DJAZULI A.MJ	LAKILAKI	IIc	01-12-2020	3	0	IIc	01-12-2021	4	0	IIc	01-12-2021	Staf		Teknis Listrik Dan Jaringan	11-01-2021	Sekretariat Daerah	Sub Bagian Perengkapan - Bagian Umum - Asisten Administrasi Umum - Sekretariat Daerah	Diploma II/Sarjana Muda - D-III TEKNIK LISTRK	JOMBANG	29-02-1996	PNS
119	19961221 202012 2 006	19961221 202012 2 006	FARAH EKA DEWI SAGITA, A.MJ	PEREMPUAN	IIc	01-12-2020	3	0	IIc	01-12-2021	4	0	IIc	01-12-2021	Staf		Penata Liputan	11-01-2021	Sekretariat Daerah	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan - Asisten Administrasi Umum - Sekretariat Daerah	Diploma II/Sarjana Muda - D-III KOMUNIKASI	JOMBANG	21-12-1996	PNS
120	19981103 202012 2 002	19981103 202012 2 002	ELSA NOVANTI HARTONO, A.MJ.A.PkI	PEREMPUAN	IIc	01-12-2020	3	0	IIc	01-12-2021	4	0	IIc	01-12-2021	Staf		Pengelola Laporan Pelayanan Pemerintahan Daerah	11-01-2021	Sekretariat Daerah	Bagian Tata Pemerintahan - Asisten Pemerintahan dan Kesra - Sekretariat Daerah	Diploma II/Sarjana Muda - D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN	JOMBANG	03-11-1998	PNS
121	19870916 202012 1 003	19870916 202012 1 003	ABDUL MUTHALIB, A.MJ	LAKILAKI	IIc	01-12-2020	3	0	IIc	01-12-2021	4	0	IIc	01-12-2021	Staf		Pengelola Pemanfaatan Barang Milk Daerah	21-03-2021	Sekretariat Daerah	Bagian Umum - Asisten Administrasi Umum - Sekretariat Daerah	Diploma II/Sarjana Muda - D-III AKUNTANSI	BONDOWOSO	16-09-1987	PNS
122	19881123 202012 1 005	19881123 202012 1 005	SINGGIR NOVA WIJAYANTO, A.MJ	LAKILAKI	IIc	01-12-2020	3	0	IIc	01-12-2021	4	0	IIc	01-12-2021	Staf		Verifikator Keuangan	11-01-2021	Sekretariat Daerah	Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf AHI dan Kepegawaian- Bagian Umum - Asisten Administrasi Umum - Sekretariat Daerah	Diploma II/Sarjana Muda - D-III AKUNTANSI	TRENGGALEK	23-11-1988	PNS
123	19890313 201405 1 001	19890313 201405 1 001	BAMBANG MULYONO	LAKILAKI	IIa	01-05-2014	9	4	IIa	01-06-2015	10	5	IIc	01-10-2022	Staf		Bendahara	01-01-2020	Sekretariat Daerah	Bagian Kesejahteraan Rakyat - Asisten Pemerintahan dan Kesra - Sekretariat Daerah	SLTA Kejuaran KPAK AKUNTANSI	JOMBANG	13-03-1980	PNS
124	19820323 201407 1 001	19820323 201407 1 001	ANDK SAMSUL SAPUTRA	LAKILAKI	IIa	01-07-2014	9	6	IIa	01-09-2015	10	8	IIc	01-10-2022	Staf		Penata Liputan	11-01-2021	Sekretariat Daerah	Sub Bagian Komunikasi Pimpinan - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan - Asisten Administrasi Umum - Sekretariat Daerah	SLTA - SMA A.3.IPS	JOMBANG	23-03-1982	PNS
125	19750825 201407 1 001	19750825 201407 1 001	M. ELLIAS KHARRI	LAKILAKI	IIa	01-07-2014	9	6	IIa	01-09-2015	10	8	IIc	01-10-2022	Staf		Penata Liputan	11-01-2021	Sekretariat Daerah	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan - Asisten Administrasi Umum - Sekretariat Daerah	SLTA - SMA LUMU LMU SOSIAL	JOMBANG	25-08-1975	PNS
126	20010417 202302 2 003	20010417 202302 2 003	SALWA SABELA, A.MJ.Ak.	PEREMPUAN	IIc	01-02-2023	3	0	IIc	01-02-2023	3	0	IIc	01-02-2023	Staf		Pengolah Data Dan Informasi	01-02-2023	Sekretariat Daerah	Bagian Perencanaan dan Keuangan - Asisten Administrasi Umum - Sekretariat Daerah	Diploma II/Sarjana Muda - D-III AKUNTANSI	JOMBANG	17-04-2001	CPNS
127	20000923 202302 1 001	20000923 202302 1 001	FAD PAHRO HAMID, A.MJ.Ak.	LAKILAKI	IIc	01-02-2023	3	0	IIc	01-02-2023	3	0	IIc	01-02-2023	Staf		Pengolah Data Dan Informasi	01-02-2023	Sekretariat Daerah	Bagian Administrasi Pembangunan - Asisten Perencanaan dan Pembangunan - Sekretariat Daerah	Diploma II/Sarjana Muda - D-III AKUNTANSI	PASURUAN	23-09-2000	CPNS
128	20001021 202302 1 003	20001021 202302 1 003	HELMI ALWAN NUGROHO, A.MJ.Ak.	LAKILAKI	IIc	01-02-2023	3	0	IIc	01-02-2023	3	0	IIc	01-02-2023	Staf		Pengolah Data Dan Informasi	01-02-2023	Sekretariat Daerah	Bagian Administrasi Pembangunan - Asisten Perencanaan dan Pembangunan - Sekretariat Daerah	Diploma II/Sarjana Muda - D-III AKUNTANSI	JOMBANG	21-10-2000	CPNS
129	20000609 202302 2 002	20000609 202302 2 002	MANAR NASIHA, A.MJ.Ak.	PEREMPUAN	IIc	01-02-2023	3	0	IIc	01-02-2023	3	0	IIc	01-02-2023	Staf		Pengolah Data Dan Informasi	01-02-2023	Sekretariat Daerah	Bagian Perencanaan dan Keuangan - Asisten Administrasi Umum - Sekretariat Daerah	Diploma II/Sarjana Muda - D-III AKUNTANSI	TRENGGALEK	09-06-2000	CPNS
130	20000406 202302 2 004	20000406 202302 2 004	AFRIANA VIRO FADLLA, Amd T.	PEREMPUAN	IIc	01-03-2023	3	0	IIc	01-03-2023	4	0	IIc	01-03-2023	Staf		Teknis Listrik Dan Jaringan	01-03-2022	Sekretariat Daerah	Bagian Umum - Asisten Administrasi Umum - Sekretariat Daerah	Diploma II/Sarjana Muda - D-III TEKNIK ELEKTRO	MALANG	06-04-2000	PNS
131	510198475	19690617 200701 1 019	SUPRAPTO	LAKILAKI	IIc	01-01-2007	16	0	IIc	01-01-2009	18	0	IIc	01-04-2023	Staf		Pramu Kebersihan	11-01-2021	Sekretariat Daerah	Sub Bagian Perengkapan - Bagian Umum - Asisten Administrasi Umum - Sekretariat Daerah	SLTP - SMP	JOMBANG	17-06-1969	PNS
132	510206812	19810123 200801 1 004	SLAMET RIDWAN	LAKILAKI	IIc	01-01-2008	13	0	IIc	01-03-2010	15	2	IIb	01-04-2020	Staf		Pengadministrasi Umum	01-03-2023	Sekretariat Daerah	Bagian Administrasi Pembangunan - Asisten Perencanaan dan Pembangunan - Sekretariat Daerah	SLTA - STM MESIN LUMUM	JOMBANG	23-01-1981	PNS
133	19740420 200901 1 005	19740420 200901 1 005	BASORIERFAN	LAKILAKI	IIa	01-01-2009	7	0	IIa	01-11-2010	8	10	IIc	01-04-2021	Staf		Pramu Kebersihan	11-01-2021	Sekretariat Daerah	Sub Bagian Perengkapan - Bagian Umum - Asisten Administrasi Umum - Sekretariat Daerah	Sekolah Dasar	JOMBANG	20-04-1974	PNS
134	19800300 201001 1 003	19800300 201001 1 003	MOKH. SLAMET	LAKILAKI	IIa	01-01-2010	5	7	IIa	01-03-2011	6	9	IIc	01-10-2022	Staf		Pramu Kebersihan	11-01-2021	Sekretariat Daerah	Bagian Administrasi Pembangunan - Asisten Perencanaan dan Pembangunan - Sekretariat Daerah	Sekolah Dasar	JOMBANG	30-04-1969	PNS